Hantono
Temy Setiawan
Muhammad Rizal
Dwi Urip Wardoyo
Agustine Dwianika
Victoria Ari Palma Akadiati
Intan Rakhmawati
Galuh Tresna Murti
Yennisa
Sobrotul Imtikhanah
Antonius Grivaldi Sondakh
Medina Almunawwaroh
Jantje Lagu
Alfian
Made Dudy Satyawan
Dewi Kusuma Wardani

AKUNTANSI
BERKELANJUTAN

BEKERJASAMA DENGAN
YAYASAN PENDIDIKAN AUDITOR
INDONESIA

Editor:
Hidayatullah, SE., Msi., Mkom., M.H., Ak., CA., CPA., CIISA., COMP

AKUNTANSI
BERKELANJUTAN

Akuntansi berkelanjutan adalah suatu pendekatan dalam akuntansi yang menyatukan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendukung pembuatan keputusan yang berkelanjutan. Ini termasuk dalam bidang yang lebih luas dari pelaporan berkelanjutan, yang menggabungkan informasi keuangan dengan data tentang dampak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Akuntansi berkelanjutan melibatkan pemahaman dan pelaporan terhadap dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari operasi perusahaan, serta bagaimana perusahaan tersebut mengelola dampak tersebut untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Hal ini dapat membantu stakeholder, seperti investor, karyawan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat luas, untuk memahami sejauh mana perusahaan tersebut bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Buku ini terdiri dari 16 bab sebagai berikut:

Bab 1. Pengantar Akuntansi Berkelanjutan
Bab 2. Prinsip-Prinsip Akuntansi Berkelanjutan
Bab 3. Laporan Keuangan Berkelanjutan
Bab 4. Pendapatan Berkelanjutan
Bab 5. Biaya Berkelanjutan
Bab 6. Akuntansi Sumber Daya Manusia Berkelanjutan
Bab 7. Akuntansi LingkunganBab 8. Akuntansi Sosial
Bab 8. Pengukuran dan Pelaporan Emisi Karbon
Bab 9. Akuntansi Energi dan Air
Bab 10. Akuntansi untuk Limbah dan Daur Ulang
Bab 11. Akuntansi Biodiversitas
Bab 12. Akuntansi Risiko dan Peluang Berkelanjutan
Bab 13. Peran Pemangku Kepentingan dalam Akuntansi Berkelanjutan
Bab 14. Audit dan Assurance dalam Akuntansi Berkelanjutan
Bab 15. Etika dan Profesionalisme dalam Akuntansi Berkelanjutan

eureka media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-151-436-3

AKUNTANSI BERKELANJUTAN

Hantono
Temy Setiawan
Muhammad Rizal
Dwi Urip Wardoyo
Agustine Dwianika
Victoria Ari Palma Akadiati
Intan Rakhmawati
Galuh Tresna Murti
Yennisa
Sobrotul Imtikhanah
Antonius Grivaldi Sondakh
Medina Almunawwaroh
Jantje Lagu
Alfian
Made Dudy Satyawan
Dewi Kusuma Wardani

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN,SURVEY,KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

AKUNTANSI BERKELANJUTAN

Penulis	:	Hantono, Temy Setiawan, Muhammad Rizal, Dwi Urip Wardoyo, Agustine Dwianika, Victoria Ari Palma Akadiati, Intan Rakhmawati, Galuh Tresna Murti, Yennisa, Sobrotul Imtikhanah, Antonius Grivaldi Sondakh, Medina Almunawwaroh, Jantje Lagu, Alfian, Made Dudy Satyawan, Dewi Kusuma Wardani
Editor	:	Hidayatullah, SE., Msi., Mkom.,M.H., Ak., CA., CPA., CIISA., CDMP
Desain Sampul	:	Eri Setiawan
Tata Letak	:	Nur Aisah
ISBN	:	978-623-151-436-3

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, AGUSTUS 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

Eureka Media Aksara bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Auditor Indonesia

All right reserved
Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR EDITOR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, tugas Editor adalah membantu dalam memperbaiki format dan sistematika penyusunan buku sehingga lebih menarik, terarah, dan mudah dipahami oleh semua kalangan pembaca. Editor tidak menekankan pada perbaikan-perbaikan yang sifatnya substansial kepada Tim Penulis, akan tetapi hanya memberikan masukan yang bertujuan agar tulisan lebih berbobot.

Editor mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah memberikan kepercayaan penuh kepada Editor untuk mengedit buku ini. Editor mengakui bahwa buku ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan buku ini pada edisi-edisi berikutnya. Kepada Tim Penulis, Editor menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas jerih payah untuk menuangkan hasil pemikirannya ke dalam sebuah tulisan ini; ke depannya diharapkan tetap produktif menulis dan menghasilkan karya-karya terbaik. Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat bagi semua kalangan.

Jakarta, Agustus 2023
Editor,

Hidayatullah,SE.,Msi.,Mkom.,Ak.,CA.,CPA.,CIISA.,CDMP

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KOMUNITAS PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan kita kesehatan lahir dan batin, sehingga para penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul AKUNTANS BERKELANJUTAN. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Alam Nabi Muhammad saw. sang perubah zaman kebodohan menjadi penuh kepintaran, kecerdasan berfikir, dan berahlak mulia.

Penulis dapat menyelesaikan buku ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan pemahaman tentang AKUNTANS BERKELANJUTAN. Akuntansi berkelanjutan adalah suatu pendekatan dalam akuntansi yang menyatukan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mendukung pembuatan keputusan yang berkelanjutan. Ini termasuk dalam bidang yang lebih luas dari pelaporan berkelanjutan, yang menggabungkan informasi keuangan dengan data tentang dampak perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Buku ini di harapkan dapat menjadi buku pegangan tambahan bagi perguruan tinggi dalam memberikan materi pengajaran terkait Profesi Akuntan Publik dan Audit Laporan Keuangan. Buku Ini terdiri 16 Bab sangat sesuai dengan kurikulum perguruan tinggi dan telah disusun sesuai dengan kebutuhan materi di perguruan tinggi.

Jakarta, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR EDITOR..... iii
PRAKATA.....iv
DAFTAR ISI v
BAB 1 PENGANTAR AKUNTANSI BERKELANJUTAN 1
A. Definisi dan Ruang Lingkup Akuntansi Berkelanjutan..... 1
B. Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Berkelanjutan..... 3
C. Pentingnya Akuntansi Berkelanjutan dalam Bisnis.... 5
D. Standar dan Kerangka Kerja Akuntansi Berkelanjutan..... 6
BAB 2 PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI BERKELANJUTAN 9
A. Keberlanjutan Ekonomi 9
B. Keberlanjutan Sosial..... 11
C. Keberlanjutan Lingkungan..... 12
D. Konsep *Triple Bottom Line* (TBL)..... 15
BAB 3 LAPORAN KEUANGAN BERKELANJUTAN 21
A. Konsep Laporan Keuangan Berkelanjutan 21
B. Komponen Laporan Keuangan Berkelanjutan 25
C. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Berkelanjutan..... 29
D. Analisis dan Interpretasi Laporan Keuangan Berkelanjutan..... 32
BAB 4 PENDAPATAN BERKELANJUTAN..... 41
A. Konsep Pendapatan Berkelanjutan..... 41
B. Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan Berkelanjutan..... 43
C. Laporan dan Pengungkapan Pendapatan Berkelanjutan..... 48
D. Pengaruh Pendapatan Berkelanjutan terhadap Kinerja Keuangan..... 50
BAB 5 BIAYA KEBERKELANJUTAN..... 52
A. Konsep Biaya Berkelanjutan..... 52
B. Pengukuran dan Pengakuan Biaya Berkelanjutan 53
C. Laporan dan Pengungkapan Biaya Berkelanjutan.... 55

LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, STUDI, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

D. Pengaruh Biaya Keberlanjutan terhadap Kinerja Keuangan.....58
BAB 6 AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIA BERKELANJUTAN.....62
A. Konsep Akuntansi Sumber Daya Manusia Berkelanjutan 62
B. Pengukuran dan Pengakuan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan.....65
C. Laporan dan Pengungkapan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan.....69
D. Pengaruh Akuntansi Sumber Daya Manusia Berkelanjutan terhadap Kinerja Keuangan 72
BAB 7 AKUNTANSI LINGKUNGAN 74
A. Konsep Akuntansi Lingkungan 74
B. Pengukuran dan Pengakuan Dampak Lingkungan.....75
C. Laporan dan Pengungkapan Dampak Lingkungan.....76
D. Akuntansi untuk Pengurangan Dampak Lingkungan.....82
BAB 8 AKUNTANSI SOSIAL.....85
A. Konsep Akuntansi Sosial 85
B. Pengukuran dan Pengakuan Akuntansi Sosial.....87
C. Laporan dan Pengungkapan Akuntansi Sosial.....90
D. Akuntansi untuk Pengurangan Dampak Sosial.....94
BAB 9 PENGUKURAN DAN PELAPORAN EMISI KARBON.....96
A. Pengantar Emisi Karbon dan Perubahan Iklim 96
B. Pengukuran Emisi Karbon.....98
C. Laporan Emisi Karbon 103
D. Regulasi dan Kebijakan tentang Emisi Karbon.....107
BAB 10 AKUNTANSI ENERGI DAN AIR 108
A. Pengenalan Akuntansi Energi dan Air 108
B. Pengukuran dan Pelaporan Konsumsi Energi dan Air 112
C. Efesiensi Energi dan Penghematan Air 119
D. Kebijakan dan Regulasi Energi dan Air.....121

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

BAB 11 AKUNTANSI UNTUK LIMBAH DAN DAUR ULANG 124
A. Pendahuluan..... 124
B. Pentingnya Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang.. 127
C. Biaya-biaya Lingkungan..... 128
D. Eko-efisiensi Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang 129
E. Akuntansi untuk Limbah dan Daur Ulang..... 130
BAB 12 AKUNTANSI BIODIVERSITAS..... 133
A. Pengenalan Biodiversitas dan Pentingnya dalam Akuntansi..... 134
B. Akuntansi untuk Pengelolaan Biodiversitas..... 136
C. Pelaporan Biodiversitas..... 138
D. Regulasi dan Kebijakan terkait Biodiversitas 139
BAB 13 AKUNTANSI RISIKO DAN PELUANG BERKELANJUTAN..... 143
A. Identifikasi Risiko dan Peluang Berkelanjutan..... 143
B. Pengukuran Risiko dan Peluang Berkelanjutan..... 146
C. Pengelolaan Risiko Berkelanjutan..... 148
D. Pelaporan Risiko dan Peluang Berkelanjutan 149
BAB 14 PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM AKUNTANSI BERKELANJUTAN 152
A. Identifikasi Pemangku Kepentingan..... 152
B. Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan..... 154
C. Tanggapan Pemangku Kepentingan terhadap Laporan Keuangan Berkelanjutan 165
D. Pengaruh Pemangku Kepentingan terhadap Kinerja Berkelanjutan..... 168
BAB 15 AUDIT DAN ASSURANCE DALAM AKUNTANSI BERKELANJUTAN..... 170
A. Peran Audit dalam Akuntansi Berkelanjutan 170
B. Standar Audit untuk Akuntansi Berkelanjutan..... 173
C. Proses Audit Akuntansi Berkelanjutan 174
D. Assurance Laporan Keuangan Berkelanjutan 176

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN, PELATIHAN, DAN SEKTOR PUBLIK

BAB 16 ETIKA DAN PROFESIONALISME DALAM AKUNTANSI BERKELANJUTAN.....180
A. Etika dalam Praktik Akuntansi Berkelanjutan.....180
B. Tanggung Jawab Profesional Akuntan dalam Akuntansi Berkelanjutan.....182
C. Isu-isu Etis Kontemporer dalam Akuntansi Berkelanjutan 183
D. Organisasi Profesional dan Standar Etika dalam Akuntansi Berkelanjutan.....188
DAFTAR PUSTAKA.....190
TENTANG PENULIS.....207
TENTANG EDITOR.....217

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN,SURVEY,KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

BAB 1 PENGANTAR AKUNTANSI BERKELANJUTAN

Hantono, S.E., S.Pd., M.Si., Ak., CAP., CJAT.,
CPSP.,CBPA.,CPRW.,CNPHRP.,CSRP.,CLMA., CPFR.
Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Medan

A. Definisi dan Ruang Lingkup Akuntansi Berkelanjutan

Akuntansi keberlanjutan merupakan istilah yang berkaitan dengan kebijakan untuk memasukkan elemen biaya lingkungan ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah suatu implikasi yang timbul dari sisi keuangan maupun non keuangan.

Pengembangan bidang keilmuan ini dikenal dengan akuntansi keberlanjutan atau *sustainability accounting.* Akuntansi berkelanjutan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi modern. Bidang ilmu ini menganalisis dampak bisnis terhadap sosial dan lingkungan. Pada bidang keilmuan akuntansi keberlanjutan, seorang akuntan tidak hanya terlibat dalam pencatatan dan pengambilan keputusan keuangan. Akuntan juga harus ikut menjaga kondisi lingkungan dan sosial. Ketentuan ini diatur dalam Badan Standar Akuntansi Internasional (*International Financial Reporting Standard*/IFRS) sebagai acuan untuk menjamin pencatatan yang akurat dari akuntan.

Proses keberlanjutan membutuhkan pembangunan struktural dan sistemik yang mengarah pada perubahan transformatif. Perubahan ini mereformasi aturan dan peraturan

akuntansi yang ada dengan menciptakan aturan dan prosedur akuntansi baru(Gary, 2021).

Akuntansi keberlanjutan dapat didefinisikan secara luas sebagai strategi organisasi bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungan ekologi eksternal dan internal organisasi mereka. Interaksi ekonomi bisnis dan produksi terekam dan tercermin dalam operasi perusahaan dalam hal kinerja keuangan, sosial dan lingkungan(Coville, 2021).

Akuntansi keberlanjutan merupakan inovasi akuntansi dan hasil dari proses perubahan organisasi. Ketika organisasi menghadapi tuntutan terkait transparansi dari pihak eksternal yang semakin meningkat setiap tahunnya, mereka mengadopsi inovasi untuk mengembangkan cara baru dalam mengungkapkan informasi kepada konstituen/pihak eskternal ini (Belluci & Manetti, 2018) di dalam (Aziza & Sukoharsono, 2022).

Akuntansi social lingkungan merupakan terobosan akuntansi yang mana di era global kebutuhan informasi organisasi tidak hanya berupa informasi keuangan saja, namun juga informasi non-keuangan seperti kinerja sosial lingkungan organisasi. Bahkan investor juga membutuhkan informasi non-keuangan organisasi sebagai penilaian resiko dan peluang organisasi di masa lalu, saat ini maupun masa mendatang. Adanya informasi non-keuangan mendukung pengambilan keputusan investasi dengan tepat sasaran. Selain itu kehadiran akuntansi social lingkungan juga merupakan penerang dalam mengubah pola pikir pelaku bisnis yang masih mengikuti pemikiran para ekonom klasik yang berpaku pada pendekatan kapitalis dimana orientasi bisnis mereka hanya tertuju pada peningkatan ekonomi saja atau hanya mengadopsi single/*economic bottom line* yang berfokus pada pembangunan manfaat ekonomi.(Aziza & Sukoharsono, 2022).

Implementasi akuntansi berkelanjutan memiliki banyak manfaat bagi organisasi. Pada saat yang sama, manajemen perusahaan telah secara kuat menerapkan gagasan keberlanjutan pada kegiatan perusahaan dan telah memutuskan

untuk mengungkapkan dampak sosial dan ekonomi dari kegiatan perusahaan, dimana penjelasan ruang lingkup akuntansi berkelanjutan ada di bawah ini.

Sustainability report atau laporan keberlanjutan menurut Global Inititative Reporting (2018) adalah "laporan tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan sehari-hari yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi". Sustainability report bisa disebut dengan berbagai istilah yaitu corporate social responsibility (CSR), laporan non-keuangan, laporan triple bottom line, dan yang lainnya(Damayanti & Hardiningsih, 2021)

Pengungkapan aksi sosial dan lingkungan dilakukan perusahaan melalui Environmental, Social, and Governance Report (ESG Report) yang disusun oleh akuntan. Laporan ini berisi informasi aksi sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Pada penyusunan laporan ESG, aksi menjaga Bumi lebih dikedepankan daripada finansial. Dalam laporan ESG, perusahaan mengungkapkan besaran emisi karbon yang dihasilkan dalam proses bisnisnya. Pengungkapan emisi karbon memang berisiko bagi perusahaan. Akan tetapi, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Dari situlah, akuntansi berkelanjutan berfungsi sebagai penjaga proses bisnis agar tetap berjalan optimal sekaligus ikut memastikan Bumi tetap terjaga dengan baik. Akuntan merupakan penggerak dalam bidang keilmuan akuntansi berkelanjutan. Akuntan tipe ini harus disiapkan sejak dini oleh perguruan tinggi. Dengan begitu, akuntan di masa depan tidak hanya mahir dalam pencatatan dan pelaporan akuntansi, tetapi juga dapat menganalisis dan peduli akan dampak bisnis perusahaan terhadap Bumi(Kristanto, 2022).

B. Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Berkelanjutan

Agenda perkembangan bisnis dan lingkungan berjalan sangat cepat dan mengandalkan inisiatif secara sukarela. Selain itu, organisasi internasional, seperti *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dan *International Chamber of*

Commerce (ICC) memiliki perwakilan di masing masing negara Namun, hanya waktu yang akan membuktikan apakah hal ini dapat berjalan efektif atau tidak. Tidak ada bukti yang cukup kuat apakah kesukarelaan akan membantu mengatasi krisis lingkungan yang terjadi. Namun, di lain sisi, ada bukti yang memperlihatkan dari beberapa perusahaan bahwa kesukarelaan membawa dampak perubahan terhadap lingkungan meski tidak secara signifikan. Selain itu, faktor penting lainnya yang mempengaruhi keberhasilan dalam merespons isu lingkungan adalah sikap dan tingkat pendidikan para pemerhati lingkungan. Khususnya, apa yang diketahui seseorang tentang lingkungan dan bagaimana dampaknya bagi lingkungan sehingga mempengaruhi sikap orang untuk mencari solusi terhadap persoalan lingkungan yang dihadapi (Sihombing & Hastuti, 2018).

Menurut sejarah, sejak hadirnya Revolusi Industri, perkembangan dunia usaha menjadi semakin pesat. Namun, di samping kemajuan dibidang industri dan ekonomi ini juga menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Dimana mulai muncul isu-isu kerusakan lingkungan yang dianggap sebagai akibat dari eksploitasi industri atas sumberdaya alam Lingkungan akuntansi mulai menerima perhatian selama krisis energi pada 1970- an. Meskipun isu tersebut diberikan pertimbangan untuk sementara waktu, krisis energi berakhir dan 1980-an diantar di era baru kemakmuran ekonomi. Praktek akuntansi keberlanjutan memudar ke latar belakang sebelum standar untuk mengukur dampak ekonomi dikembangkan. Perundang-undangan dan kesepakatan tentang bagaimana menghitung faktor lingkungan-sosial dan faktor-faktor apa harus dihitung sulit didapat. Pada 1990-an, suatu kenaikan besar dalam aktivitas perlindungan lingkungan membawa akuntansi lingkungan ke dalam kesadaran konsumen dan bisnis. Secara bertahap beberapa standar akuntansi lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh organisasi akuntansi terkemuka seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Komite Eksekutif American Institute of CPA(Khairin et al., 2021).

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SERVICE PUBLIK

Pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) telah berkembang dan menjadi salah satu hal yang penting bagi setiap organisasi (Ernst and Young, 2013). Sustainability report menjadi media bagi perusahaan untuk menginformasikan kinerja organisasi dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungannya kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Banyak organisasi sudah mulai beralih dari cara tradisional yang hanya melaporkan aspek keuangan, berubah ke arah yang lebih modern, yakni melaporkan semua aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan (dimensi sosial dan lingkungan) kepada para pemangku kepentingan (Tarigan & Semuel, 2015).

C. Pentingnya Akuntansi Berkelanjutan dalam Bisnis

Konsep sustainability accounting kini menjadi isu menarik yang telah dibahas oleh para akuntan profesional. Permasalahan pada akuntansi konvensional adalah akuntansi konvensional tidak dapat mengukur mengenai aktivitas aktivitas perusahaan yang tidak bersifat kuantitatif, namun aktivitas-aktivitas tersebut dapat menambah value bagi perusahaan. Contoh aktivitas tersebut adalah dampak aktivitas bisnis perusahaan pada komunitas sosial dan lingkungan hidup, hubungan perusahaan dengan pelanggan, komitmen yang kuat dari karyawan, dan motivasi tinggi manajemen perusahaan merupakan aktivitas perusahaan yang tidak dapat diukur dengan angka. Informasi-informasi ini merupakan informasi yang penting bagi pemangku kepentingan perusahaan dan konsep sustainability accounting dapat menyajikan jenis informasi ini dengan baik untuk selanjutnya informasi ini diungkapkan kepada pemangku kepentingan perusahaan. Peran dari pemangku kepentingan organisasi sangat menentukan kualitas dari implementasi konsep sustainability Konsep sustainability accounting kini menjadi isu menarik yang telah dibahas oleh para akuntan profesional. Permasalahan pada akuntansi konvensional adalah akuntansi konvensional tidak dapat mengukur mengenai aktivitas-aktivitas perusahaan yang tidak bersifat kuantitatif, namun aktivitas-aktivitas tersebut dapat menambah value bagi perusahaan. Contoh aktivitas

tersebut adalah dampak aktivitas bisnis perusahaan pada komunitas sosial dan lingkungan hidup, hubungan perusahaan dengan pelanggan, komitmen yang kuat dari karyawan, dan motivasi tinggi manajemen perusahaan merupakan aktivitas perusahaan yang tidak dapat diukur dengan angka. Informasi-informasi ini merupakan informasi yang penting bagi pemangku kepentingan perusahaan dan konsep sustainability accounting dapat menyajikan jenis informasi ini dengan baik untuk selanjutnya informasi ini diungkapkan kepada pemangku kepentingan perusahaan. Peran dari pemangku kepentingan organisasi sangat menentukan kualitas dari implementasi konsep sustainability accounting pada sebuah organisasi. Riset dari Kaur & Lodhia (2018) menunjukkan bahwa pemangku kepentingan perusahaan sangat berperan dalam penerapan sustainability accounting utamanya pada proses pelaporan informasi sosial dan lingkungan, pengembangan rencana strategik dan indikator keberlanjutan, pengukuran kinerja keberlanjutan, dan penyiapan laporan keberlanjutan organisasi (Kurniawan & Wahyuni, 2019).

D. Standar dan Kerangka Kerja Akuntansi Berkelanjutan

Sejak organisasi yang mengawasi standar akuntansi internasional yaitu *International Financial Reporting Standards Foundation* (IFRS) mengumumkan pembentukan *International Sustainability Standards Board* (ISSB) pada November 2021, penyusun laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) sudah harus bersiap untuk standar pelaporan yang baru. ISSB telah diresmikan dalam rangkaian acara konferensi perubahan iklim. ISSB adalah Dewan Standar pengungkapan terkait keberlanjutan yang dibentuk oleh IFRS sebagai dasar global yang komprehensif yang berfokus pada kebutuhan investor dan pasar keuangan(Pratiwi, 2023).

LARISPA LEMBAGA RISET PUBLIK PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Beberapa standar dalam membuat laporan berkelanjutan, berikut di antaranya:

1. *Global Reporting Initiative* (GRI)
   Sejak 10 tahun lalu, GRI telah menjadi standar internasional untuk pembuatan laporan berkelanjutan di seluruh dunia. Awalnya, GRI dirilis pada tahun 1997 dengan tujuan melaporkan performa ekonomi, lingkungan, dan juga sosial bagi seluruh organisasi. Kemudian pada tahun 2018, GRI meluncurkan "GRI Standard" yang diakui secara global. Bukan hanya mengandung indikator untuk mengukur performa keberlanjutan, tapi juga menjadi panduan perusahaan dalam mengarahkan proses pelaporannya. Ini berlaku bagi perusahaan dari berbagai skala dan sektor beragam. Dengan menggunakan panduan dari GRI, perusahaan bisa memilih isu utama yang paling menjadi sorotan para pemangku kepentingan. Lebih jauh lagi, indikator yang digunakan pun mudah dipahami dan terlihat. Dengan demikian, sangat bisa dibandingkan dengan indikator lainnya.
2. International *Integrated Reporting Council* (IIRC)
   IIRC adalah koalisi global yang terdiri dari regulator, investor, perusahaan, LSM, akuntan, dan pembuat standar. Tujuan dari IIRC adalah mengubah sistem pelaporan perusahaan sehingga laporan terintegrasi ini menjadi norma global. Tujuan IIRC adalah membuat standar mengenai informasi non-finansial tambahan sehingga bisa memahami strategi perusahaan secara umum. Utamanya, yang berkaitan dengan kondisi finansial saat ini dan masa depan.
3. Sustainability *Accounting Standards Board* (SASB)
   SASB yang merupakan organisasi nirlaba independen ini punya misi menerapkan standar keberlanjutan. Tujuannya agar perusahaan publik bisa membuka informasi penting untuk para investor. Prosesnya melibatkan riset berdasarkan bukti serta partisipasi seimbang dari para pemangku kepentingan. SASB mengidentifikasi topik keberlanjutan dari 30 isu relevan yang dipecah dalam 5 dimensi.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN OPINI PUBLIK

4. ISO 26000 *Social Responsibility*

   ISO 26000:2010 lebih merupakan panduan, bukan persyaratan khusus sehingga bukan sebuah sertifikasi. Namun, panduan ini membantu menjelaskan apa itu tanggung jawab sosial. Perusahaan jadi lebih mudah menerapkan prinsip menjadi aksi yang efektif. ISO 26000:2010 ini mengacu pada berbagai jenis organisasi terlepas dari aktivitas, skala, dan lokasinya. Dengan demikian, ada penerapan tanggung jawab sosial yang tertata secara global.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN,SURVEY,KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

BAB 2 PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI BERKELANJUTAN

Dr. Temy Setiawan,S.E., M.Ak., M.Th., Ak., CA., CIBA., CPMA., CertDA., CSRS., Asean CPA.
Universitas Bunda Mulia

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

A. Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi adalah serangkaian prinsip pengambilan keputusan dan praktik bisnis yang ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa terlibat dalam pertukaran lingkungan berbahaya yang secara historis menyertai pertumbuhan (Breliastiti dkk., 2023). Idealnya, pembangunan berkelanjutan menciptakan sistem operasional yang mengkonsumsi modal alam (juga dikenal sebagai sumber daya alam) cukup lambat sehingga generasi mendatang juga dapat menggunakan sumber daya tersebut.

Praktik berkelanjutan dapat mengatasi masalah jejak ekologi kolektif manusia dalam beberapa cara. Mereka dapat fokus pada pengurangan penipisan lingkungan alam atau membahas masalah dari arah lain dengan menemukan cara untuk mengurangi limbah, membatasi emisi karbon, dan memanfaatkan energi matahari. Prinsip pemersatu di balik keberlanjutan ekonomi adalah menolak proses jangka pendek yang sia-sia dan merangkul kesejahteraan jangka panjang planet ini (Setiawan, Sudibyo & Purwanti., 2021).

Mengapa keberlanjutan ekonomi penting?

Keberlanjutan ekonomi sangat penting karena berbagai alasan, dengan pembenaran mulai dari lingkungan hidup yang berpikiran tinggi hingga kepentingan perusahaan (Setiawan & Purwanti, 2021).

1. Umur panjang ekonomi global : Ketergantungan seluruh dunia pada praktek-praktek yang tidak berkelanjutan memiliki tanggal akhir yang diperlukan karena sumber daya alam planet ini tidak terbatas. Mengembangkan proses baru dan berinvestasi dalam sumber daya yang berbeda sangat penting untuk melanjutkan aktivitas komersial jangka panjang.
2. Pelestarian kehidupan manusia: Perubahan iklim yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan telah menciptakan situasi yang mengerikan bagi bumi dan kemampuan manusia untuk menghuninya. Dengan mencoba membatasi konsumsi energi dan menyesuaikan pendekatan produksi pangan, manusia memiliki kesempatan untuk melestarikan planet ini untuk anak cucu.
3. Penemuan yang belum terealisasi : Lingkungan alam telah lama menjadi sumber penemuan dan inovasi. Oleh karena itu, degradasi lingkungan alam yang terus-menerus membahayakan kesempatan untuk menggali senyawa dan proses baru yang dapat berfungsi sebagai dasar produk baru atau manfaat ekonomi lainnya.

Contoh Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi dapat mengambil banyak bentuk tergantung pada bagaimana organisasi beradaptasi, termasuk:

1. Merancang sistem yang tidak boros : Berinovasi cara untuk mengurangi penggunaan lahan atau membuat rantai pasokan lebih efisien dengan menghemat sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa
2. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berdampak rendah: Menginvestasikan waktu dan uang dalam bisnis

LARISPA LEMBAGA RISET PUBLIK PENELITIAN SURVEI KONSULTAN PILKADA DAN OPINI PUBLIK

yang berkelanjutan untuk menciptakan dunia yang bebas limbah diperlukan untuk mengalihkan konsentrasi modal dan momentum ekonomi masa depan.

3. Beralih ke sumber energi terbarukan: Mengonversi operasi agar berjalan dengan energi yang dihasilkan oleh tenaga surya atau angin daripada bahan bakar fosil adalah salah satu cara organisasi dapat memprioritaskan masa depan.

Cara menerapkan keberlanjutan ekonomi menciptakan infrastruktur untuk keberlanjutan ekonomi merupakan proses komplek yang melibatkan kerja sama penuh antara sektor swasta dan publik. Namun, pada tingkat individu, investor ritel dapat mengarahkan uang mereka ke perusahaan yang nilai dan praktiknya selaras dengan nilai dan praktik mereka. Warga negara juga dapat mendorong pejabat terpilih mereka untuk membuat rencana ekonomi yang mencakup tujuan pembangunan berkelanjutan dan pembatasan emisi gas rumah kaca. Pada akhirnya, hanya melalui tindakan skala besar dan perombakan sistem keuangan yang membentuk ekonomi global, masyarakat dapat mencapai kelestarian lingkungan.

LARISDA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

B. Keberlanjutan Sosial

Keberlanjutan sosial dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia (Setiawan dkk., 2018). Keberlanjutan sosial mempunyai empat sasaran yaitu:

1. Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga.
2. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial. Halangan terhadap keberlajutan sosial harus dihilangkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkan dimungkinkannya

untuk mendapat akses pendidikan yang merata, pemerataan pemulihan lahan dan peningkatan peran wanita.

3. Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi.
4. Mendorong pertisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Beberapa persyaratan dibawah ini penting untuk keberlanjutan sosial yaitu: prioritas harus diberikan pada pengeluaran sosial dan program diarahkan untuk manfaat bersama, investasi pada perkembangan sumber daya misalnya meningkatkan status wanita, akses pendidikan dan kesehatan, kemajuan ekonomi harus berkelanjutan melalui investasi dan perubahan teknologi dan harus selaras dengan distribusi aset produksi yang adil dan efektif, kesenjangan antar regional dan desa, kota, perlu dihindari melalui keputusan lokal tentang prioritas dan alokasi sumber daya. (Sukma Arida, 2019)

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

C. Keberlanjutan Lingkungan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tumbuhnya industri yang begitu pesat pada saat ini juga menimbulkan pengaruh tersendiri baik itu yang menyangkut dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positifnya tentunya terjadinya peningkatan mutu dan kualitas hidup yang lebih baik. Akan tetapi dampak negatif dari adanya perkembangan teknologi ini seperti degradasi lingkungan akibat eksploitasi berlebihan tentunya harus lebih diwaspadai untuk tidak terjadi suatu kerusakan lebih parah dalam tatanan lingkungan yang ada baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Dalam perkembangannya, tatanan lingkungan hidup maupun lingkungan sosial hendaknya senantiasa diperhatikan agar tidak mendatangkan berbagai jenis bencana (Setiawan, Jonathan & Kurniawati, 2022). Untuk itu diperlukan tanggungjawab dari semua elemen masyarakat dalam menjaga tatanan lingkungan hidup dan lingkungan sosial

sehingga diharapkan akan tercipta suatu cara pandang yang lebih baik dalam memandang lingkungan itu sendiri. Salah satu kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang termasuk di dalamnya lingkungan sosial adalah menjaga agar tetap terjadi keberlanjutan. Dalam mewujudkan lingkungan berkelanjutan utamanya didasari oleh penekanan ekologi, dimana setiap komponen ekologi mulai dari yang terkecil tak boleh luput dari perhatian. Penekanan ekologis akan menjadi komponen penting bagi berkelanjutan lingkungan, bukan hanya karena potensinya mengurangi dampak kerusakan suatu lingkungan, tapi juga karena potensinya untuk mengenalkan konsep baru tentang hubungan manusia dengan alam. (Effendi, Salsabila, & Malik, 2018)

Lingkungan berkelanjutan memiliki arti yang cukup luas, yaitu kemampuan untuk melanjutkan sesuatu yang didefinisikan tanpa batasan waktu. Berkelanjutan dapat dimaksudkan dengan ketahanan, keseimbangan, keterkaitan. Lebih lanjut berkelanjutan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bertahan melanjutkan suatu perilaku yang didefinisikan tanpa batas waktu. World Commission on Environment and Development mendefinisikan berkelanjutan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Lingkungan berkelanjutan dapat diartikan segala sesuatu yang berada di sekeliling makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupannya dengan kondisi yang terus terjaga kelestariannya secara alami maupun dengan sentuhan tangan manusia tanpa batasan waktu. Lingkungan berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai bagaimana pemenuhan kebutuhan sumber daya yang ada untuk generasi masa kini hingga masa depan tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem yang menyediakannya. Secara lebih spesifik, lingkungan berkelanjutan disimpulkan sebagai suatu kondisi keseimbangan, ketahanan, dan keterkaitan yang memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya tanpa melebihi kapasitas ekosistem pendukungnya dan mampu

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY KONSULTAN PUBLIK ADA DAN SEKTOR PUBLIK

beregenerasi untuk terus mampu memenuhi kebutuhan hingga di masa depan.

Prinsip lingkungan berkelanjutan dalam menekankan kelestarian, diantaranya :

1. Melindungi sistem penunjang kehidupan
2. Melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik
3. Memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem, serta mengembangkan dan menerapkan ukuranukuran rehabilitasi untuk ekosistem yang sangat rusak
4. Mengembangkan dan menerapkan strategi yang preventif dan adaptif untuk menanggapi ancaman perubahan lingkungan global.

Yang menjadi aspek penting dalam keberlanjutan ekologis:

1. Untuk sumber daya terbarukan, tingkat panen tidak boleh melebihi tingkat regenerasi (hasil lestari)
2. Tingkat pembangkitan limbah dari proyek tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi lingkungan (pembuangan limbah berkelanjutan)
3. Untuk sumber daya tak terbarukan, penipisan sumber daya tak terbarukan harus memerlukan pengembangan pengganti terbarukan yang sebanding untuk sumber daya tersebut.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN OPINI PUBLIK

Ruang lingkup lingkungan berkelanjutan didasari oleh konsep ekologi. Dimana setiap komponen ekologi mulai dari yang terkecil tak boleh luput diperhatikan. Mewujudkan lingkungan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan secara total kualitas hidup, baik sekarang maupun untuk masa depan, dengan memperhatikan tidak hanya ekologis saja, namun juga berbagai hal lain berupa sosial dan ekonomi. Ketiga hal ini, ekologis, sosial dan ekonomi harus diintegrasikan dengan baik untuk mencapai lingkungan yang berkelanjutan. Lingkup lingkungan berkelanjutan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Lingkungan sosial dan ekonomi :
   a. Menghasilkan apa yang dibutuhkan untuk generasi masa depan untuk menjaga keberlanjutan

b. Merancang produk yang berperan dalam keberlanjutan ekonomi

2. Lingkungan hidup :
   a. Memelihara keanekaragaman hayati sumber daya alam
   b. Bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya berkelanjutan dengan penggunaan energi yang efisien
   c. Menjaga tingkat panen dengan tidak melebihi tingkat regenerasi
   d. Mengembangkan sumber daya tak terbarukan sebanding berkurangnya sumber daya tersebut
   e. Penerapan daur ulang atau penggunaan ulang material

D.Konsep *Triple Bottom Line* (TBL)

Konsep TBL menegaskan bahwa dalam menjalankan operasional perusahaan, selain mengejar laba (*profit)*, perusahaan juga harus dapat berkontribusi untuk masyarakat (*people*) dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan (*planet*).

Salah satu implementasi konsep TBL diwujudkan dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR).* Program CSR merupakan tanggungjawab sosial perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat positif untuk komunitas sekitar perusahaan maupun masyarakat secara luas. Selain itu, pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya pelaksanaannya yang dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Sofyanty & Yossie, 2017)

LARISA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN RISKADA DAN STUDI PUBLIK

Triple Bottom Line

Konsep *Triple Bottom Line* (TBL) merupakan konsep yang dikembangkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya yang berjudul "*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*" (Yanti, Fitri, Rasmini, & Ni, 2015). Elkington menyatakan bahwa selain mengejar laba (*profit*), perusahaan harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Hingga saat ini, konsep TBL juga dikemukakan oleh beberapae ahli. TBL merupakan intisari dari keberlanjutan dengan mengukur dampak dari kegiatan organisasi di dunia, termasuk profitabilitas dan pemegang saham, sosial, masyarakat, dan lingkungan. Sedangkan (Smith & Sharicz , 2011) menyatakan bahwa TBL merupakan :

"The result of the activities of an organization voluntary or governed by law, that demonstrate the ability of the organization to maintain viable its business operations (including financial viability as appropriate) whilst not negatively impacting any social or ecological systems."

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK

Sumber : Jonathansandling.com

TBL merupakan unsur penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. TBL dapat menjadi tolak ukur perusahaan, dengan tidak hanya memperhatikan sisi ekonomi, namun juga dampak yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap

sosial dan lingkungan. Ketiga aspek TBL memiliki hubungan dan keterkaitan yang kuat. menggambarkan dari aspek ekonomi, perusahaan harus fokus terhadap keuntungannya demi keberlangsungan hidup perusahaan, dari aspek sosial, perusahaan harus memiliki komitmen kepada masyarakat untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya, dan dari aspek lingkungan, semua kegiatan perusahaan terkait erat dengan lingkungan. Mengenai ketiga aspek TBL, *profit* merupakan pendapatan tambahan yang digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan, *people* merupakan masyarakat yang menjadi salah satu unsur pendukung yang menentukan keberlanjutan perusahaan, dan *planet* merupakan lingkungan yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan perusahaan. Dari pemaparan tersebut, dapat dinyatakan perusahaan harus dapat menyeimbangkan ekonomi agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan dari setiap aktivitasnya. Perusahaan dalam menjalankan ketiga aspek TBL tersebut, dapat melaksanakannya dalam program CSR. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya konsep TBL merupakan intisari dari prinsip CSR (Setiawan dan Purwanti, 2021)

Triple bottom line adalah konsep bisnis berkelanjutan yang mengukur nilai kesuksesan sebuah perusahaan menggunakan tiga kriteria, yaitu *People* (Sosial), *Planet* (Lingkungan), dan *Profit* (Ekonomi).

1. *People*

   Bagaimana perusahaan mempengaruhi dan membawa keuntungan bagi pekerja, buruh, dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan bisnisnya, dimana perusahaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan mendapatkan *profit* saja, tetapi perusahaan juga harus menaruh kepedulian terhadap orang-orang yang berperan penting pada bisnisnya. Jika menerapkan konsep ini juga akan menumbuhkan citra yang baik tentang perusahaan, baik di mata para pekerja atau masyarakat sebagai konsumen. Beberapa hal yang bisa diilakukan misalnya dengan memberikan upah yang adil, *humane-*

LARISPA LEMBAGA RISET PUBLIK PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN, PILKADA DAN KIRIK PUBLIK

working system, pemberdayaan dengan mengajari keterampilan, dan lain-lain.

2. *Planet*

   Bagaimana perusahaan berusaha menciptakan bisnis yang selaras dengan alam dan meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan. Dimana tujuannya yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari dampak buruk yang mungkin bisa merusak lingkungan, seperti banjir, kebakaran lahan, hingga climate change (perubahan iklim). Misalnya mengurangi penggunaan barang baku *import* yang dapat menyebabkan *carbon footprint*, atau mengganti kemasan berbahan plastik dengan kemasan berbahan kertas atau kaca, mengadakan pemilahan sampah di tempat produksi atau di toko, mengolah sampah organik menjadi kompos, dan lain-lain. Banyak sekali hal yang dapat dilakukan.

3. *Profit*

   Bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan secara finansial, yang tentunya sejalan dengan 2P sebelumnya (*people* dan *planet*). Di era sekarang ini, semua bisnis tidak bisa hanya memikirkan profit saja, karena banyak sekali dampak yang tidak terlihat yang nantinya akan kembali kepada kita.

Contoh Implementasi *Triple Bottom Line* Perusahaan di Indonesia (Setiawan dan Purwanti, 2017)

1. PT Pertamina

   PT Pertamina adalah salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang energi, petrokimia, dan sumber daya alam lainnya. Perusahaan ini memiliki visi "*towards a better life*", dengan tujuan program ini tidak hanya membangun relasi bisnis saja, tetapi meningkatkan pembangunan manusia secara nasional. Program CSR lainnya yang dilakukan PT Pertamina adalah membangun agrowisata bernama Camp Bell 2 Edupark di Desa Tawangsari. PT Pertamina memperhatikan kondisi lingkungan yang ada, sehingga

perusahaan ini mengusung konsep pengelolaan air terpadu (*clean water*), kebun buah naga (*green energy*), peternakan sapi terpadu (*green act)*, biogas (*clean energy*), dan *zero waste*. Dalam pengelolaannya, perusahaan ini membuat sebuah organisasi untuk mengelola agrowisata dan memberikan pembinaan bagi masyarakat Desa Tawangsari. Tenaga kerja yang digunakan adalah masyarakat sekitar kawasan wisata. Adanya agrowisata dapat membantu kesejahteraan untuk masyarakat dan perusahaan dalam memperluas relasi bisnis untuk pertumbuhan perusahaan. Program CSR tersebut memberikan citra dan reputasi yang baik karena berhasil menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

2. PT Unilever

PT Unilever bergerak dalam penyediaan barang kebutuhan sehari-hari masyarakat di Indonesia. YUI (Yayasan Unilever Indonesia), memiliki misi untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat, memberdayakan potensi masyarakat, menyatukan mitra-mitra, dan bergerak sebagai penghubung untuk pembentukan mitra. Dalam meningkatkan taraf hidup petani kecil, sudah mencakup keuntungan bagi perusahaan ini, karena petani kecil dapat memproduksi kedelai hitam dengan baik sebagai bahan baku untuk membuat kecap. YUI memperhatikan pengelolaan sampah di Indonesia yang belum terkelola dengan baik. PT Unilever, mengambil isu mengenai kebersihan dalam pengelolaan sampah. Program ini dilakukan di satu daerah kemudian dapat menjadi contoh di daerah lain. Perusahaan ini tidak bertanggung jawab terhadap sumber daya alam yang telah digunakan, melainkan perusahaan ini menaruh perhatian terhadap isu lingkungan yang belum tentu dianggap menjadi masalah bagi masyarakat lain. Perhatiannya kepada masyarakat, YUI menciptakan Program Sekolah Sehat dengan menanamkan perilaku hidup sehat bagi siswa sekolah dasar dan menengah. Program ini membentuk kader-kader muda yang peduli dengan

kesehatan. Pada tingkat sekolah dasar dikenal sebagai dokter kecil, sementara di tingkat menengah disebut dengan duta muda.

3. PT Antam Tbk

   PT Antam termasuk ke dalam perusahaan BUMN yang bergerak di bidang tambang. Perusahaan ini memiliki visi mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Dalam menjalankan program CSR nya perusahaan ini memiliki eksistensi, citra, dan kredibilitas yang baik sehingga perusahaan ini dapat beroperasi hingga saat ini. PT Antam berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar yang terdampak dengan cara melatih kemandirian masyarakat. Selain itu perusahaan ini berfokus pada kualitas kesehatan, pendidikan (pemberian beasiswa), dan sosial budaya (bantuan sosial, program kemitraan) yang dilakukan di dalam program pengembangan masyarakat. Dalam pelestarian lingkungan, PT Antam melakukan program seperti proyek reklamasi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (RPT).

LEMBAGA PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

BAB 3 LAPORAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Muhammad Rizal, M.Si.,Ak.,CMA.,CSRS.,CSRA
Universitas Negeri Medan

A. Konsep Laporan Keuangan Berkelanjutan

Laporan keuangan berkelanjutan (*Sustainability Report)* adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan tentang kinerja suatu perusahaan atau organisasi dalam hal keberlanjutan. Laporan ini memberikan gambaran tentang dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan bisnis suatu entitas.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN TERKADA DAN GERAKAN PUBLIK

Elkington (1997) menegaskan bahwa laporan keberlanjutan juga menyajikan informasi non keuangan seperti rincian faktor sosial dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Selain mengejar profit, perusahaan harus mewujudkan kesejahteraan masyarakat (people) serta harus berpartisipasi terhadap kelestarian lingkungannya (planet). Item ketiga ini, yang sering disebut sebagai Triple Bottom Line atau Konsep 3P, merupakan satu kesatuan yang kohesif yang saling mempengaruhi.

Menurut Global Reporting Initiative (GRI), pengukuran, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk keberhasilan organisasi dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan adalah bagian dari bidang pelaporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan merupakan penerapan pelaporan institusi transparan dalam hal dampak terhadap

ekonomi, lingkungan atau masyarakat.

Pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia memang masih bersifat sukarela, namun Pemerintah dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 telah mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pasal 66 ayat 2 butir c yang menyatakan "Laporan Tahunan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal 66 harus memuat sekurang-kurangnya antara lain : kegiatan dan tangung jawab sosial dan lingkungan. Bentuk dan isi laporan keuangan diantaranya adalah uraian mengenai aktifitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan (Peraturan Bapepam Nomor Kep-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2016 saat ini menjadi Otoritas Jasa Keuangan / OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meneribitkan Peraturan OJK (POJK) No.51 tahun 2017 tetang dukungan terhadap penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik. Dukungan OJK juga terlihat dari di terbitkannya POJK No 60/ POJK.04/2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (Gree bond) yang pada aturan tersebut perbankan di minta untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Dalam POJK tersebut setidaknya didasari atas prinsip yang didasarkan pada pengembangan produk, kapasitas internal perbankan, tata kelola organisasi, manajemen risiko tata kelola, dan standar prosedur operasional sesuai pelestarian masyarakat dan lingkungan. Pembiayaan berkelanjutan secara langsung berkontribusi pada stabilitas keuangan jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa laporan keuangan berkelanjutan penting:

1. Transparansi dan akuntabilitas: Laporan keuangan berkelanjutan membantu perusahaan atau organisasi untuk

menjadi lebih transparan dalam operasi bisnis mereka. Ini memberikan pemegang kepentingan, termasuk investor, pelanggan, karyawan, dan masyarakat umum, informasi yang jelas tentang kinerja keberlanjutan perusahaan. Dengan mengungkapkan dampak positif dan negatif dari kegiatan bisnis, perusahaan memperlihatkan akuntabilitasnya terhadap isu-isu sosial dan lingkungan.

2. Pengambilan keputusan yang lebih baik: Laporan keuangan berkelanjutan memberikan pemegang kepentingan dengan informasi yang relevan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Investor dapat menggunakan laporan ini untuk mengevaluasi kinerja jangka panjang suatu perusahaan dan mempertimbangkan risiko dan peluang yang terkait dengan isu-isu sosial dan lingkungan. Selain itu, pelanggan juga dapat memilih untuk mendukung perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan.
3. Identifikasi risiko dan peluang: Laporan keuangan berkelanjutan membantu perusahaan mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait dengan isu-isu keberlanjutan. Misalnya, dengan mengungkapkan emisi karbon atau dampak lingkungan lainnya, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko terkait perubahan regulasi, sumber daya yang terbatas, atau pergeseran preferensi konsumen. Di sisi lain, laporan ini juga dapat menyoroti peluang bisnis baru yang terkait dengan inovasi berkelanjutan atau permintaan yang berkembang untuk produk dan layanan yang ramah lingkungan.
4. Peningkatan kinerja keberlanjutan: Laporan keuangan berkelanjutan memberikan kerangka kerja untuk mengukur dan memantau kinerja keberlanjutan perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan menganalisis dan membandingkan data yang terungkap dalam laporan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka dalam hal sosial, lingkungan, dan ekonomi. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan dan memperbaiki kinerja mereka

LARISDA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTANSI KAJIAN DAN OPINI PUBLIK

seiring waktu.

5. Pemenuhan persyaratan peraturan dan standar: Banyak negara dan organisasi non-pemerintah telah memperkenalkan persyaratan pelaporan keberlanjutan. Laporan keuangan berkelanjutan memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hukum dan peraturan, serta standar yang ditetapkan oleh badan pengatur dan inisiatif keberlanjutan. Dengan mematuhi persyaratan ini, perusahaan dapat menghindari risiko

Prinsip pelaporan laporan keuangan berkelanjutan menurut GRI-2021 memiliki prinsip:

1. Akurasi
   Organisasi harus melaporkan informasi yang benar dan cukup terperinci agar dapat dilakukan penilaian dampak organisasi.
2. Keseimbangan
   Organisasi harus melaporkan informasi dengan cara netral dan menyediakan gambaran yang seimbang tentang dampak negatif dan positif organisasi.
3. Kejelasan
   Organisasi harus menyajikan informasi dengan cara yang dapat diakses dan dapat dipahami.
4. Keterbandingan
   Organisasi harus memilih, menyusun, dan melaporkan informasi secara konsisten agar mereka dapat melakukan analisis mengenai perubahan dalam dampak organisasi seiring waktu dan analisis dampak ini yang berkaitan dengan dampak organisasi lain.
5. Kelengkapan
   Organisasi harus menyediakan informasi yang memadai agar penilaian dampak organisasi dapat dilakukan selama periode pelaporan.
6. Konteks keberlanjutan
   Organisasi harus melaporkan informasi tentang dampak mereka dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN OPINI PUBLIK

berkelanjutan.

7. Ketepatan waktu
   Organisasi harus melaporkan informasi secara rutin dan menyediakan informasi tersebut secara tepat waktu bagi pengguna informasi untuk mengambil keputusan.
8. Keterverifikasian
   Organisasi harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, dan menganalisis informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga informasi tersebut dapat diteliti untuk menentukan kualitasnya.

Berikut ini adalah Manfaat dari Laporan Keberlanjutan

1. Pengungkapan kegiatan perusahaan yang memiliki dampak terhadap lingkungan dan sosial.
2. Meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan.
3. Meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan.
4. Memperlihatkan perusahaan memiliki keunggulan lebih karena menggunakan pendekatan keberlanjutan dalam kinerja perusahaannya.
5. Pembanding dan benchmarking kepada kompetitior.
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

B. Komponen Laporan Keuangan Berkelanjutan

Laporan keuangan berkelanjutan adalah laporan yang menggabungkan informasi keuangan dengan informasi non-keuangan terkait aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan dari suatu entitas bisnis. Laporan keuangan berkelanjutan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja keuangan dan dampak sosial serta lingkungan dari suatu perusahaan.

Format pelaporan

Dalam Standar GRI, istilah 'pelaporan keberlanjutan' berarti proses pelaporan, yang dimulai dengan organisasi menentukan topik material berdasarkan pada dampak yang paling signifikan dan berakhir dengan organisasi tersebut melaporkan informasi tentang dampak ini secara publik.

Organisasi dapat memublikasikan atau membuat informasi dapat diakses dalam berbagai format (contohnya, elektronik atau berbasis kertas) di satu atau beberapa lokasi (contohnya, laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri, halaman web, laporan tahunan). Istilah 'melaporkan' dan 'informasi yang dilaporkan' dalam Standar GRI berarti informasi yang dilaporkan di seluruh lokasi.

Indeks konten GRI menyediakan ikhtisar dari informasi yang dilaporkan organisasi dan menunjukkan lokasi tempat pengguna informasi dapat menemukannya. Indeks konten juga menunjukkan Standar GRI dan pengungkapan mana yang telah digunakan oleh organisasi.

Jika organisasi bermaksud untuk memublikasikan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri, organisasi tersebut tidak perlu mengulangi informasi yang telah dilaporkan secara publik di tempat lain, seperti di halaman web atau dalam laporan tahunannya. Dalam kasus tersebut, organisasi dapat melaporkan pengungkapan yang diwajibkan dengan menyediakan rujukan di indeks konten GRI tentang di mana informasi ini dapat ditemukan (contohnya, dengan menyediakan tautan ke halaman web atau mengutip halaman di laporan tahunan tempat informasi tersebut telah dipublikasikan).

Berikut adalah beberapa komponen penting yang biasanya ada dalam laporan keuangan berkelanjutan:

1. Identitas Perusahaan: Bagian ini mencakup informasi umum tentang perusahaan, termasuk nama, alamat, visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan yang terkait dengan keberlanjutan.

Tabel 3.1. Indeks konten GRI

Pernyataan penggunaan	[Nama organisasi] telah melaporkan sesuai dengan standar GRI untuk periode [tanggal awal dan akhir periode pelaporan]
GRI yang digunakan	GRI 1: Landasan 2021
Standar Sektor GRI yang berlaku	[Judul Standar Sektor GRI yang berlaku]

2. Pengungkapan umum: Bagian ini menjelaskan rincian organisasi, priode, frekwensi dan lainnya.
3. Topik Materi : Komponen ini mencakup informasi keuangan tradisional seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Hal ini memungkinkan pembaca untuk memahami kinerja keuangan perusahaan secara umum.
4. Tapok dalam standar sektor GRI yang berlaku yang ditentukan sebagai bagian materi, berisi opik dan penjelasan

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN,SURVEY,KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Tabel 3.2. Standar GRI

STANDAR GRI/SUMBER LAIN	PENGUNGKAPAN	LOKASI	YANG TIDAK DICANTUMKAN			NO. RUJUKAN STANDAR SEKTOR GRI
			PERSYARATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN	ALASAN	PENJELASAN	
Pengungkapan umum						
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	2-1 Rincian organisatoris		*Sel berwarna abu-abu menunjukkan sesuatu yang tidak berlaku. Hal ini hanya berkaitan dengan kolom 'Yang Tidak Dicantumkan' dan 'No. rujukan Standar Sektor GRI'.*			
	2-2 Entitas yang dicantumkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi					
	2-3 Periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan					
	2-4 Penyajian kembali informasi					
	2-5 Penjaminan eksternal					
	2-6 Kegiatan, rantai nilai dan hubungan bisnis lain					
	" "	" "	" "	" "	" "	
	2-30 Perjanjian perundingan kolektif					
Topik material						
GRI 3: Topik Material 2021	3-1 Proses untuk menentukan topik material					
	3-2 Daftar topik material					
[Topik material]						
GRI 3: Topik Material 2021	3-3 Manajemen topik material					
[Judul sumber]	[Judul pengungkapan]					
" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "
[Topik material]						
GRI 3: Topik Material 2021	3-3 Manajemen topik material					
[Judul sumber]	[Judul pengungkapan]					
" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "

Topik dalam Standar Sektor GRI yang berlaku yang ditentukan sebagai bukan material	
TOPIK	**PENJELASAN**
[Judul Standar Sektor GRI]	
[Topik]	[Penjelasan]
[Topik]	[Penjelasan]

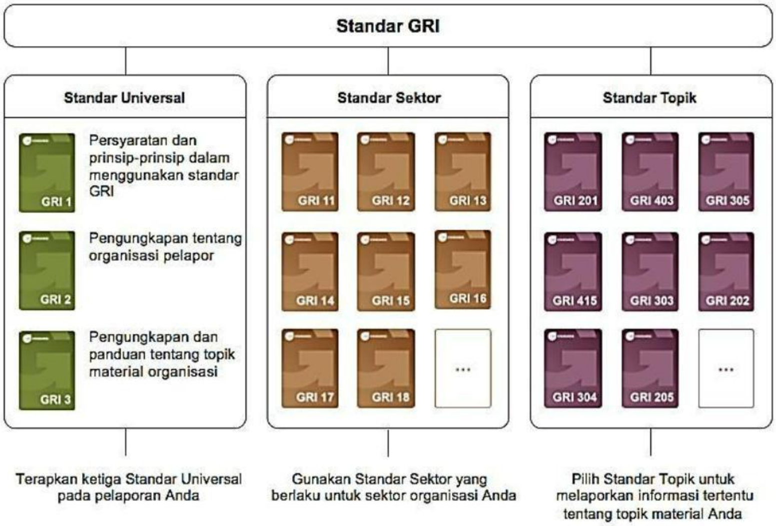

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

C. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Berkelanjutan

Proses penyusunan laporan keuangan berkelanjutan melibatkan beberapa langkah yang penting. Tujuan dari laporan keuangan berkelanjutan adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya tentang kinerja keuangan, dampak lingkungan, serta dampak sosial suatu organisasi. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan berkelanjutan:

1. Menentukan tujuan dan ruang lingkup: Langkah pertama adalah menetapkan tujuan laporan keuangan berkelanjutan dan ruang lingkup yang akan dicakup. Tujuan ini harus konsisten dengan kebijakan dan strategi keberlanjutan organisasi serta standar pelaporan yang berlaku.
2. Mengumpulkan data: Selanjutnya, perlu mengumpulkan data yang relevan untuk laporan keuangan berkelanjutan. Data ini bisa mencakup informasi keuangan, data lingkungan, dan data sosial seperti konsumsi energi, emisi gas rumah kaca, kegiatan keberlanjutan, kebijakan kerja, dan program sosial.
3. Mengukur dan menganalisis: Data yang terkumpul harus diukur dan dianalisis dengan menggunakan metode yang

relevan. Misalnya, dalam mengukur dampak lingkungan, dapat menggunakan pengukuran emisi karbon atau penggunaan sumber daya alam. Hasil analisis dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren, menghitung indikator kinerja keberlanjutan, dan mengevaluasi dampak organisasi.

4. Mengembangkan kerangka pelaporan: Setelah data terkumpul dan dianalisis, perlu mengembangkan kerangka pelaporan yang akan digunakan dalam laporan keuangan berkelanjutan. Kerangka pelaporan ini mencakup struktur dan format laporan, serta indikator kinerja keberlanjutan yang relevan.
5. Menyusun laporan: Setelah kerangka pelaporan ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun laporan keuangan berkelanjutan. Laporan ini harus mencakup informasi keuangan dan informasi tentang dampak lingkungan serta sosial organisasi. Laporan harus jelas, terpercaya, dan sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku.
6. Verifikasi dan validasi: Penting untuk memverifikasi dan memvalidasi laporan keuangan berkelanjutan oleh pihak yang independen. Verifikasi ini dapat dilakukan oleh auditor eksternal atau pihak ketiga yang memiliki keahlian di bidang keberlanjutan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan transparansi laporan.
7. Komunikasi dan publikasi: Langkah terakhir adalah mengkomunikasikan dan mempublikasikan laporan keuangan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) seperti investor, karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum. Laporan dapat disebarkan melalui berbagai saluran komunikasi seperti situs web perusahaan, rapat umum pemegang saham, atau publikasi keberlanjutan.

Proses penyusunan laporan keuangan berkelanjutan harus dilakukan secara terus-menerus dan diperbarui secara berkala untuk memantau kinerja dan dampak organisasi terhadap keberlanjutan.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KOMUNITAS PILKADA DAN SOSIAL PUBLIK

Panduan tentang cara mempersiapkan indeks konten GRI ketika menyusun laporan sesuai dengan Standar GRI. Panduan tersebut disertai contoh yang dapat digunakan organisasi untuk mempersiapkan indeks konten. Organisasi dapat menggunakan format berbeda untuk indeks konten selain format yang disediakan di sini, selama format tersebut mematuhi persyaratan untuk indeks konten yang ditentukan dalam Persyaratan 7 dalam Standar ini.

Daftar Isi

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan	2
Tentang Laporan Keberlanjutan	4
Identitas Perusahaan	8
Strategi & Komitmen Keberlanjutan BSI	18
Sambutan Direktur Utama	22
Tata Kelola Keberlanjutan	26

KINERJA EKONOMI 40

Sasaran dan Target Kinerja Ekonomi	41
Pencapaian Kinerja Ekonomi	42
Portofolio Keuangan Berkelanjutan	45
Layanan Berbasis Teknologi Informasi	47
Tanggung Jawab Produk dan Layanan Keuangan	48

KINERJA SOSIAL 52

Praktik Ketenagakerjaan	53
Rekrutmen Yang Adil dan Berkualitas	56
Tingkat Perputaran Pegawai	57
Sistem Remunerasi Pegawai	58
Pengembangan dan Pelatihan Pegawai	59
Mengelola Hubungan Industrial	61
Pengelolaan Keluh Kesah Pegawai	62
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	63
Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan	65

KINERJA LINGKUNGAN 76

Komitmen, Target dan Rencana Program	77
Membangun Budaya Ramah Lingkungan melalui Green Campaign	77
Energi & Emisi	79
Air	80
Limbah	82
Nature-Based Solutions	85
Pengaduan Lingkungan Hidup	85
Pernyataan Assuror Independen	86
Referensi POJK No. 51 POJK.03/2017 dan Indeks Isi Standar GRI	90
Lembar Umpan Balik	97

Gambar 3.1. Contoh Laporan Keberlanjutan BSI, 2022

D. Analisis dan Interpretasi Laporan Keuangan Berkelanjutan

Analisis dan interpretasi laporan keuangan berkelanjutan melibatkan evaluasi kinerja keuangan perusahaan dalam konteks aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan keuangan berkelanjutan memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan mengelola dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi kinerja keuangan jangka panjang perusahaan. Berikut ini adalah langkah-langkah umum yang dapat Anda ikuti untuk menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan berkelanjutan:

1. Memahami tujuan laporan keuangan berkelanjutan: Laporan keuangan berkelanjutan bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi perusahaan.
2. Tinjau data keuangan: Tinjau bagian laporan keuangan berkelanjutan yang terkait dengan kinerja keuangan perusahaan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Perhatikan perubahan dalam pendapatan, biaya, dan arus kas dari tahun ke tahun.
3. Analisis rasio keuangan: Gunakan rasio keuangan tradisional, seperti rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Bandingkan rasio-rasio ini dengan benchmark industri atau dengan kinerja historis perusahaan.
4. Tinjau indikator non-keuangan: Laporan keuangan berkelanjutan juga menyediakan indikator non-keuangan, seperti emisi karbon, penggunaan energi, keberlanjutan sumber daya, dan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan. Evaluasi indikator ini untuk melihat bagaimana perusahaan mengelola dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
5. Identifikasi tren dan pola: Identifikasi tren jangka panjang dalam kinerja keuangan dan indikator non-keuangan. Apakah perusahaan mengalami peningkatan atau

LARISDA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEI KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

penurunan dalam kinerja keuangan berkelanjutan? Apakah ada pola yang muncul dari tahun ke tahun?

6. Bandingkan dengan tujuan dan komitmen perusahaan: Tinjau tujuan dan komitmen perusahaan terkait dengan keberlanjutan. Apakah perusahaan mencapai target-target tersebut? Bagaimana pencapaian mereka mempengaruhi kinerja keuangan?
7. Identifikasi risiko dan peluang: Identifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan dan citra perusahaan. Juga, temukan peluang baru yang dapat muncul dari pengelolaan yang baik terhadap aspek keberlanjutan.
8. Interpretasikan temuan: Setelah menganalisis semua informasi, buat kesimpulan tentang kinerja keuangan berkelanjutan perusahaan. Apakah perusahaan berhasil mengelola dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat? Bagaimana kinerja ini mempengaruhi nilai jangka panjang perusahaan?

Penting untuk diingat bahwa analisis dan interpretasi laporan keuangan berkelanjutan melibatkan penggunaan perspektif ganda, yaitu mengintegrasikan aspek keuangan dan non-keuangan. Hal ini membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja perusahaan secara keseluruhan dalam konteks keberlanjutan.

Prinsip-Prinsip Untuk Menentukan Kualitas Laporan

Terdapat beberapa Prinsip-prinsip tersebut yaitu (GRI G4 Pedoman Pelaporan Keberlanjutan, 2021) :

1. Keseimbangan (balance) Laporan harus memuat aspek positif dan negatif perusahaan untuk memungkinkan penilaian kinerja keseluruhan yang wajar.
2. Komparabilitas (comparability) Organisasi/perusahaan harus memilah, memilih, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan sedemikian rupa agar pemangku kepentingan dapat menganalisa kinerja organisasi/perusahaan dari waktu ke waktu, dan dapat digunakan untuk mendukung analisis

yang berhubungan dengan organisasi lain.

3. Ketepatan (accuracy) Informasi yang disajikan harus akurat dan detail secara wajar bagi pemilaian kinerja organisasi oleh pemangku kepentingan.
4. Ketepatan waktu (timeliness) Organisasi/perusahaan harus melaporkan secara rutin agar informasi bagi pemangku kepentingan sebagai dasar membuat keputusan selalu tersedia.
5. Kejelasan (clarity) Organisasi/perusahaan harus menyajikan laporan yang mudah dipahami dan diakses bagi pemangku kepentingan.
6. Keandalan (reliability) Organisasi/perusahaan harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisa dan menyajikan informasi yang proses yang digunakan dalam mempersiapkan laporan sedemikian rupa sehingga dapat diuji kualitas dan materialitas informasinya.

Standar Umum

Pengungkapan standar umum berlaku untuk seluruh organisasi yang menyediakan laporan keberlanjutan, dapat dilihat pada lampiran 1. Di dalam pengungkapan standar umum dibagi menjadi tujuh bagian :

1. Strategi dan Analisis
   Pengungkapan standar ini memberikan gambaran strategis umum tentang keberlanjutan organisasi untuk memberikan konteks pada bagian laporan selanjutnya yang lebih detail dibadingkan bagian-bagian dalamnya. Strategi dan analisi dapat diambil dari informasi yang ada pada bagian lain dalam laporan, namun sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan wawasan tentang topik strategis bukan sekadar ringkasan konten laporan. Indikator yang termasuk didalam bagian ini adalah G4-1 dan G4-2.
2. Profil Organisasi
   Pengungkapan standar ini mengenai karakteristik organisasi untuk memberikan konteks bagi rincian-rincian dalam laporan dibandingkan dengan bagian-bagian yang ada didalam pedoman.Indikator yang termasuk didalam bagian

LARISPA LEMBAGA RISET PUBLIK PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

ini adalah G4-3 sampai dengan G4-16.

3. Aspek Material dan Boundary Teridentifikasi Pengungkapan standar ini memberikan gambaran keseluruhan tentang proses yang telah diikuti oleh organisasi untuk menentukan konten laporan, aspek material dan boundary teridentifikas, serta pernyataan ulang. Indikator yang termasuk didalam bagian ini adalah G4-17 sampai dengan G4-23.
4. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
   Pengungkapan standar tersebut merupakan gambaran keseluruhan tentang hubungan dengan pemangku kepentingan organisasi selama periode pelaporan. Pengungkapan standar ini tidak hanya terbatas pada keterlibatan yang dilakukan untuk tujuan penyususan laporan. Indikator yang termasuk didalam bagian ini adalah G4-24 sampai dengan G4-27.
5. Profil Laporan
   Pengungkapan standar ini menyajikan gambaran keseluruhan tentang informasi dasar mengenai laporan, indeks konten GRI, dan pendekatan untuk memperoleh assurance eksternal. Indikator yang termasuk didalam bagian ini adalah G4-28 sampai dengan G4-33.
6. Tata Kelola
   Pengungkapan standar ini memberikan gambaran keseluruhan tentang :
   a. Struktur tata kelola dan komposisinya
      Transparansi pada struktur dan komposisi tata kelola organisasi penting untuk memastikan akuntabilitas lembaga dan individu yang terkait. Pengungkapan Standar ini menggambarkan bagaimana badan tata kelola tertinggi ditetapkan dan dibentuk dalam mendukung tujuan organisasi, dan bagaimana tujuan tersebut dikaitkan dengan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Indikator yang termasuk didalam bagian ini adalah G4-34 sampai dengan G4-

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN & KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

b. Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai, dan strategi

   organisasi Badan tata kelola tertinggi menetapkan budaya organisasi, dan memiliki peran yang besar dalam menetapkan tujuan, nilai, dan strateginya. Indikator yang termasuk didalam bagian ini adalah G4-42.

c. Kompetensi dan evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi

   Pengungkapan Standar ini menjelaskan kesediaan dan kemampuan badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior untuk memahami, membahas, dan menanggapi secara efektif dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial; serta menunjukkan apakah sebuah proses diterapkan, dilaksanakan secara internal atau eksternal, guna memastikan keefektifan berkelanjutan dari badan tata kelola tertinggi. Indikator yang termasuk didalam bagian ini adalah G4-43 dan G4-44.

d. Peran badan tata kelola tertinggi dalam manajemen resiko

   Pengungkapan Standar ini menjelaskan apakah badan tata kelola tertinggi bertanggung jawab terhadap proses manajemen risiko dan keefektifannya secara keseluruhan. Pertimbangan-pertimbangan dari badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior terkait dengan elemen-elemen risiko untuk jangka yang lebih panjang dan cakupan yang lebih luas, serta pengintegrasiannya ke dalam perencanaan strategi, merupakan pengungkapan penting dalam tata kelola. Indikator yang termasuk didalam bagian ini adalah G4-45 sampai dengan G4- 47.

e. Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan

   Pengungkapan Standar ini menunjukkan sejauh mana keterlibatan badan tata kelola tertinggi dalam menyusun dan menyetujui pengungkapan keberlanjutan organisasi, dan pada tingkatan mana hal ini dapat diselaraskan dengan proses pelaporan finansial. Indikator yang termasuk didalam bagian ini adalah G4-48.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, STUDY KONSULTAN PERKANTORAN PUBLIK

f. Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengevaluasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial

   Pengungkapan Standar ini menunjukkan sejauh mana badan tata kelola tertinggi terlibat dalam memantau dan bereaksi terhadap kinerja organisasi untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial mengakibatkan risiko dan peluang besar di mana badan tata kelola tertinggi harus memastikan pemantauan dan, bila sesuai, penanganannya. Pengungkapan Standar ini juga membahas proses organisasi untuk menyampaikan permasalahan penting pada badan tata kelola tertinggi. Indikator yang termasuk didalam bagian ini adalah G4-49 dan G4-50.

g. Remunerasi dan intensif

   Pengungkapan Standar ini berfokus pada kebijakan remunerasi yang ditetapkan untuk memastikan bahwa pengaturan remunerasi dapat mendukung tujuan strategis organisasi, selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan, dan memungkinkan untuk dapat merekrut, memotivasi, serta mempertahankan anggota badan tata kelola tertinggi, eksekutif senior, dan karyawan. Indikator yang termasuk didalam bagian ini adalah G4-51 sampai dengan G4-

7. Etika dan Integritas

   Pengungkapan Standar ini merupakan gambaran keseluruhan tentang: Nilai, prinsip, standar, dan norma di organisasi Mekanisme internal dan eksternal untuk memperoleh masukan mengenai perilaku etis dan taat hukum Mekanisme internal dan eksternal untuk melaporkan permasalahan tentang perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum dan masalah integritas Indikator yang termasuk didalam bagian ini adalah G4-56 sampai dengan G4-58.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA, DAN SEKTOR PUBLIK

Pengungkapan Standar Khusus

Pedoman ini mengatur Pengungkapan Standar Khusus ke dalam tiga Kategori Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial. Kategori Sosial lebih lanjut dibagi ke dalam empat sub-Kategori, yaitu Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja, Hak Asasi Manusia, Masyarakat, dan Tanggung Jawab atas Produk.

1. Kategori Ekonomi

   Dimensi keberlanjutan berkaitan dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingannya dan terhadap sistem ekonomi tingkat lokal, nasional, dan global. Kategori ekonomi memberikan gambaran mengenai arus modal diantara pemangku kepentingan yang berbeda dan dampak ekonomi utama dari organisasi di seluruh lapisan masyarakat. Aspek Kinerja Ekonomi : G4- EC1 sampai dengan G4-EC4. Aspek Keberadaan di Pasar : G4-EC5 sampai dengan G4-EC8 Aspek Praktik Pengadaan : G4-EC9

2. Kategori Lingkungan

   Dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup termasuk tanah, udara, air, dan ekosistem.

   Kategori Lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input (energi dan air) dan output (emisi, efluen, dan limbah). Termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa, serta kepatuhan dan biaya lingkungan.

   Aspek Bahan : G4-EN1 dan G4-EN2 Aspek Energi : G4-EN3 sampai dengan G4-EN7 Aspek Air : G4-EN8 sampai dengan G4-EN10 Aspek Keanekaragaman Hayati : G4-EN11 sampai dengan G4-EN14 Aspek Emisi : G4-EN15 sampai dengan G4-EN21 Aspek Efluen dan Limbah : G4-EN22 sampai dengan G4-EN26 Aspek Produk dan Jasa : G4-EN27 dan G4-EN28 Aspek Kepatuhan : G4-EN29 Aspek Transportasi : G4-EN30 Aspek Lain-Lain : G4-EN31 Aspek Asesmen Pemasok atas Lingkungan : G4-EN32 dan G4-EN33 Aspek Mekasnies Pengaduan Masalah Lingkungan : G4-EN34

LARISPA LEMBAGA RISET PUBLIK PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

3. Kategori Sosial

   Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial dimana organisasi beroperasi. Kategori Sosial berisi sub-kategori :

   a. Praktek Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja Aspek Kepegawaian : G4-LA1 sampai dengan G4-LA3 Aspek Hubungan Industrial : G4-LA4 Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja : G4-LA5 sampai dengan G4-LA8 Aspek Pelatihan dan Pendidikan :G4-LA9 sampai dengan G4-LA11

      Aspek Keberagaman dan Kesetaraan Peluang : G4-LA12 Aspek Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki : G4-LA13 Aspek Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan : G4-LA14 dan G4-LA15 Aspek Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan : G4-LA16

   b. Hak Asasi Manusia Aspek Invetasi : G4-HR1 dan G4-HR2 Aspek Non-diskriminasi : G4-HR3

      Aspek Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama : G4-HR4 Aspek Pekerja Anak : G4-HR5 Aspek Pekerja Paksa atau Wajib Kerja : G4-HR6 Aspek Praktik Pengamanan : G4-HR7

      Aspek Hak Adat : G4-HR8 Aspek Asesmen : G4-HR9 Aspek Asesmen atas Hak Asasi Manusia : G4-HR10 dan G4-HR11 Aspek Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia : G4-HR12

   c. Masyarakat Aspek Masyarakat Lokal : G4-SO1 dan G4-SO2 Aspek Anti-korupsi : G4-SO3 sampai dengan G4-SO5 Aspek Kebijakan Publik : G4-SO6 Aspek Anti Persaingan : G4-SO7 Aspek Kepatuhan : G4-SO8 Aspek Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat : G4-SO9 dan G4-SO10 Aspek Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat : G4-SO11

   d. Tanggung Jawab Atas Produk Aspek Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan : G4-PR1 dan G4-PR2 Aspek Pelabelan Produk dan Jasa : G4-PR3 sampai dengan G4-

LARISPA LEMBAGA RISET PUBLIK PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

PR5 Aspek Komunikasi Pemasaran : G4-PR6 dan G4-PR7 Aspek Privasi Pelanggan : G4-PR8 Aspek Kepatuhan : G4-PR9

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN,SURVEY,KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

BAB 4 PENDAPATAN BERKELANJUTAN

Dwi Urip Wardoyo, SE., MMSI.
Telkom University

A. Konsep Pendapatan Berkelanjutan

Pentingnya pendapatan yang berkelanjutan terletak pada kemampuannya untuk memberikan stabilitas dan keamanan keuangan dalam jangka panjang. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa pendapatan yang berkelanjutan itu penting:

1. Stabilitas Keuangan: Pendapatan yang berkelanjutan memastikan aliran dana yang stabil dan konsisten, memungkinkan individu dan bisnis untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka, menutup pengeluaran, dan mempertahankan standar hidup tertentu. Ini mengurangi risiko kesulitan keuangan, seperti ketidakmampuan membayar tagihan atau pengeluaran tak terduga.
2. Perencanaan Masa Depan: Pendapatan yang berkelanjutan memberikan dasar untuk perencanaan masa depan dan pencapaian tujuan. Dengan aliran pendapatan yang andal, individu dapat menabung untuk keadaan darurat, berinvestasi untuk tujuan jangka panjang seperti pendidikan, kepemilikan rumah, pensiun, dan mengejar aspirasi pribadi dengan percaya diri.
3. Kemandirian dan Kebebasan: Pendapatan berkelanjutan memberdayakan individu untuk membuat pilihan dan memiliki kendali atas hidup mereka. Ini memungkinkan kemandirian dengan mengurangi ketergantungan pada

LARISPA LEMBAGA RISET PUBLIK PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SERVICE PUBLIK

orang lain atau dukungan eksternal. Dengan stabilitas keuangan, individu dapat mengejar hasrat mereka, membuat keputusan karier, dan menjalani hidup sesuai keinginan mereka.

4. Mitigasi Risiko: Pendapatan berkelanjutan bertindak sebagai penyangga terhadap risiko keuangan dan kejadian tak terduga. Ini memberikan jaring pengaman selama kemerosotan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau keadaan darurat kesehatan. Memiliki pendapatan yang stabil membantu individu menghadapi masa-masa sulit dan menghindari jatuh ke dalam utang atau ketidakstabilan keuangan.
5. Membangun Kekayaan Jangka Panjang: Pendapatan yang berkelanjutan sangat penting untuk penciptaan kekayaan dan membangun fondasi keuangan yang kuat. Ini memungkinkan individu untuk menabung, berinvestasi, dan mengakumulasi aset dari waktu ke waktu. Melalui pengelolaan keuangan yang bijak, pendapatan yang berkelanjutan dapat berkontribusi pada pertumbuhan kekayaan jangka panjang, meningkatkan posisi keuangan seseorang, dan menciptakan peluang bagi kemakmuran generasi.
6. Kualitas Hidup: Pendapatan berkelanjutan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dengan menyediakan sarana untuk mengakses barang, layanan, dan pengalaman penting. Ini mendukung kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan, serta pengeluaran bebas untuk rekreasi, perjalanan, hobi, dan pertumbuhan pribadi.

Singkatnya, pendapatan yang berkelanjutan penting karena membangun stabilitas keuangan, memungkinkan perencanaan masa depan, mengurangi stres, memupuk kemandirian, mengurangi risiko, mendukung penciptaan kekayaan jangka panjang, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini memainkan peran penting dalam

LARISPA LEMBAGA RISET PUBLIK PENELITIAN SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

mencapai kesejahteraan finansial dan menciptakan landasan yang kokoh bagi individu, keluarga, dan bisnis.

B. Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan Berkelanjutan

Hubungan antara Pendapatan dan Keberlanjutan Hubungan antara pendapatan dan keberlanjutan bersifat multifaset dan saling berhubungan. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari hubungan ini:

1. Keberlanjutan Ekonomi: Pendapatan adalah komponen fundamental dari keberlanjutan ekonomi. Tingkat pendapatan yang berkelanjutan diperlukan untuk mendukung individu, rumah tangga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dalam jangka panjang. Ini memastikan ketersediaan sumber daya untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, berinvestasi dalam infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Keberlanjutan Sosial: Pendapatan memainkan peran penting dalam mempromosikan keberlanjutan sosial. Tingkat pendapatan yang memadai berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan pengucilan sosial. Ini memungkinkan individu dan keluarga untuk mengakses layanan penting seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan perumahan, mendorong kesejahteraan sosial dan inklusivitas dalam masyarakat.
3. Kelestarian Lingkungan: Hubungan antara pendapatan dan kelestarian lingkungan sangat kompleks. Pola pendapatan yang tidak berkelanjutan, didorong oleh praktik produksi dan konsumsi yang intensif sumber daya, dapat berdampak negatif terhadap lingkungan melalui eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, polusi, dan emisi gas rumah kaca. Namun, pendapatan berkelanjutan dapat mendukung praktik ramah lingkungan dengan memberi insentif pada model bisnis berkelanjutan, teknologi ramah lingkungan, dan gaya hidup hemat sumber daya.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN SERVICE PUBLIK

4. Ketahanan dan Kemampuan Beradaptasi: Pendapatan yang berkelanjutan meningkatkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi individu dan masyarakat. Ini memberikan landasan yang stabil selama masa ketidakpastian ekonomi, memungkinkan individu dan rumah tangga untuk mengatasi guncangan keuangan, beradaptasi dengan keadaan yang berubah, dan berinvestasi dalam pengembangan keterampilan dan pembangunan kapasitas untuk peluang masa depan.
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB mengakui peran penting pendapatan dan kesetaraan pendapatan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Tujuan seperti memberantas kemiskinan, mempromosikan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan semuanya terkait erat dengan pendapatan dan keberlanjutannya.
6. Perspektif Jangka Panjang: Hubungan antara pendapatan dan keberlanjutan menekankan pentingnya mengambil perspektif jangka panjang. Pendapatan yang berkelanjutan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan keuangan yang mendesak tetapi juga kemampuan untuk mempertahankan tingkat pendapatan dalam jangka waktu yang lama. Ini melibatkan manajemen keuangan yang hati-hati, diversifikasi sumber pendapatan, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas pendapatan dan umur panjang.

Secara keseluruhan, hubungan antara pendapatan dan keberlanjutan adalah tentang menyeimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang bagi individu, komunitas, dan planet ini. Pendapatan berkelanjutan mendukung stabilitas ekonomi, inklusivitas sosial, tanggung jawab lingkungan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah aspek kunci untuk

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN, PELATIHAN SEKTOR PUBLIK

menciptakan masa depan yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan untuk semua.

1. **Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan Berkelanjutan**
   Pada subbab dijelaskan beberapa hal yang menjadi poin-pon tahapan dan faktor dalam melakukan pengukuran dan pengakuan pendapatan berkelanjutan.
   a. **Pengukuran Pendapatan.**
      Pendapatan keberlanjutan melibatkan pengukuran keuntungan finansial dari aktivitas atau bisnis yang memprioritaskan praktik berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Ada beberapa langkah kunci untuk mengukur pendapatan keberlanjutan dalam akuntansi:
      1) Identifikasi aktivitas berkelanjutan yang relevan.
      2) Tentukan total pendapatan.
      3) Hitung persentase pendapatan keberlanjutan.
      4) Laporkan dan pantau pendapatan keberlanjutan.

      Pendapatan keberlanjutan mungkin tidak selalu berkorelasi dengan laba, karena praktik berkelanjutan mungkin memiliki biaya terkait, namun dirasa perlu guna mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan dampak positifnya terhadap lingkungan.
   b. **Pengakuan Pendapatan Berkelanjutan**
      Pengakuan pendapatan yang berkelanjutan dalam akuntansi melibatkan akuntansi yang tepat untuk pendapatan dan biaya yang terkait dengan aktivitas berkelanjutan. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengenali pendapatan yang berkelanjutan dalam akuntansi:
      1) Identifikasi aktivitas bisnis yang berkelanjutan.
      2) Menentukan pendapatan tambahan.
      3) Alokasikan biaya.
      4) Laporkan pendapatan berkelanjutan.
      5) Pantau dan evaluasi.

LARISPA
LEMBAGA RISET SURVEI PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Kesimpulannya, pengakuan pendapatan yang berkelanjutan melibatkan identifikasi aktivitas bisnis yang berkelanjutan, mengalokasikan biaya dan aliran pendapatan, dan melaporkan pendapatan dalam item baris terpisah dalam laporan laba rugi.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Berkelanjutan

Beberapa faktor mempengaruhi pendapatan berkelanjutan dapat bervariasi tergantung pada keadaan individu, kondisi ekonomi, dan konteks khusus di mana pendapatan dihasilkan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat memengaruhi pendapatan berkelanjutan:

1) Pendidikan dan Keterampilan
2) Kondisi Pasar Tenaga Kerja
3) Pengalaman dan Keahlian Kerja
4) Faktor Ekonomi
5) Kewirausahaan dan Kepemilikan Bisnis
6) Faktor Demografi
7) Jejaring dan Koneksi Sosial
8) Kebijakan dan Peraturan Pemerintah
9) Permintaan dan Tren Pasar
10) Manajemen Keuangan Pribadi

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Faktor-faktor ini saling berhubungan dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Keadaan individu, pilihan pribadi, dan faktor eksternal bergabung untuk membentuk tingkat pendapatan yang berkelanjutan. Mengembangkan pemahaman holistik tentang faktor-faktor ini dapat membantu individu membuat keputusan berdasarkan informasi dan mengambil tindakan untuk meningkatkan prospek pendapatan mereka dalam jangka panjang.

d. Menentukan Besarnya Pendapatan Berkelanjutan

Ada beberapa pendekatan metode penghitungan pendapatan bervariasi tergantung pada konteks dan

tujuan penghitungan pendapatan. Berikut adalah ikhtisar dari beberapa metode perhitungan pendapatan umum:

1) Penghasilan Kotor: Penghasilan kotor mengacu pada total pendapatan yang diperoleh sebelum pengurangan atau pajak apa pun diterapkan. Ini mencakup semua sumber pendapatan, seperti upah, gaji, bonus, tip, pendapatan sewa, pendapatan investasi, dan pendapatan wirausaha.
2) Penghasilan Bersih: Penghasilan bersih adalah penghasilan yang tersisa setelah dikurangi semua potongan, pajak, dan pengeluaran yang berlaku dari penghasilan kotor. Ini mewakili pendapatan aktual yang tersedia untuk penggunaan pribadi atau bisnis. Pengurangan dapat mencakup pajak penghasilan, kontribusi jaminan sosial, premi asuransi kesehatan, kontribusi pensiun, dan biaya lain yang memenuhi syarat.
3) Pendapatan Sekali Pakai: Pendapatan sekali pakai mengacu pada pendapatan yang tersedia untuk individu atau rumah tangga setelah dikurangi pajak dan pengeluaran penting, seperti perumahan, utilitas, makanan, dan transportasi. Ini mewakili jumlah pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran diskresioner atau tabungan.
4) Pendapatan Operasional: Pendapatan operasional umumnya digunakan dalam konteks bisnis. Ini dihitung dengan mengurangkan biaya operasional, termasuk harga pokok penjualan, gaji, sewa, utilitas, dan biaya operasional lainnya, dari pendapatan kotor yang dihasilkan oleh bisnis. Pendapatan operasional mengukur profitabilitas operasi inti bisnis sebelum mempertimbangkan biaya dan pendapatan non-operasional.
5) Laba Bersih: Laba bersih, juga dikenal sebagai laba bersih atau pendapatan bersih, mewakili pendapatan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya, termasuk

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN STATISTIK PUBLIK

biaya operasional, pajak, bunga, dan biaya non-operasional, dari total pendapatan atau pendapatan kotor. Laba bersih merupakan indikator penting profitabilitas bisnis dan kinerja keuangan.

6) Arus Kas: Arus kas mengacu pada jumlah uang tunai yang dihasilkan atau dikonsumsi oleh individu, bisnis, atau investasi selama periode tertentu. Ini memperhitungkan arus kas masuk dan keluar, termasuk pendapatan, pengeluaran, pembayaran pinjaman, investasi, dan aktivitas keuangan lainnya. Analisis arus kas sangat penting untuk menilai likuiditas dan stabilitas keuangan.
7) Pendapatan Rata-Rata: Pendapatan rata-rata dihitung dengan membagi total pendapatan yang diperoleh sekelompok individu atau bisnis dengan jumlah individu atau bisnis dalam kelompok tersebut. Ini memberikan angka rata-rata yang mewakili tingkat pendapatan tipikal dalam kelompok.

C. Laporan dan Pengungkapan Pendapatan Berkelanjutan

Pelaporan dan pengungkapan pendapatan berkelanjutan melibatkan penyediaan informasi yang transparan dan komprehensif tentang kinerja keuangan dan dampak kegiatan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek utama yang perlu dipertimbangkan saat melaporkan dan mengungkapkan pendapatan berkelanjutan:

1. Identifikasi metrik yang relevan: Tentukan indikator kinerja utama (KPI) dan metrik yang paling relevan untuk mengukur dampak aktivitas berkelanjutan terhadap pendapatan. Ini mungkin termasuk pendapatan dari produk atau layanan yang berkelanjutan, penghematan biaya dari langkah-langkah efisiensi energi, atau pengurangan emisi gas rumah kaca.
2. Pelaporan terpisah: Untuk memberikan kejelasan dan transparansi, pertimbangkan untuk melaporkan pendapatan

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

berkelanjutan secara terpisah dari laporan keuangan tradisional. Hal ini dapat dilakukan melalui bagian khusus dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan, yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk dengan mudah mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja keuangan dari kegiatan berkelanjutan.

3. Sediakan konteks: Saat mengungkapkan pendapatan berkelanjutan, sangat penting untuk menyediakan konteks dan menjelaskan metodologi yang digunakan untuk menghitung dan mengukur dampak. Hal ini dapat mencakup penjelasan asumsi yang dibuat, periode yang dicakup oleh laporan, dan standar atau kerangka kerja eksternal yang digunakan untuk pelaporan.
4. Informasi kuantitatif dan kualitatif: Selain metrik keuangan, ada baiknya memberikan informasi kualitatif yang menyoroti dampak sosial dan lingkungan dari pendapatan yang berkelanjutan. Ini dapat mencakup contoh hasil positif, seperti pengurangan pemborosan, peningkatan keterlibatan karyawan, atau peningkatan reputasi merek.
5. Jaminan eksternal: Pertimbangkan untuk mendapatkan jaminan eksternal untuk pendapatan berkelanjutan yang dilaporkan. Verifikasi independen oleh auditor pihak ketiga atau pakar keberlanjutan dapat meningkatkan kredibilitas dan menunjukkan komitmen terhadap akurasi dan transparansi.
6. Kerangka pengungkapan: Gunakan kerangka kerja atau pedoman yang diakui, seperti Global Reporting Initiative (GRI) atau Sustainability Accounting Standards Board (SASB), untuk memastikan pelaporan pendapatan berkelanjutan yang komprehensif dan terstandarisasi. Kerangka kerja ini memberikan indikator dan pengungkapan khusus yang sejalan dengan praktik terbaik keberlanjutan.
7. Keterlibatan pemangku kepentingan: Terlibat dengan pemangku kepentingan utama seperti investor, pelanggan, karyawan, dan masyarakat untuk memahami kebutuhan informasi mereka dan memasukkan umpan balik mereka ke

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY KONSULTAN PIKAR DAN SEKOLAH PUBLIK

dalam proses pelaporan. Hal ini dapat membantu menyesuaikan pelaporan dengan kepentingan pemangku kepentingan tertentu dan meningkatkan relevansi dan kegunaan pendapatan berkelanjutan yang diungkapkan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, organisasi dapat secara efektif melaporkan dan mengungkapkan pendapatan berkelanjutan, memberikan pemahaman yang jelas kepada pemangku kepentingan tentang kinerja keuangan dan dampak kegiatan berkelanjutan.

D. Pengaruh Pendapatan Berkelanjutan terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan berkelanjutan mengacu pada pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis yang mempromosikan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, seperti lini produk ramah lingkungan, program pengurangan limbah, atau tindakan efisiensi energi. Pengaruh pendapatan berkelanjutan terhadap kinerja keuangan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, antara lain industri, model bisnis, dan target pasar. Namun, secara umum, ada potensi dampak positif dari pendapatan berkelanjutan terhadap kinerja keuangan. Berikut beberapa contohnya:

1. Penghematan biaya.
2. Peningkatan permintaan.
3. Manfaat jangka panjang.
4. Akses ke modal.

Selain itu, perusahaan yang melaporkan pendapatan berkelanjutan secara transparan dan mengungkapkan metrik lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) mereka dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan, yang berpotensi meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan akses ke modal.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN, PELAKSANA, PANDUAN PUBLIK

Kesimpulannya bahwa pengaruh pendapatan berkelanjutan terhadap kinerja keuangan bisa berdampak positif, terutama dalam hal penghematan biaya, peningkatan permintaan, manfaat jangka panjang, dan akses ke modal. Dengan mengedepankan metrik keberlanjutan dan ESG serta melaporkan pendapatan berkelanjutan secara transparan, perusahaan dapat memposisikan diri untuk peningkatan kinerja keuangan dalam jangka panjang.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN,SURVEY,KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

BAB 5 BIAYA KEBERKELANJUTAN

Dr. Agustine Dwianika SE., M.Ak., CMA., CIBA
Universitas Pembangunan Jaya

A. Konsep Biaya Berkelanjutan

Biaya keberlanjutan atau yang paling seringkali dikenal dengan biaya lingkungan secara konsep merupakan biaya yang mengacu kepada biaya yang terkait dengan pencapaian keberlanjutan suatu aktivitas atau proses perusahaan. Dengan biaya lingkungan yang dikeuarkan oleh perusahaan dengan yang berhubungna dengan kerusakan dari lingkungan yang disebabkan oleh system operasional yang ditimbulkan oleh perusahaan dan perlindungan yang dilakukan.

Biaya lingkungan merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan atau dikorbankan oleh perusahaan untuk mengelola dampak lingkungan sebagai akibat dari operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, biaya biaya lingkungan memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan dari proses bisnis dengan biaya lingkungan yang keluarkan dalap diagnggap sebagai investasi bagi perusahaan. Alokasi biaya lingkungan yang dikeluarkan harus tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan.

Kondisi biaya keberlanjutan dari konteks lingkungan seperti biaya pengelolahan limbah, biaya penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, pengurangan emisi, dan lain sebagainya. Sedangkan kondisi biaya berkelanjutan dari konteks

social seperti biaya keselamatan pekerja, kontribusi terhadap komunitas lokal, dan kepatuhan regulasi terhadap tenaga kerja.

B. Pengukuran dan Pengakuan Biaya Berkelanjutan

Biaya-biaya yang terdapat dalam akuntansi biaya berkelanjutan dapat diukur dan diakui sebagai berikut:

1. Biaya pemeliharaan biaya penggantian akibat dampak limbah dan gas buangan (*Waste and emission treatment*)

   Biaya pemeliharaan atau biaya penggantian akibat dampak limbah dan gas buangan adalah biaya yang dikeluakan oleh perusahaan untuk melakukan pemeliharaan, memperbaiki, serta menggantu kerusakan dari lingkungan yang diakibatkan oleh limbah perusahaan.
2. Biaya pencegahan pengelolaan lingkungan (*Precention and environmental management*)

   Biaya pencegahan atau pengelolaan lingkungan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengelola limbah dan mencegah atau menghindari terjadinya kerusakan lingkungan.
3. Biaya *ppembelian* bahan bukan hasil produksi (*material purchase value of non production*)

   Biaya pembelian bahan bukan hasil produski merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka membeli bahan yang bukan asil untuk melakukan pencegahan dan pengurangan dampak dari limbah bahan baku produksi.
4. Biaya *mengelolaan* untuk produk (*Proccesing cost of non product output*)

   Biaya pengelolaan untuk produk merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengelola bahan yang bukan hasil produksi.
5. Penghematan biaya lingkungan (*Enviromental revenue*)

   Penghematan biaya lingkungan adalah penghematan yang dilakukan untuk biaya atau penambahan penghasilan perusahaan sebagai akibat dari pengelolaan lingkungan.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

6. *Potensially hidden cost*

   Potensially hidden cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan produksi suatu produk sebelum proses produksi (biaya desain produk), biaya selama proses produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead) dan *backed environment cost* (lisensi mutu produk).

Biaya lingkungan mencakup pengeluaran yang terkait dengan pengurangan dampak lingkungan dari proses produksi (*internal*) dan pengeluaran yang terkait dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang dihasilkan. Meskipun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan perbaikan kerusakan bisa cukup besar, tetapi hal ini memiliki manfaat jangka panjang. Banyak juga penelitian yang berpendapat bahwa dampak terhadap lingkungan seperti polusi, merupakan ketidak efisienan yang pada akhirnya dapat menurunkan produktifitas dan dengan adanya pengurangan polusi produktivitas perusahaan dapat meningkat.

Secara sprsifik, dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), tidak ada dasar yang mengatur akan pengungkapan biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Namun, delam PSAK 33 terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban bagi perusahaan sector pertambangan dan pemiik Hak Pengusaha Hutan untuk melaporkan item-item lingkungan dalam laporan keuangan. Pengungkapan aktivitas social perusahaan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Di Indonesia pengungkapan social termasuk dalam kategori pengungkapan sukarela.

Oleh karena itu, setiap perusahaan yang telah melakukan kegiatan tanggung jawab social memiliki kebebasan untuk mengungkapkan biaya-biaya lingkungan secara sukarela atau tidak.

LARISA
LEMBAGA RISET PUBLIK

C. Laporan dan Pengungkapan Biaya Berkelanjutan

Biaya keberlanjutan atau biaya lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam keberlangsungan perusahaan, karena saat ini para investor mulai mempertimbangkan keberlangsungan hidup perusahaan serta tanggung jawabnya terhadap *stakeholder* dengan salah satunya adalah melaksanakan operasi yang berkelanjutan (*sustainable*). Hal tersebut sangat penting bagi pembuat kebijakan, sehingga pelaporan dan pengungkapan biaya berkelanjutan menjadi bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. Adapun poin dalam laporan dan pengungkapan biaya berkelanjutan diantaranya:

1. Manajemen operasional : pentingnya biaya keberlanjutan terkait dengan keberlangsungan operasionel perusahaan dalam jangka panjang. Investasi dalam biaya berkelanjutan seperrti biaya perawatan, perbaikan peralatan, pelatihan karyawan dan peningkatan infrastruktur menjadi kunci untuk menjaga operasional perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan.
   Contoh : penggunaan teknologi efisiensi energy dapat mengurangi niaya listrik secara signifikan.
2. Penghematan jangka panjang : biaya berkelanjutan membutuhkan investasi awal yang signifikan, namun hal ini dapat menghasilkan penghematan biaya jangka panjang. Contohnya adalah investasi dalam teknologi efisieni energy yang dapat mengurangi biaya listrik secara berkelanjutan. Selain itu pengelolaan limbah yang efektif juga dapat mengurangi biaya pemrosesan dan pemulihan di masa depan, sehingga biaya berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga menghasilakan penghematan jangka panjang bagi perusahaan.
3. Efisiensi sumber daya : pentingnya biaya berkelanjutan juga terkait dengan peningkatan efisiensi sumber daya. Dengan mengalokasikan biaya untuk teknologi yang lebih efisien dna menerapkan praktik-praktik bisnis yang ramah lingkungan, perusahaan dapa mengurangi konsumsi energy, air dan

LARISPA LEMBAGA RISET PUBLIK PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN, PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

bahan baku serta mengoptimalkan proses produksi. Ini berkontribusi pada pengurangan biaya operasional juga untuk jangka panjang dan mengurangi dampak negative terhadap lingkungan.

Contoh : dengan menggunakan bahan baku yang lebih efisien dan mengurangi limbah produksi, perusahaan dapat menghemat biaya produksi dan mengurangi biaya pengeluaran untuk melakukan memproses limbah.

Secara keseluruhan, pentingnya biaya berkelanjutan terletak pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan operasionalnya yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mematuhi regulasi, meningkatkan reputasi perusahaan dan menghasilkan biaya dalam jangka panjang. Hal ini mencerminkan tanggung jwab social dan lingkungan perusahaan serta memberikan manfaat jangka panjang pula bagi perusahaan itu sendiri, lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan secara keseluruhan.

Dalam usahanya untuk mencegah kerusakan lingkungan, tentunya perusahaan membutuhkan pengeluaran finansial. Untuk mengurangi kemungkinan atas terjadinya kegagalan lingkungan, perusahaan perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya pada kegiatan pencegahan dan melakukan pendeteksian dini manajemen lingkungan. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat memastikan bahwa system tersebut telah berfungsi dengan baik serta berkelanjutan Jadi jika system ini diinplementasikan dengan baik secara efektif, perusahaan akan mendapatkan penghasilan dan manfaat yang lebih besar.

Sehingga dapat dikatakan bahwa menurut prinsip akuntansi lingkungan, perusahaan dapat mengharapkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan system manajemen lingkungan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam upaya mempengaruhi laba bersih melalui biaya operasional, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Salah satunya adalah dengan mengurangi biaya produksi. Untuk mencapai hal ini, perusahaan dapat

meningkatkan efisiensi produksi, memanfaatkan teknologi yang lebih efisien, dan melakukan negosiasi yang lebih baik dengan pemasok untuk mendapatkan harga bahan baku yang lebih kompetitif.

Selain itu, pengendalian biaya tenaga kerja dan biaya overhead juga dapat berperan dalam meningkatkan laba bersih. Dengan mengelola sumber daya manusia secara efektif dan memanfaatkan teknologi yang sesuai, perusahaan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan tenaga kerja dan biaya overhead yang tidak perlu. Dalam rangka mencapai peningkatan laba bersih, perusahaan perlu memperhatikan pengurangan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Penting bagi perusahaan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara pengurangan biaya operasional dan menjaga kualitas agar tetap memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.

Secara keseluruhan, mengurangi biaya produksi, mengendalikan biaya tenaga kerja, dan mengelola biaya *overhead* secara efektif dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan laba bersih perusahaan. Langkah-langkah ini merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

LARISA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Perum Jasa Tirta II Jatiluhur Purwakarta, ditemukan bahwa biaya operasional memiliki pengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Selama periode 2012 hingga 2019, terlihat tren peningkatan jumlah biaya operasional Perum Jasa Tirta II. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya administrasi dan umum yang dikeluarkan setiap tahun. Selain itu, biaya promosi dan pemasaran juga mengalami penurunan dalam beberapa periode, yang berdampak pada penurunan penjualan dan laba bersih perusahaan.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya operasional mempengaruhi laba bersih pada Perum Jasa Tirta II Jatiluhur Purwakarta selama periode 2012-2019. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan biaya operasional

yang efektif dalam mencapai hasil keuangan yang menguntungkan bagi perusahaan.

D. Pengaruh Biaya Keberlanjutan terhadap Kinerja Keuangan

Adanya regulasi yang ketat dan sanksi serta kepentingan yang beragam dari pemangku kepentingan terhadpa suatu perusahaan membuat kinerja lingkungan menjadi penting dan tidak bisa diabaikan. Hal ini menyebabkan para investor saat ini tidak hanya mempertimbangkan profitabilitas semata, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana perusahaan tersebut berkomitmen terhadap praktik yang ramah ingkungan. Prinsip dari *stakeholder* tersebut mengatakan bahwa perusahaan perlu menciptakan nilai bagi semua pohak yang memiliki kepentingan dalam perushaan tersebut.

Perusahaan mengeluarkan biaya lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhapa para pemangku kepentingan, terutama kepada masyarakat. Keberadaan perusahaan memiliki dampak yang dirasakan oleh masyarakat sejak kali pertama perusahaan tersebut berdiri. Dampak tersebut dapat berupa negative atau positif tergantung pada bagaimana perusahaan akan menjalankan tanggung jawabnya terhadp lingkungan.

Sebagai contoh jika PT X melaksanakan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dengan baik, PT X akan memiliki reputasi yang positif dan mendapatkan pengakuan dari kementrian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) melalui pemberian PROPER kepada setiap unitnya dalam setiap periode. Hal ini telah membangun citra perusahaan PT X yang baik di mata masyarakat.

Melalui peringkat PROPER, pemangku kepentingan dapat dengan mudah menilai kinerja lingkungan perusahaan. Semakin tinggi peringkat yang diperoleh, seperti warna biru, hijau, dan emas, semakin besar kepercayaan yang diberikan oleh pemangku kepentingan terhadap operasional perusahaan, termasuk investor sebagai pemasok modal.

Konsep ini sejalan dengan teori stakeholder yang menjelaskan bahwa ketika perusahaan melakukan program yang memberikan dampak positif bagi stakeholder, termasuk dalam aktivitas manajemen lingkungan, akan mendapatkan respon positif berupa kepercayaan yang tinggi dari pemangku kepentingan. Respons yang baik ini berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang dalam hal pendapatan perusahaan.

Dengan demikian, keberhasilan perusahaan dalam memperoleh respon positif dari pemangku kepentingan terhadap program-program lingkungan yang dilakukan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa mengelola kinerja lingkungan dengan baik dapat memberikan keuntungan jangka panjang dalam hal kepercayaan, reputasi, dan pendapatan perusahaan.

Contoh pengungkapan biaya-biaya lingkungan dalam laporan keuangan :

Perusahaan mengakui tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan telah mengalokasikan biaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasional perusahaan dengan melakukan investasi sebagai berikut :

No.	Keterangan	Nominal
1.	Biaya pemeliharaan dan pengoperasian pengelola limbah	Rp 50.000.000
2.	Biaya program penghematan energi	Rp 20.000.000
3.	Biaya pengadaan teknologi ramah lingkungan	Rp 30.000.000
4.	Biaya pelatihan dan kesadaran lingkungan	Rp 10.000.000
5.	Biaya pembersihan dan pemulihan lingkungan	Rp 40.000.000

Total biaya yang dikeluarkan untuk lingkungan pada tahun berjalan adalah Rp 150.000.000.

Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya lingkungan melalui investasi pada inisiatid pencegahan dan pengurangan dari dampak lingkungan.

Perusahaan yang terus meningkatkan kinerja lingkungan menunjukkan komitmen mereka dalam mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan dan berpotensi merugikan. Upaya ini sejalan dengan konsep teori stakeholder yang menekankan bahwa perusahaan harus memberikan manfaat dan meminimalkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hapsari, Dkk. 2021. Mengungkapkan bahwa alokasi biaya lingkungan dalam upaya mengelola efisiensi lingkungan mampu meningkatkan kinerja lingkungan. Dengan mengalokasikan sumber daya untuk implementasi praktik-praktik yang berkelanjutan dan teknologi yang ramah lingkungan, perusahaan dapat mencapai peningkatan kinerja lingkungan yang diinginkan.

Penelitian ini menggambarkan pentingnya pengelolaan biaya lingkungan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai kinerja lingkungan yang lebih baik. Melalui alokasi yang tepat dan investasi yang cerdas dalam praktik-praktik lingkungan, perusahaan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan melakukan perbaikan dalam kinerja lingkungan, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan dapat meningkatkan penjualan. Hal ini juga yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja keuanngan perusahaan secara keseluruhan.

Selain dari perspektif internal perusahaan. Peraturan yang ditetapkan oleh Negara tujuan ekspor mewajibkan adanya proses produksi yang ramah lingkungan. Hal ini membuat perusahaan harus mematuhi peraturan tersebut agar produk yang mereka produksi dapat diterima oleh pasar yang dituju .

Di industri tertentu, adanya regulasi lingkungaan yang ketat dapat menjadi penghalang bagi pesaing baru yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, perusahaan yang telah

mengutamakan lingkungan memiliki keunggulan kompetitif karena mereka telah beradaptasi ddengan tuntutan lingkungan dan mampu memenuhi kebutuhan pasar yang semakin peduli yterhadap lingkungan.

Melalui peringkat PROPER, pemangku kepentingan dapat dengan mudah menilai kinerja lingkungan perusahaan. Semakin tinggi peringkat yang diperoleh, seperti warna biru, hijau, dan emas, semakin besar kepercayaan yang diberikan oleh pemangku kepentingan terhadap operasional perusahaan, termasuk investor sebagai pemasok modal.

Konsep ini sejalan dengan teori stakeholder yang menjelaskan bahwa ktika perusahaan melakukan program yang memberrikan dampak positif bagi stakeholder, termasuk dalam aktivitas manajemen lingkuggan, akan mendapatkan respon positif berupa kepercayaan yang tinggi dari pemangku kepentingan. Respons yang baik ini berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang dalam hal pendapatan perusahaan.

Dengan demikian, keberhasilan perusahaan dalam memperoleh respon positif dari pemangku kepentingan terhaap program- program lingkungan yang dilakukan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa mengelola kinerja lingkungan dengan baik dapat memberikan keuntungan jangka panjang dalam hal kpercayaan, reputasi, dan pendapatan perusahaan.

LARISPA
LEMBAGA RISET SPEKULATIF
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

BAB 6 AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIA BERKELANJUTAN

Victoria Ari Palma Akadiati
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras

A. Konsep Akuntansi Sumber Daya Manusia Berkelanjutan

Akuntansi Sumber Daya Manusia

Akuntansi sumber daya manusia atau human resource accounting (HRA) merupakan cabang baru dari pembahasan akuntansi. Pembahasan didasarkan dari sebuah konsep tradisonal yang menjelaskan bahwa semua pengeluaran pembentukan modal manusia ditetapkan sebagai biaya terhadap pendapatan pada periode tertentu. Konsep tradisional tersebut berubah dengan pengakuan biaya yang dikeluarkan untuk asset apapun termasuk sumber daya manusia harus dikapitalisasikan dalam menghasilkan manfaat yang dapat diukur baik biaya yang digunakan dalam melakukan rekrutmen, memilih, mempekerjakan, melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang kemudian menentukan nilai ekonomi mereka bagi sebuah organisasi maupun perusahaan.

Arti dan Definisi Akuntansi Sumber Daya Manusia

The America *Accounting Association's Committee* (1973) mendefinisikan Human Resource Accounting atau Akuntansi Sumber Daya Manusia adalah: proses mengidentifikasi dan mengukur data tentang sumber daya manusia dan mengkomunikasikan informasi kepada pihak yang

berkepentingan. Akuntansi sumber daya manusia tidak hanya melibatkan pengukuran semua biaya atau investasi yang terkait dengan rekrutmen, penempatan, pelatihan dan pengembangan karyawan, tatapi juga kuantifikasi nilai ekonomi karyawan dalam suatu organisasi.

Beberapa pendapat mengenai definisi akuntansi sumber daya manusia, berdasarkan (Jorgenson et al., 2015):

1. *The American Accounting Society Committee on Human Resource*. Akuntansi sumber daya manusia adalah proses mengidentifikasi dan mengukur data tentang sumber daya manusia dan mengkomunikasikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Secara sederhana hal ini merupakan perpanjangan dari prinsip-prinsip akuntansi pencocokan biaya dan pendapatan serta pengorganisasian data untuk mengkomunikasikan informasi yang relevan dalam istilah keuangan.
2. Mr. Woodruff Jr wakil presiden R.G. Batty Corporation mendefinisikan: Akuntansi sumber daya manusia adalah upaya untuk mengidentifikasikan dan melaporkan investasi yang dilakukan dalam sumber daya manusia suatu organisasi yang saat ini tidak diperhitungkan dalam praktek akuntansi konvensional. Hal ini merupakan system informasi yang memberi tahu kepada manajemen perubahan apa yang terjadi dari waktu ke waktu terhadap sumber daya manusia.
3. M. N. Baker mendefinisikan akuntansi sumber daya manusia sebagai berikut: Akuntansi sumber daya manusia adalah istilah yang diterapkan oleh profesi akuntansi untuk mengukur biaya dan nilai karyawan untuk organisasi yang mempekerjakan mereka.
4. Konsultan Manajemen: Stephen Knauf mendefinisikan Akuntansi sumber daya manusia sebagai pengukuran kuantifikasi input organisasi manusia seperti rekrutmen, pelatihan, pengalaman dan komitmen.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Tujuan akuntansi sumber daya manusia tidak hanya pengakuan terhadap nilai semua sumber daya yang digunakan tetapi mencakup pengelolaan sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kuantitas dan kualitas barang dan jasa. Tujuan utama dari system akuntansi sumber daya manusia diantaranya adalah:

1. Untuk memberikan informasi nilai biaya dalam membuat keputusan manajemen yang tepat dan efektif tentang memperoleh, mengalokasikan, mengembangkan dan memelihara sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi dengan biaya yang efektif.
2. Untuk memantau secara efektif penggunaan sumber daya manusia oleh manajemen.
3. Untuk memiliki analisis asset manusia yaitu apakah asset tersebut dilestarikan, habis atau dihargai. Untuk membantu dalam pengembangan prinsip-prinsip manajemen dan pengambilan keputusan yang tepat untuk masa depan dengan mengklasifikasikan konsekuensi keuangan dari berbagai praktik.
4. Membantu organisasi dalam pengambilan keputusan di bidang-bidang: perekrutan karyawan, promosi jabatan, control anggaran yang berhubungan dengan manusia dan perilaku organisasi, keputusan melakukan realokasi pabrik, menutup unit yang ada maupun mengembangkan anak perusahaan.

Kegunaan akuntansi sumber daya manusia diantaranya:

1. Memeriksa rencana perusahaan dalam melakukan ekspansi, diversifikasi, perkembangan teknologi yang harus dikerjakan dengan ketersediaan sumber daya manusia dalam penempatan atau posisi kunci pekerjaan tersebut.
2. Apabila tidak tersedia tenaga kerja yang direncanakan, akuntansi sumberdaya manusia menyarankan memodifikasi seluruh rencana perusahaan.
3. Mengimbangi ketidakpastian dan perubahan yang memungkinkan organisasi untuk memiliki orang yang tepat

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PUBLIKASI DAN SEKTOR PUBLIK

untuk pekerjaan yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat.

4. Memberikan ruang untuk kemajuan dan pengembangan karyawan dengan pelatihan dan pengembangan efektif.
5. Dapat menganalisis apakah keterlibatan manusia dalam organisasi tidak membawa atau membawa keuntungan yang tinggi bagi organisasi.
6. Membantu dalam mengambil langkah-langkah dalam meningkatkan kontribusi karyawan dalam bentuk peningkatan produktivitas.
7. Menyediakan berbagai metode pengujian yang digunakan, teknik wawancara untuk diadopsi dalam proses seleksi berdasarkan tingkat keterampilan, kualifikasi dan pengalaman sumber daya manusia masa depan.
8. Dapat meramalkan perubahan nilai, bakat dan sikap sumber daya manusia dan sesuai dengan perubahan teknik manajemen interpersonal.

B. Pengukuran dan Pengakuan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan

Akuntansi Sumber daya manusia menurut (Bullen & Eyler, 2010) berguna sebagai alat manajerial untuk membantu pengambilan keputusan manajerial yang akan menguntungkan tujuan strategis jangka panjang dan profitabilitas perusahaan. Akuntansi Sumber Daya manusia menurut Flamholtz dalam (Bullen & Eyler, 2010) paradigm Akuntansi Sumber Daya manusia dengan pendekatan Sistem Psiko-Teknis (PTS) terdapat dua fungsi pengukuran untuk meningkatkan pengakuan bahwa sumber daya manusia sangat penting bagi produktivitas dan pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang suatu organisasi, fungsi tersebut adalah:

1. Fungsi proses dalam proses pengukuran
2. Informasi numerik dari angka itu sendiri.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Model Pengukuran Akuntansi sumber daya manusia menurut model Flamholtz (Pengantar et al., 2022), pengukuran biaya sumber daya manusia asli, biaya sumber daya manusia dijelaskan dalam dua kategori utama yaitu biaya akuisisi dan biaya pembelajaran. Biaya akuisisi meliputi biaya langsung rekrutmen, seleksi, perekrutan dan penempatan, biaya tidak langsung promosi atau perekrutan dari dalam perusahaan. Biaya pembelajaran meliputi biaya langsung pelatihan formal dan orientasi serta pelatihan kerja. Dalam system akuntansi sumber daya manusia, biaya ini dilaporkan dalam akun asset dengan manfaat ekonomi masa depan bukan sebagai biaya atau beban.

Penentuan biaya sumber daya manusia dikemukakan berbagai teori dan model pengukuran ke dalam dua bagian yaitu Human Resource Cost Model dan Human Resource Value Model.

Flamholtz mengelompokan dua jenis biaya:

1. *Acquisition Cost,* yaitu semua pengorbanan yang dikeluarkan dalam mendapatkan pejabat baru. Biaya langsung diantaranya biaya rekrutmen, biaya seleksi, hiring, dan biaya penempatan. Biaya tidak langsung diantaranya biaya promosi dari dalam perusahaan.
2. *Learning Cost,* yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melatih pegawai sampai memiliki kualitas yang diharapkan unruk menduduki jabatan tertentu. Biaya langsung seperti biaya training, orientasi, on the job training. Biaya tidak langsung seperti kerugian yang ditimbulkan berkurangnya produktivitas selama pelatihan berlangsung.

Model pengukuran biaya sumber daya manusia menurut Flamholtz adalah:

1. *The Historical Cost (Acquisition Cost) Model*. Metode ini menilai sumber daya manusia dihitung berdasarkan akumulasi biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan rekrutmen, seleksi, hiring, pelatihan, penempatan, dan pembinaan personalia yang bersangkutan.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEI KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

2. *The replacement Cost Model.* Pada metode ini sumber daya manusia diukur dengan menaksir biaya yang akan dikeluarkan untuk mendapatkan pegawai yang sama yaitu biaya untuk merekrut, menyeleksi, melatih, menempatkan, dan mengembangkan pegawai yang sama kualitasnya dengan yang ada sekarang.
3. *The Opportunity Cost Model.* Model dari Hekimian dan Jones menilai sumber daya manusia diukur melalui proses penawaran yang bersifat kompetitif yang dilakukan secara intern dengan didasarkan pada konsep opportunity cost. Manager menawarkan pegawai yang dinilai langka sehingga hanya mereka yang menjadi dasar pengukuran, kelemahan model ini adalah pemilihan atau kriteria langka ini dinilai bersifat subjektifitas dan diskriminatif.

Human Resource Model

1. *Discounted Wage Flows Method*
   Lev dan Schwartz (Belkaoui, 1995) perhitungan nilai sumber daya manusia diusulkan dengan melihat nilai kompensasinya di masa yang akan datang Rumus menghitungnya sebagai berikut:

$$\sum_{t-r}^{T} \frac{I(t)}{(1+r)^{t-r}}$$

Vr = Nilai sumber daya manusia seseorang pada usia "r"
I(t)= Pendapatan yang bersangkutan sampai pension
r = Tingkat discount khusus untuk seseorang
T = Umur pension

2. *Adjusted Discounted Future Wages Method*
   Harmason (Belkaoui, 1995) penyesuaian dilakukan pada nilai kompensasi yang akan diterima pegawai. Discounted dari gaji yang akan datang disesuaikan dengan efficiency factor yang merupakan Return on Investment (ROI) dimaksud

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

untuk mengukur efektivitas relative dari nilai sumber daya manusia sebuah perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan perusahaan mendapatkan laba disebabkan oleh perbedaan prestasi sumber daya manusia, sebagai berikut:

$$\text{Efficiency Ratio} = \frac{5\frac{RF0}{RE0} + 4\frac{RF1}{RE1} + 3\frac{RF2}{RE2} + 2\frac{RF3}{RE3} + \frac{RF4}{RE4}}{15}$$

RFi =Tingkat laba akuntansi atas asset yang dimiliki perusahaan pada tahun ke-i

REi =Tingkat laba akuntansi atas asset yang dimiliki keseluruhan perusahaan pada tahun ke-i

i =tahun (0-4)

3. *Present Monetary Value Method*

Present monetary value method menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A = \sum_{i=1}^{n} \int_{t}^{T} \frac{Gi(t)}{(1+r)^{\ t-T}} dt + \int_{t}^{T} \frac{X(t)}{(1+r)^{\ t-T}} dt \sum_{i=1}^{n} \int_{t}^{T} \frac{Ei(t)}{(1+r)^{\ t-T}} dt$$

A =Nilai SDM bagi suatu organisasi formal

N =Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan organisasi

t =Saat sekarang

T =Waktu yang paling sering pegawai meninggalkan organisasi

Gi(t)=Nilai jasa yang diberikan oleh seorang I pada waktu t kepada organisasi

Ei(t) =Semua kompensasi langsung dan tidak langsung yang diberikan kepada seseorang I pada waktu t oleh organisasi

X(t) =Nilai jasa seluruh individu yang saat ini dipekerjakan bersama kelebihan nilai jasa individu pada saat t

r = tingkat bunga (time value of money)

4. *Discounted Future Value*
   Discounted future value dikembangkan oleh Burmmet, Flamholtz, Pyle dalam meramalkan present value dari laba perusahaan pada tingkat rate of return yang normal dan mengalokasikan sebagian dari nilai ekonomis perusahaan sebagai SDM berdasarkan kontribusi relatif dari mereka.

5. *Goodwill Methods*
   Goodwill methods dikembangkan oleh Hermanson yang menyarankan mendiskontokan kelebihan di atas normal *expected earning* berdasarkan perbandingan perusahaan dalam suatu sector industry dan mengalokasikan ke dalam aktiva yang beluam ada misalnya investasi dalam SDM.

6. *Economic Value Approach*
   Metode ini menggunakan penjabaran uang atas expexted future services dari service levels dan service group suatu perusahaan. Tingkat gaji dan jabatan merupakan service level. Perbedaan tingkat prestasi menggambarkan service group. P(Si) merupakan probabilitas seorang individu menduduki tiap keadaan dalam susunan service yang ada. Nilai expected service output = Jumlah produk dari jumlah jasa yang diharapkan diperoleh dari setiap kemungkinan service x expected probabilitas.

C. Laporan dan Pengungkapan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan

Keseimbangan antara biaya yang telah dikeluarkan untuk sumber daya manusia dengan hasil atau kontribusi yang didapatkan harus seimbang. Faktor yang dapat mendukung kinerja sumber daya manusia dan dapat dijadikan ke dalam biaya pegawai salah satunya adalah imbalan yang diberikan dari hasil kinerja atau prestasi kerja yang diraih seorang pegawai.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTASI PUBLIK DAN SERVICE PUBLIK

Biaya – biaya pegawai yang ditimbulkan nantinya akan masuk ke dalam akuntansi sumber daya manusia.

Dalam upaya mencapai hasil kinerja, menurut (Wirawan, 2009) sumber daya manusia mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

1. Komitmen pencapaian tujuan. Tujuan yang telah ditetapkan bersama oleh manajer dan pegawai belum menjadi tujuan sampai pegawai berkomitmen dan termotivasi untuk mencapainya.
2. Meminta balikan dan pelatihan kinerja. Memberikan balikan dan pelatihan kinerja merupakan tugas manajer yang akan berguna apabila pegawai menyadari penting nya balikan dan pelatihan yang merupakan alat untuk mengembangkan kinerjanya.
3. Berkomunikasi secara terbuka dan teratur dengan manajernya. Pegawai berkomunikasi secara terbuka dan terus menerus untuk membahas balikan yang disampaikan oleh manajernya dan membahas pekerjaan atau tugas yang telah dikerjakan apakah sesuai dengan prosedur dan standar kerja atau belum sesuai.
4. Mengumpulkan dan berbagi data kinerja. Dalam melaksanakan tugas yang diemban pegawai mencatat informasi mengenai kemajuannya, seberapa besar capaian yang telah diperoleh dari tujuan yang ditetapkan. Hasil capaian tersebut dikomunikasikan kepada pimpinan atau manajernya.
5. Mempersiapkan telaah kinerja. Pegawai selalu mempersiapkan diri saat kinerjanya ditelaah oleh manajer. Apabila system evaluasi kinerja menggunakan Management by Objevtives (MBO) evaluasi kinerja akan dilakukan secara formatif dan sumatif. MBO merupakan pendekatan perusahaan yang dapat meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja dikarenakan strategi ini berorientasi pada hasil bukan proses, sehingga semua aktivitas harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan dikaitkan dengan imbalan.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Tujuan seorang pegawai sebagai sumber daya manusia menurut (Wirawan, 2009) menggunakan akronim Bahasa Inggris: SMART Objective:

S = Specific, tujuan menunjukkan kepada karyawan mengenai apa yang harus dilakukannya disertai definisi operasional, prosedur pencapaian, dan hasil yang diharapkan organisasi.

M = Measurable, tujuan pegawai harus dapat diukur dalam pengertian kuantitatif dan kualitatif.

A = Attainable, tujuan harus dapat dicapai oleh pegawai, tetapi untuk mencapainya harus menimbulkan tantangan bagi pegawai.

R = Reasonable, tujuan harus dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia.

T = Timely, hasil pencapaian tujuan harus tepat dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Setiap pekerjaan sumber daya manusia memerlukan evaluasi hasil pekerjaan yang dilakukan. Pekerja memerlukan masukan berupa *know-how* dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tepat. Pekerja harus melakukan *problem solving* yang hasilnya dalam bentuk *accountability* atau dapat dipertanggungjawabkan sebagai kontribusi yang dihasilkan pekerja.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PELAKSANA DAN PERS PUBLIK

Faktor fisik dan lingkungan juga dievaluasi karena menjadi bagian penting yang dapat mempengaruhi tercapainya kinerja pekerjaan. Aktivitas evaluasi dapat digambarkan sebagai berikut:

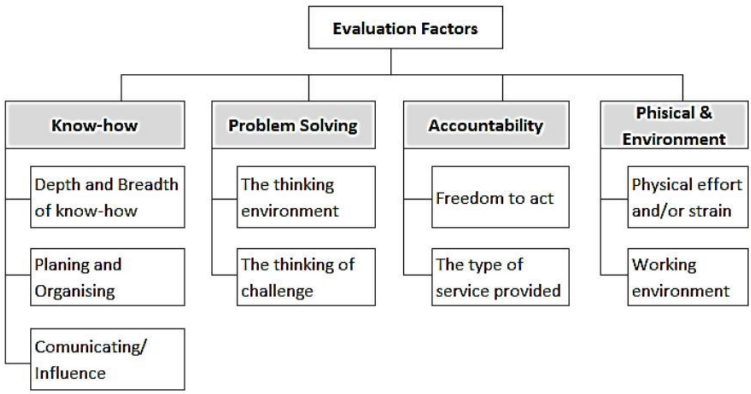

Gambar 6.1. Faktor-faktor Pekerjaan yang Dievaluasi

D.Pengaruh Akuntansi Sumber Daya Manusia Berkelanjutan terhadap Kinerja Keuangan

Dalam pembahasan metric sumber daya manusia Hansen dalam (Bullen & Eyler, 2010) mencatat bahwa dua pertiga dari 250 perusahaan terbesar di dunia saat ini mengeluarkan laporan keberlanjutan bersama dengan laporan keuangan mereka untuk menangkap nilai penuh sebuah organisasi. Standar Global untuk pelaporan keberlanjutan memerlukan pengungkapan data tenaga kerja yang mencerminkan potensi kinerja dan keuntungan di masa depan. Pelaporan keberlanjutan telah diformalkan di dalam pedoman Global Reporting Initiative (GRI), jaringan bisnis internasional, investor tenaga kerja, dan akuntan.

Penelitian yang dilakukan pada PT Bank Mandiri Tbk (Purnama et al., 2016) setelah adanya penerapan akuntansi sumber daya manusia pada laporan keuangan perusahaan, hasil kapitalisasi dari beban tersebut mempengaruhi laba perusahaan dan juga akun-akun lainnya. Terjadi peningkatan kinerja perusahaan pada periode penelitian 2010 sampai dengan 2014 yang mengakibatkan rasio profitabilitas perusahaan secara

otomatis mengalami peningkatan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Bank Mandiri Tbk mengalami peningkatan sesudah penerapan akuntansi sumber daya manusia dan berbeda signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan akuntansi sumber daya manusia.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN,SURVEY,KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

BAB 7 AKUNTANSI LINGKUNGAN

Intan Rakhmawati, SE.,M.Ak
Universitas Mataram

A. Konsep Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan (*green accounting*) sebenarnya merupakan konsep yang sejak 1970, dengan adanya perkembangan revolusi industri. Konsep ini muncul akibat penggunaan beragam mesin dan peralatan, yang memicu terjadinya degradasi lingkungan. Degradasi muncul baik dalam bentuk pencemaran dari udara, air, tanah, maupun suara. Pada daerah yang memang merupakan daerah industri, hal ini merupakan hal yang lazim. Namun pada daerah pada masyarakat umum, hal ini merupakan pencemaran. Oleh karena itu, terdapat dampak lingkungan, yang perlu diukur oleh akuntan. Pengukuran dampak lingkungan ini akan dibahas pada sub bab berikutnya.

Namun menurut Lako (2018:6-7), terkait dampak lingkungan, walaupun entitas berusaha bertanggung jawab dengan mengeluarkan biaya untuk memperbaiki efek produksinya pada lingkungan maupun sosial, namun Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (disingkat TJSLP), kesannya hanya dikarenakan adanya regulasi kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR), bukan karena maksud utama untuk memperbaiki krisis ekologi/lingkungan dan krisis sosial. Bahkan ada tidaknya, dan juga nominal biaya yang

dikeluarkan, pada entitas yang sudah *go public*, dapat mempengaruhi persepsi investor pada entitas tersebut.

Padahal menurut Tim Penyusun Modul Akuntansi Lingkungan Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya dalam modulnya, perlu ada konvergensi dengan pencatatan dan pelaporan akuntansi lingkungan dalam akuntansi konvensional, agar dapat terwujud proses bisnis dengan dampak minimum pada kerusakan lingkungan.

B. Pengukuran dan Pengakuan Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan dapat tercermin dalam pengaruh negatif seperti pencemaran dan kerusakan pada lingkungan, yang diakibatkan aktivitas bisnis entitas. Misalnya, pada produsen tahu, saat memproduksi tahu, terdapat pencemaran dari hasil perebusan tahu, baik pencemaran air maupun udara, dalam bentuk bau. Hal-hal ini merupakan hal yang mengandung ketidakpastian.

Sementara menurut Maunders dan Burritt dalam Lako (2018:37), konsep dasar akuntansi mengabaikan katidakpastian dalam pengukuran dan penyajian informasi dalam laporan keuangan. Dalam asumsi dasar akuntansi sendiri, harus ada unsur kepastian dalam pengukurannya.

Menurut Lako (2018:37), dalam konsep lain, konsep keberlanjutan usaha, aspek pengakuan dan pengukuran dampak aktivitas bisnis terhadap lingkungan juga diabaikan. Oleh karena pada dasarnya, dengan penggunaan konsep akrual dan beda waktu dalam akuntansi konvensional, akuntan tidak dapat mengukur informasi yang menghubungkan dampak ekologis dengan peristiwa penyebabnya. Hal ini disebabkan banyak hal yang sulit terukur, karena efeknya yang tidak selalu nampak. Misalnya, dalam aktivitas bisnis operasi entitas, dapat berdampak pada penipisan lapisan ozon dan degradasi lingkungan. Sekalipun ada akun provisi dalam utang, namun akun ini tidak digunakan untuk menjurnal hal-hal yang bersifat sulit terukur efeknya.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEI KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Berdasarkan penelitian Inavescu (2022) pada 34 jenis pencemar udara berdasarkan sektor ekonomi, yang berefek pada volume pencemaran udara di Indonesia. Sumber data dari Badan Pusat Statistik Tabel Input-Output 2010 dan lembaga riset EXIOBASE 2010. Dari riset ini, ditemukan bahwa jenis pencemar yang menjadi penyumbang terbesar degradasi lingkungan adalah 21,4% dari sulfur dioksida (SOx), 16,4%dari nitrogen oksida atau (NOx),13,4 % dari karbon dioksida (CO2), dan 10,4% dari gas metana (CH4).

Saat ini, beragam upaya penanggulangan telah dilakukan antara lain dengan pemakaian kendaraan listrik, adanya pestisida alami, peremajaan taman kota, dan pengurangan pemakaian energi listrik. Prinsip ini sebenarnya mengacu pada eko-efisiensi dari World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

C. Laporan dan Pengungkapan Dampak Lingkungan

Pelaporan dan pengungkapan dampak lingkungan dalam Laporan Aspek CSR menjadi penting, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial entitas. Isi laporan ini antara lain yaitu:

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (TJSLP) beserta wilayah penyalurannya
2. Komitmen entitas terhadap pelaksanaan SDG's
3. Sinergi berdaya sebagai implementasi pilar ekonomi dan sinergi unggul sebagai implementasi pilar lingkungan. Laporan bagian ini merupakan sinergi antara pilar ekonomi dan ekologi. Aktivitas dalam kedua pilar ini harus terkait.
4. Penghargaan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
5. Indeks Kepuasan Masyarakat juga perlu ditampilkan, sebagai efek dari sinergi dengan lingkungan.

Selanjutnya, menurut Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Daur Hidup (*Life Cycle Assesment*-LCA) PROPER 2021, langkah pengungkapan dampak lingkungan dalam laporan dapat dilakukan dengan yang memberikan perincian biaya

lingkungan menurut kategori dampak pada lingkungan. Dalam pedoman ini, ada istilah Aturan Kategori Produk secara nasional atau internasional, yang memberi batasan sistem dalam operasi entitas, termasuk batas yang ramah lingkungan untuk bahan baku dan bahan penolongnya.

Masih berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Daur Hidup (*Life Cycle Assesment*-LCA) PROPER 2021, pencemaran lingkungan dapat terjadi pada entitas yang menggunakan bahan anorganik atau non *biodegradable*. Misalnya, pada entitas produsen roda mobil menggunakan batasan sistem *gate to gate*. Artinya, input atau masukan untuk membuat roda adalah karet, baut, besi, dan lain sebagainya. Batasan gate (proses inti) hanya berlaku untuk bahan baku karet saja, sementara bahan baku lain menggunakan batasan cradle (proses hulu sebelum masuk ke proses inti). Dengan demikian, entitas dapat menambahkan informasi lingkungan terkait karet untuk perhitungan LCA yang komprehensif.

Menurut Riyadi (2017), dalam Laporan Keuangan Lingkungan, prinsip eko-efiensi sendiri memerlukan modifikasi dalam pelaporan biaya lingkungan. Biaya lingkungan merupakan biaya yang terjadi untuk mengatasi atau mencegah terjadinya efek negatif pada lingkungan. Biaya ini dihitung dengan melakukan kuantifikasi proses produksi, aktivitas bisnis, dan biaya lingkungan produk, dengan mempertimbangkan biaya sebagai berikut:

1. Biaya langsung, seperti biaya tenaga kerja dan biaya modal.
2. Biaya tidak langsung, seperti biaya monitoring
3. Biaya yang tidak terlihat, seperti biaya public relation dan biaya amortisasi goodwill, yang mengakibatkan reputasi entitas terpengaruh. Biaya ini dianggap biaya tidak terlihat, karena merupakan efek dari dampak tidak langsung akibat efek terhadap lingkungan.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, KONSULTASI, PUBLIKASI DAN PENGABDIAN PUBLIK

Masih menurut Riyadi (2017), selain melaporkan biaya lingkungan, juga ada keuntungan lingkungan yang perlu dilaporkan. Ada tiga jenis keuntungan lingkungan yaitu:

1. Pemasukan, mengacu pada pendapatan yang mengalir ke entitas karena adanya usaha mengurangi dampak lingkungan.
2. Penghematan saat ini, mengacu pada pengurangan biaya lingkungan yang dapat dicapai entitas tahun ini.
3. Penghindaran biaya, mengacu pada penghematan berjalan yang dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Di dalam laporan keuangan lingkungan, pengurangan biaya yang ditunjukkan adalah jumlah penghematan saat ini ditambah dengan penghindaran biaya lingkungan karena tindakan lingkungan pada periode sebelumnya.

Kemudian menurut Saputra (2019:13), pengungkapan dampak terhadap lingkungan juga merupakan konsep biaya lingkungan. Menurut Lako (2018:17), dampak negatif dari pelaksanaan/aktivitas bisnis pada lingkungan juga dapat berdampak secara sosial. Dalam hal ini, kehidupan entitas, masyarakat, dan negara dalam satu kesatuan, sebenarnya sangat terkait erat satu sama lain sebagai mata rantai sistem kehidupan. Dengan demikian, akuntansi hijau (*green accoun*ting) harus memperhitungkan efek nilai pada lingkungan, sosial, dan ekonomi secara integral.

Berikut contoh laporan keuangan lingkungan yang dapat disajikan entitas. Belum ada standar yang wajib diikuti untuk membuat laporan keuangan lingkungan. Berikut contoh dengan adanya biaya lingkungan, berdasarkan Modul :

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengukuran untuk biaya lingkungan dimasukkan dalam laporan berikut:

Laporan Biaya Lingkungan
Periode Desember 2023

Jenis Biaya	Rp
Biaya Pencegahan :	
- Pelatihan	12.000.000

Jenis Biaya	Rp
- Desain Produk	5.000.000
- Pemilihan Peralatan	4.000.000
	21.000.000
Biaya Pemeriksaan	
- Pemeriksaan proses	4.800.000
- Pemeriksaan bahan	2.000.000
	6.800.000
Biaya kegagalan internal :	
- Biaya produk rusak/cacat	200.000
- Biaya pemeliharaan peralatan	500.000
	700.000
Biaya kegagalan eksternal :	
- Biaya produk rusak/cacat	150.000
- Biaya lingkungan ekonomi	200.000
- Biaya lingkungan politik (pungutan liar)	200.000
	200.000
- Biaya penataan lahan	500.000
- Biaya klaim kerusakan	1.250.000
TOTAL BIAYA LINGKUNGAN	29.750.000

Sumber:https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/ Akmen_14_Modul_Manajemen% 20Biaya%20Lingkungan.pdf

Biaya ini kemudian dikalkulasi ke biaya produksi, sebagai berikut:

Tabel 7.1. Biaya Produksi

Jenis Biaya	Biaya per unit
Biaya produksi per unit (70.000.000/1.000 unit)	70.000
Biaya pencegahan (21.000.000/1.000 unit)	21.000
Biaya pemeriksaan (6.800.000/1.000 unit)	6.800
Biaya kegagalan internal (700.000/1.000 unit)	700
Biaya kegagalan eksternal (1.250.000/ 1.000 unit)	1.250

Jenis Biaya	Biaya per unit
Total biaya produksi	99.750

Sumber:https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/ Akmen_14_Modul_Manajemen% 20Biaya%20Lingkungan.pdf

Berdasarkan modul Universitas Esa Unggul, kasusnya yaitu jjika entitas tidak membayar biaya lingkungan, maka ia memperoleh laba operasi Rp27.500 per unit. Namun dan jika ia membayar biaya lingkungan, entitas justru mengalami kerugian Rp2.250 per unit. Berikut contoh perbandingannya:

Tabel 7.2. Perbandingan Laba Rugi Operasional dengan dan Tanpa Biaya Lingkungan

Keterangan	Ada biaya lingkungan	Tidak Ada Biaya lingkungan
Pendapatan atas penjualan Biaya produksi per unit Biaya lingkungan	100.000 (70.000) (29.750)	100.000 (70.000) -
	250	30,000
Biaya pemasaran dan administrasi 10% x 25.000	2.500	2.500
Laba (rugi) operasi	(2.250)	27.500

Sumber:https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/ Akmen_14_Modul_Manajemen% 20Biaya%20Lingkungan.pdf

Berdasarkan perhitungan dan laporan di atas, berikut laporan keuangan lingkungan yang dibuat:

Laporan Keuangan Lingkungan
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022

Keuntungan Lingkungan:		
Lingkungan, pengurangan biaya, pencemaran		Rp22.000.000
Pengurangan biaya - pembuangan limbah berbahaya		Rp 7,000.000
Pemasukan daur ulang		Rp 2.000.000
Penghematan biaya konservasi energi		Rp 1.000.000
Pengurangan biaya pengemasan		Rp 1.500.000
Total Keuntungan Lingkungan	Rp33.500.000	
Biaya Lingkungan:		Rp21.000.000
Biaya pencegahan		Rp 6.800.000
Biaya pemeriksaa		Rp 700.000
Biaya kegagalan internal		Rp 1.250.000
Biaya kegagalan eksternal		Rp29.750.000
Total Biaya Lingkungan	Rp21.000.000	

Sumber:https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/ Akmen_14_Modul_Manajemen% 20Biaya%20Lingkungan.pdf

LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKOLAH PUBLIK

Dalam hal entitas dapat menggunakan bahan yang ramah lingkungan dalam operasinya untuk mengurangi dampak lingkungan, umumnya mempengaruhi persepsi investor dan stakeholder, sehingga mempengaruhi kinerja pengelolaannya yang meningkat setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memberikan penilaian atas hal ini Program Penilaian Peringkat Kinerja Entitas dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pro-per) setiap tahun.

Berdasarkan berita harian terbaru pada website https://sumatra.bisnis.com (23 Juni 2023), pada 2023, PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR) memperoleh 2 penghargaan *Indonesia Social Responsibility Award*, karena memprogramkan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dalam operasinya. Upayanya dilakukan melalui pelaksanaan program Konservasi Gajah Pendekatan Agroforestri dengan Rimba Satwa *Foundation*, dengan memusnahkan ratusan ancaman berupa

jerat. Selain konservasi satwa, PT. PHR juga berupaya meningkatkan produktivitas petani setempat dengan agroforestri yang ramah lingkungan. PT. PHR juga membuat program pemberdayaan UMKM melalui perguruan tinggi sebagai mitra pelaksananya, Politeknik Negeri Bengkalis. Hal inilah kemudian mengarah pada perbaikan ekonomi dan ekologi.

D. Akuntansi untuk Pengurangan Dampak Lingkungan

Pengurangan dampak lingkungan akan menimbulkan biaya lingkungan. Menurut Saputra, et al., 2019, biaya lingkungan sebagaimana laporan di atas dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Biaya pencegahan lingkungan. Biaya ini merupakan biaya-biaya yang dilakukan untuk mencegah limbah dan sampah akibat aktivitas operasional entitas. Pelaporan biaya lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap profitabilitas entitas. Jumlah yang dihabiskan untuk biaya akibat kegagalan dan pencemaran lingkungan, dapat dikurangi dengan menginvestasikan biaya pada aktivitas untuk pencegahan dan pemeriksaan/deteksi pencemaran. Jadi sifatnya menjadi timbal-balik.
2. Biaya pemeriksaan/deteksi pencemaran lingkungan. Biaya ini bersumber dari aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah proses operasional entitas dan produknya telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak.
3. Biaya kegagalan internal lingkungan, didefinisikan sebagai biaya karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar.
4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan. Biaya ini merupakan biaya untuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke lingkungan luar. Dalam hal ini, entitas harus mengidentifikasi biaya kegagalan eksternal yang dibayar oleh entitas, dan biaya kegagalan eksternal

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN PENGEMBANGAN SEKTOR PUBLIK

yang tidak dibayar entitas, dan akhirnya mengakibatkan biaya sosial, sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Dampak dari biaya pengurangan dampak lingkungan ini adalah terciptanya eko-efisiensi dan *good governance*. Eko-efisiensi merupakan gabungan dari istilah ekologi dan efisiensi, yang mengindikasikan bahwa perbaikan ataupun terwujudnya, maupun peningkatan efisiensi dikarenakan adanya perbaikan kinerja lingkungan.

Menurut blog lindungihutan.com, perbaikan kinerja lingkungan didefinisikan sebagai efisiensi pemakaian energi, penurunan emisi, pengurangan, dan pemanfaatan kembali limbah B3 (seperti limbah medis/klinis padat seperti jarum infus, kemasan bekas bahan kimia, oli bekas, aki bekas), pengolahan limbah non-B3 (seperti limbah plastik, limbah kaleng, limbah kertas, limbah tetrapack), efisiensi air, dan penurunan beban pencemar, yang menjadi sumber limbah.

Jika dikembalikan pada istilah eko-efisiensi, efeknya juga dapat pada modifikasi dalam pelaporan biaya lingkungan, dengan melaporkan juga keuntungan lingkungan. Hal ini telah dibahas pada poin sebelumnya.

Secara umum, pada akhirnya, berdasarkan pendapat Lako (2018:82-83), ada beberapa prinsip utama untuk mengintegrasikan catatan akuntansi dan ekologi melalui penggunaan akuntansi hijau dalam pelaporan keuangan. Akuntansi hijau ini juga dilakukan dalam rangka pengurangan dampak lingkungan. Langkah yang dapat ditempuh yaitu sebagai berikut:

1. Pengeluaran dana ataupun sumber daya ekonomi lain karena dilaksanakannya TJSLP seperti telah dijelaskan di atas, dapat diakui sebagai pengorbanan investasi, jika biaya tersebut dinilai dapat memberikan manfaat di masa mendatang, dan nilainya dapat dihitung.
2. Adanya *matching principle* antara *cost-benefit* dan *effoft-accomplishment* terhadap pengorbanan di atas, dapat diakui

pada beberapa periode akuntansi, jika potensi ekonomi dan non ekonominya dapat dinilai dengan pasti (menjadi aset tidak tetap/investasi).

Pada akhirnya, tujuan dari pelaksanaan akuntansi dampak terhadap lingkungan yang mengacu pada akuntansi hijau adalah menyediakan informasi akuntansi keuangan, akuntansi sosial, dan akuntansi lingkungan yang terintegrasi dan reliabel, bagi para *stakeholders* dan pengguna informasi lainnya.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN,SURVEY,KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

BAB 8 AKUNTANSI SOSIAL

Dr. Galuh Tresna Murti, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA., CRGCPA
Universitas Telkom

A. Konsep Akuntansi Sosial

Akuntansi sosial adalah pendekatan dalam akuntansi yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan keuangan. Dalam praktik akuntansi konvensional, fokus utama adalah pada informasi keuangan dan pencapaian tujuan finansial perusahaan. Namun, dengan berkembangnya kesadaran akan isu-isu sosial dan lingkungan, akuntansi sosial muncul sebagai respons terhadap perlunya mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis. Konsep dalam akuntansi sosial melibatkan sejumlah elemen dan pendekatan yang ditujukan untuk memahami dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis.

Tujuan utama akuntansi sosial adalah mencapai keberlanjutan dalam konteks ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini memperluas ruang lingkup akuntansi tradisional dengan memasukkan faktor-faktor non-keuangan ke dalam pengukuran, pelaporan, dan pengambilan keputusan perusahaan. Akuntansi sosial mempertimbangkan dampak sosial seperti kesejahteraan karyawan, hubungan dengan komunitas lokal, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, dan interaksi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Landasan Teori dalam Akuntansi Sosial

Akuntansi sosial didasarkan pada beberapa teori yang memberikan landasan konseptual dan filosofis bagi pendekatan ini. Berikut adalah penjelasan tentang teori-teori yang menjadi dasar bagi akuntansi sosial:

1. Teori Keadilan Sosial:
   Teori keadilan sosial melibatkan prinsip-prinsip distribusi yang adil dalam masyarakat. Teori ini mengajukan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dan beban secara adil. Dalam konteks akuntansi sosial, teori keadilan sosial menekankan pentingnya mempertimbangkan distribusi keuntungan dan beban sosial secara adil dalam pengambilan keputusan keuangan. Akuntansi sosial berusaha untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mempromosikan keadilan melalui pengukuran dan pelaporan dampak sosial perusahaan.
2. Teori Pembangunan Berkelanjutan:
   Teori pembangunan berkelanjutan menekankan perlunya mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan jangka panjang. Teori ini mengakui bahwa kegiatan ekonomi harus mempertimbangkan keberlanjutan alam dan kesejahteraan sosial. Dalam akuntansi sosial, teori pembangunan berkelanjutan menjadi dasar untuk memasukkan faktor-faktor non-keuangan ke dalam pengambilan keputusan bisnis. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola dampak sosial dan lingkungan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Teori Akuntansi Lingkungan:
   Teori akuntansi lingkungan mengemukakan bahwa aktivitas bisnis harus mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan alam. Teori ini menyoroti perlunya memasukkan aspek lingkungan ke dalam sistem akuntansi untuk mengukur dan melaporkan dampak bisnis pada lingkungan. Dalam konteks akuntansi sosial, teori akuntansi lingkungan berfungsi sebagai dasar untuk pengukuran dan pelaporan

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, RISET, KONSULTAN PUBLIK DAN SOSIAL

aspek lingkungan perusahaan, seperti penggunaan sumber daya alam, emisi, limbah, dan upaya pengelolaan lingkungan.

Melalui penerapan teori-teori ini, akuntansi sosial berusaha untuk menciptakan pendekatan akuntansi yang lebih holistik dan komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan keadilan sosial, keberlanjutan, dan dampak lingkungan dalam pengambilan keputusan keuangan. Dengan demikian, akuntansi sosial bertujuan untuk mengintegrasikan dimensi sosial dan lingkungan ke dalam akuntansi tradisional, dengan harapan mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

B. Pengukuran dan Pengakuan Akuntansi Sosial

Metode Pengukuran dalam Akuntansi Sosial

Metode pengukuran yang digunakan dalam akuntansi sosial, seperti analisis siklus hidup produk, penilaian dampak sosial, dan pengukuran kinerja berkelanjutan. Metode-metode ini membantu perusahaan mengukur dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka.

LAPISA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN DATA DAN SEKTOR PUBLIK

Dalam akuntansi sosial, ada beberapa metode pengukuran yang digunakan untuk memperhitungkan faktor-faktor sosial dan lingkungan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang tiga metode pengukuran umum yang sering digunakan dalam akuntansi sosial:

1. Analisis Siklus Hidup Produk (*Life Cycle Assessment/LCA*):
   Analisis siklus hidup produk adalah metode yang digunakan untuk mengukur dampak lingkungan dari suatu produk atau layanan dari tahap produksi hingga pemilihan dan akhir hayat produk. Dalam LCA, lingkup pengukuran meliputi penggunaan sumber daya alam, emisi gas rumah kaca, polusi udara dan air, dan dampak lainnya. LCA membantu perusahaan memahami jejak lingkungan produk mereka secara menyeluruh, sehingga mereka dapat mengidentifikasi peluang untuk mengurangi dampak lingkungan melalui

perbaikan desain, pemilihan bahan baku yang lebih berkelanjutan, dan efisiensi operasional.

2. Penilaian Dampak Sosial (*Social Impact Assessment/SIA*):
   Penilaian dampak sosial adalah metode untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi dampak sosial dari kegiatan perusahaan. SIA melibatkan analisis terhadap berbagai aspek sosial, seperti kesejahteraan karyawan, hubungan dengan komunitas lokal, akses terhadap layanan masyarakat, dan hak asasi manusia. Metode ini membantu perusahaan memahami dampak sosial mereka secara holistik dan mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan manfaat sosial dan mengurangi dampak negatif.
3. Pengukuran Kinerja Berkelanjutan (*Sustainability Performance Measurement*):
   Pengukuran kinerja berkelanjutan melibatkan pengembangan indikator dan metrik untuk mengukur kinerja perusahaan dalam aspek-aspek berkelanjutan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengukuran ini dapat mencakup parameter seperti emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, tingkat kepuasan karyawan, kontribusi terhadap pengembangan masyarakat lokal, atau praktik tata kelola perusahaan. Pengukuran kinerja berkelanjutan memungkinkan perusahaan untuk memantau kemajuan mereka terhadap tujuan berkelanjutan, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan melaporkan kinerja mereka secara transparan kepada pemangku kepentingan.

Metode pengukuran ini membantu perusahaan mengumpulkan data relevan dan membuat analisis yang diperlukan untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Dengan informasi ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih berkelanjutan, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan melaporkan kinerja mereka secara komprehensif kepada pemangku kepentingan.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, INOVASI, KONSULTASI DAN PUBLIKASI

Metode Pengakuan dalam Akuntansi Sosial

Dalam akuntansi sosial, pengakuan dampak sosial merujuk pada cara dimana dampak sosial dari kegiatan bisnis atau organisasi diidentifikasi, diukur, dan dicatat secara akuntansi. Metode pengakuan ini membantu dalam menghubungkan dampak sosial dengan data dan informasi keuangan yang dapat dimasukkan dalam laporan keuangan atau laporan non-keuangan. Berikut ini adalah beberapa metode umum yang digunakan dalam pengakuan dampak sosial dalam akuntansi sosial:

1. Pengakuan Nilai Ekonomi Dampak Sosial:
   Metode ini melibatkan pengakuan nilai ekonomi dari dampak sosial yang dihasilkan oleh organisasi. Dampak sosial yang dapat diukur secara monetaris, seperti penghematan biaya operasional, peningkatan produktivitas, atau peningkatan nilai merek yang disebabkan oleh praktik sosial yang baik, dapat diakui sebagai nilai ekonomi dalam laporan keuangan. Misalnya, penghematan energi yang dihasilkan dari inisiatif keberlanjutan dapat diukur dan diakui sebagai nilai ekonomi dalam laporan keuangan.
2. Pengakuan Aset dan Liabilitas Sosial:
   Metode ini melibatkan pengakuan aset dan liabilitas sosial dalam laporan keuangan. Aset sosial dapat mencakup nilai goodwill atau reputasi yang baik yang dihasilkan dari praktik sosial yang bertanggung jawab. Liabilitas sosial dapat mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap pemulihan lingkungan atau pemenuhan komitmen sosial tertentu. Pengakuan aset dan liabilitas sosial ini membantu dalam menggambarkan dampak sosial secara finansial dan mengaitkannya dengan laporan keuangan.
3. Penggunaan Metode Pengukuran Non-Keuangan:
   Metode ini melibatkan penggunaan metode pengukuran non-keuangan, seperti indikator kinerja sosial atau penilaian dampak sosial, untuk mengukur dampak sosial secara kualitatif atau kuantitatif. Hasil pengukuran ini dapat

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN STRATEGY KOMUNIKASI PUBLIK DAN SEKTOR PUBLIK

digunakan sebagai dasar pengakuan dampak sosial dalam laporan keuangan atau laporan non-keuangan. Misalnya, peningkatan tingkat kepuasan karyawan dapat diukur dengan menggunakan skala penilaian kualitatif dan diakui sebagai dampak sosial positif dalam laporan keuangan atau laporan keberlanjutan.

4. Pendekatan Partisipatif: Pendekatan partisipatif melibatkan pemangku kepentingan dalam pengakuan dampak sosial. Ini melibatkan berbagi informasi, dialog, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk memahami perspektif mereka tentang dampak sosial yang dihasilkan oleh organisasi. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi dampak sosial yang relevan yang perlu diakui dalam laporan keuangan atau laporan non-keuangan.

Metode pengakuan dampak sosial dalam akuntansi sosial dapat beragam tergantung pada karakteristik organisasi, tujuan pelaporan, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Penting untuk mencocokkan metode pengakuan dengan kerangka kerja pelaporan yang relevan, seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) atau *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), untuk memastikan konsistensi dan transparansi dalam pengungkapan dampak sosial.

C. Laporan dan Pengungkapan Akuntansi Sosial

Laporan dalam akuntansi sosial

Dalam akuntansi sosial, metode pengungkapan dampak sosial merujuk pada cara di mana informasi tentang dampak sosial dari kegiatan bisnis atau organisasi disampaikan kepada pemangku kepentingan. Metode pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan, relevan, dan dapat dipahami tentang dampak sosial yang dihasilkan oleh entitas. Berikut ini adalah beberapa metode umum yang digunakan dalam pengungkapan dampak sosial dalam akuntansi sosial:

1. Laporan Keberlanjutan:
   Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) adalah bentuk umum pengungkapan dampak sosial dalam akuntansi sosial. Laporan ini mencakup informasi tentang kebijakan sosial, praktik lingkungan, inisiatif CSR, dan kinerja keberlanjutan perusahaan. Laporan keberlanjutan dapat berbentuk laporan terpisah atau terintegrasi dengan laporan keuangan.

   Indikator Kinerja Sosial: Penggunaan indikator kinerja sosial adalah metode lain untuk mengungkapkan dampak sosial. Indikator ini digunakan untuk mengukur dan melacak kinerja sosial perusahaan dalam berbagai aspek, seperti tenaga kerja, komunitas, hak asasi manusia, dan lingkungan. Indikator ini membantu dalam menggambarkan dampak sosial secara kuantitatif dan membandingkannya dari waktu ke waktu. Referensi: Social Performance Task Force.

Metode Pelaporan dalam Akuntansi Sosial

Pelaporan akuntansi sosial memainkan peran penting dalam memberikan informasi kepada *stakeholder* tentang kinerja sosial dan lingkungan perusahaan. Dalam pelaporan akuntansi sosial, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pelaporan akuntansi sosial. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam pelaporan akuntansi sosial:

1. Keterbukaan (*Transparency*):
   Pelaporan akuntansi sosial harus transparan dan memberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang dampak sosial dan lingkungan perusahaan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*):
   Pelaporan akuntansi sosial harus mempertanggungjawabkan perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan mereka.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN SEKTOR PUBLIK

3. Relevansi (*Relevance*):
   Pelaporan akuntansi sosial harus memberikan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan untuk memahami dampak sosial dan lingkungan perusahaan dan mengambil keputusan yang tepat.
4. Komprehensibilitas (*Comprehensibility*):
   Pelaporan akuntansi sosial harus mudah dimengerti oleh semua pemangku kepentingan yang ditujukan.
5. Keterbandingan (*Comparability*):
   Pelaporan akuntansi sosial harus memungkinkan perbandingan yang mudah antara perusahaan dan sektor industri yang serupa.

Format Pelaporan Akuntansi Sosial:

Pelaporan akuntansi sosial dapat dilakukan dalam berbagai format, sebagaimana berikut ini :

1. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*):
   Merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang kinerja perusahaan dalam aspek-aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Laporan ini mencakup kebijakan, tujuan, indikator kinerja, dan upaya perusahaan dalam mempengaruhi dampak sosial dan lingkungan.
2. Laporan Tahunan Terintegrasi (*Integrated Annual Report*):
   Merupakan laporan yang menggabungkan informasi keuangan dan non-keuangan dalam satu dokumen. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami hubungan antara kinerja keuangan dan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan.
3. Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR Report*):
   Merupakan laporan yang memberikan gambaran tentang upaya perusahaan dalam mencapai tanggung jawab sosial dan dampaknya pada pemangku kepentingan.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTANSI PENDIDIKAN DAN SEKTOR PUBLIK

Isu-Isu Terkait dengan Pelaporan Akuntansi Sosial:

Pengukuran dan Metrik: Menentukan metode pengukuran yang tepat untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan dapat menjadi tantangan. Pengembangan metrik yang relevan dan akurat adalah penting untuk menghasilkan informasi yang dapat diandalkan.

1. Kepatuhan dan Standar: Pelaporan akuntansi sosial dapat didasarkan pada kerangka kerja dan standar yang berbeda, seperti Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), atau ISO 26000. Memastikan kepatuhan dan konsistensi dengan standar yang relevan adalah penting.
2. Transparansi dan Akurasi: Penting untuk memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dalam akuntansi sosial akurat, valid, dan tidak menyesatkan. Transparansi yang tinggi dalam pelaporan dan metode verifikasi yang objektif dapat membantu mengatasi isu ini.
3. Pemangku Kepentingan: Menyertakan pemangku kepentingan yang relevan dalam proses pelaporan akuntansi sosial dapat memastikan bahwa isu-isu yang penting bagi mereka dipertimbangkan secara memadai.
4. Integrasi dengan Akuntansi Keuangan: Integrasi akuntansi sosial dengan akuntansi keuangan tradisional adalah isu yang penting. Menggabungkan informasi keuangan dan non-keuangan dalam pelaporan yang terintegrasi memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pelaporan, memilih format yang sesuai, dan mengatasi isu-isu terkait, pelaporan akuntansi sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam memahami dan mengelola dampak sosial dan lingkungan perusahaan secara transparan dan bertanggung jawab.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, KONSULTANSI, KADA DAN SEKTOR PUBLIK

D.Akuntansi untuk Pengurangan Dampak Sosial

Akuntansi dapat berperan dalam mengurangi dampak sosial melalui beberapa cara yang telah diakui dalam literatur akademik dan praktik bisnis. Berikut adalah beberapa contoh rinci tentang bagaimana akuntansi dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak sosial:

1. Identifikasi dan Pengukuran Dampak Sosial:
   Melalui penggunaan metode pengukuran dan evaluasi yang tepat, akuntansi dapat membantu organisasi mengidentifikasi dan mengukur dampak sosial dari kegiatan bisnis mereka. Dengan mengetahui dan memahami dampak sosial yang dihasilkan, organisasi dapat mengidentifikasi area-area di mana dampak negatif terjadi dan mengambil tindakan yang tepat untuk menguranginya. Selain itu, pengukuran dampak sosial juga memungkinkan organisasi untuk melacak kemajuan mereka dalam mengurangi dampak sosial seiring waktu.
2. Pengembangan Praktik Bisnis Berkelanjutan:
   Akuntansi dapat mendukung pengembangan dan implementasi praktik bisnis berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi dampak sosial. Dengan menggunakan informasi akuntansi tentang biaya lingkungan dan sosial yang terkait dengan kegiatan bisnis, organisasi dapat membuat keputusan yang berkelanjutan, seperti investasi dalam teknologi hijau, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, atau upaya CSR yang relevan
3. Pelaporan dan Transparansi:
   Akuntansi sosial mendorong organisasi untuk melakukan pelaporan dan transparansi yang lebih baik terkait dengan dampak sosial mereka. Melalui laporan keberlanjutan dan laporan non-keuangan, organisasi dapat mengkomunikasikan informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka kepada pemangku kepentingan. Pelaporan yang transparan memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami dampak sosial

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEI KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

yang dihasilkan oleh organisasi dan mempengaruhi praktik bisnis mereka

4. Pengembangan Standar dan Kerangka Kerja:
   Akuntansi berperan dalam pengembangan standar dan kerangka kerja yang mempromosikan praktik bisnis berkelanjutan dan membantu mengurangi dampak sosial. Contohnya adalah *Global Reporting Initiative* (GRI) yang menyediakan kerangka kerja untuk pelaporan keberlanjutan, serta *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB) yang mengembangkan standar akuntansi berkelanjutan yang spesifik untuk sektor industri tertentu. Standar dan kerangka kerja ini membantu organisasi mengidentifikasi dan melaporkan dampak sosial secara konsisten dan komprehensif.

Penting untuk dicatat bahwa akuntansi sosial hanyalah satu aspek dari upaya yang lebih luas dalam mengurangi dampak sosial. Penting juga untuk mengadopsi pendekatan yang terintegrasi yang melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, pemikiran strategis, dan perubahan organisasi yang mendalam untuk mencapai pengurangan dampak sosial yang signifikan.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

BAB 9 PENGUKURAN DAN PELAPORAN EMISI KARBON

Yennisa, M.Sc., Ak., CA., CTA.
Universitas PGRI Yogyakarta

A. Pengantar Emisi Karbon dan Perubahan Iklim

Kegiatan bisnis dan industri berdampak dalam kualitas udara dan perubahan iklim global. Hal ini disebabkan oleh emisi dari senyawa kimia yang dihasilkan dalam aktivitas bisnis dan industri. Emisi karbon (CO_2) dalam konteks bisnis dan industri dihasilkan dari aktivitas pembakaran minyak, batu bara, gas alam dan limbah dari energi yang digunakan. *Greenhouse gases* (GHG) yang menembus atmosfir dapat mengganggu keseimbangan radiasi. Hal ini berdampak pada peningkatan temperatur permukaan bumi dapat menyebabkan perubahan iklim, peningkatan debit air lalu serta berpengaruh pada agrikultur di seluruh dunia.

Aktifitas bisnis dan industri yang berdampak lansung terhadap perubahan iklim dianggap sebagai salah satu masalah keberlanjutan (*sustainability*). Beberapa negara di Eropa sangat peduli dengan isu keberlanjutan ini terutama negara yang tergabung dalam European-Union (EU). Negara yang tergabung dalam G20 juga aktif menggagas beberapa inisiatif dan komitmen dalam mengurangi emisi karbon (European Investment Bank 2022). Deklarasi G20 di Roma tahun 2021 salah satunya adalah mengusung tema *low carbon emission* dengan

mendukung inovasi dalam teknologi terbarukan yang ramah lingkungan termasuk bioenergi keberlanjutan.

Emisi karbon dari negara berkembang di Asia (tidak termasuk Cina) meningkat pada tahun 2022 melebihi wilayah manapun juga di dunia. Lebih dari 50% peningkatan ini berasal dari pembangkit listrik tenaga uap batu bara (IEA 2023). Internasional Energi Agency (IEA) dalam laporan tahunannya menyimpulkan analisis data tentang perubahan emisi karbon dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam laporan tahun 2022 menyebutkan beberapa sumber peningkatan emisi karbon global yang berasal dari pembakaran energi dan proses industri, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembakaran minyak
2. Sektor energi
3. Ketergantuan pada batu bara dan gas yang digunakan pada cuaca ekstrim (musim dingin ataupun panas)

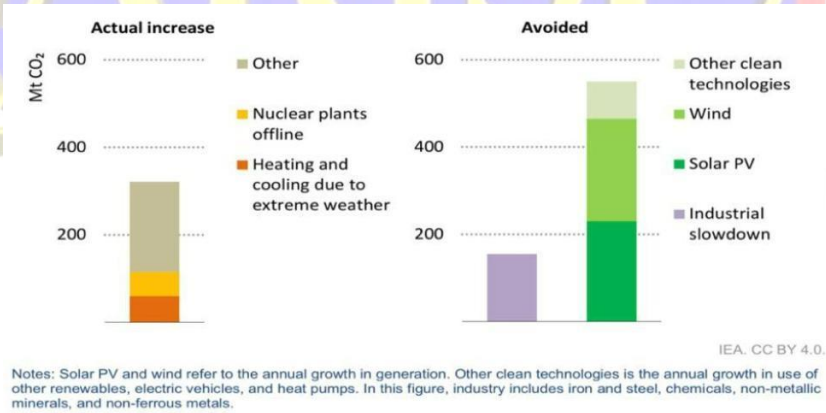

Gambar 9.1. Perubahan Emisi Karbon Global Berdasarkan Faktor Pemicu dari Tahun 2021-2022

Sumber : https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022

B. Pengukuran Emisi Karbon

Identifikasi emisi karbon terdiri dari tiga cakupan (WBCSD and WRI 2015)

Cakupan 1 : Emisi langsung (untuk aktivitas yang secara lansung dikendalikan oleh entitas), biasanya dihasilkan dari beberapa tipe aktivitas berikut ini;

1. Emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar untuk pembangkit listrik misalnya; *boilers*, *furnaces*, *turbines*
2. Emisi yang dihasilkan dari proses kimia, biasanya dihasilkan dari kegiatan manufaktur atau pemrosesan kimia dan bahan baku, misalnya; semen, aluminium, adipic acid, ammonia manufacture dan pemrosesan limbah.
3. Emisi yang dihasilkan dari transportasi yang ditujukan untuk bahan baku, produk, limbah dan karyawan. Emisi ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar atas kendaraan yang dimiliki oleh entitas/perusahaan, misalnya; truk, kapal, pesawat udara, bus dan kendaraan bermotor lainnya.
4. Emisi yang dihasilkan secara tidak sengaja pada kegiatan produksi dan penyediaan bahan bakar.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Cakupan 2 : emisi tidak langsung (dihasilkan dari penggunaan listrik, alat penghangat dan pendingin ruangan)

Penggunaan listrik dalam entitas bisnis/industri merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar. Dalam jangka panjang diharapkan bahwa industri bisa mengurangi penggunaan listrik dengan melakukan investasi dalam inovasi *green power markets.*

Emisi yang dihasilkan dari transmisi dan distribusi energi listrik (T&D). Hal ini ditujukan untuk perusahaan penyedia energi listrik. Penghitungan emisi bagi perusahaan ini adalah sejumlah penggunaan listrik yang dikonsumsi selama T&D. Sementara itu kostumer akhir melaporkan T&D pada cakupan 3.

Cakupan 3 : emisi tidak lansung lainnya (dihasilkan dari kegiatan hulu (*upstream)* dan hilir (*downstream)* yang terdapat dalam aktivitas *supply and retail chain*).

Emisi dalam *cakupan* 3 bersifat tidak lansung yang muncul dari sumber yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan. Contoh kegiatan industri yang termasuk dalam cakupan ini adalah aktivitas ekstraksi dan produksi material yang dibeli; mengangkut bahan bakar yang dibeli baik pada kendaraan yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan serta penggunaan akhir produk jasa.

Emisi tidak lansung lainnya juga dapat berasal dari penguraian limbah organisasi. Selain itu juga berasal dari proses manufaktur barang yang dibeli dan emisi fugitif di fasilitas yang tidak dimiliki oleh perusahaan. Secara dasar yang membedakan cakupan 1 dan 2 dengan cakupan 3 adalah sebagai berikut;

1. Memiliki kontribusi secara signifikan terhadap emisi tidak lansung lainnya yang diantisipasi secara total oleh organisasi
2. Menawarkan potensi pengurangan yang dapat dilakukan atau dipengaruhi oleh organisasi
3. Berkontribusi terhadap risiko terkait dengan perubahan iklim, seperti keuangan, regulasi, rantai pasokan, produk dan langganan serta litigasi dan risiko reputasi
4. Material bagi pemangku kepentingan seperti pelanggan, pemasok, investor atau masyarakat sipil
5. Hasil dari kegiatan alih daya yang sebelumnya dilakukan internal atau yang biasanya dilakukan internal oleh perusahaan lain dalam sektor yang sama
6. Signifikan dalam sektor perusahaan
7. Memenuhi kriteria tambahan untuk menentukan relevansi yang dikembangkan oleh organisasi atau organisasi dalam sektornya.

Perusahaan juga dapat menggunakan kategori dan kegiatan hulu/hilir sbb:

Kategori hulu

1. Barang dan jasa yang dibeli
2. Barang modal
3. Kegiatan terkait bahan bakar dan energi (selain dari cakupan 1 dan 2)

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN PEMILU, KONSTITUSI, PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

4. Distribusi dan transportasi hulu
5. Limbah yang dihasilkan dalam operasi
6. Perjalanan bisnis
7. Karyawan komuter
8. Aset disewa di hulu lainnya

Kategori hilir
1. Distribusi dan transportasi hilir
2. Pengolahan produk terjual
3. Penggunaan produk terjual
4. Penanganan pada akhir masa pakai produk terjual
5. Aset disewa hilir
6. Waralaba
7. Investasi hilir lainnya

Langkah dalam identifikasi dan perhitungan emisi karbon

No	Tahapan identifikasi dan penghitungan emisi karbon	Rincian aktivitas
1	Identifikasi sumber	Terdapat empat sumber diantaranya; *stationary combustion, mobile combustion, process emissions* dan *fugitive emmisions*. Sumber emisi ini dapat diidentifikasi kembali melalui tiga cakupan.
2	Memilihi pendekatan perhitungan	Pendekatan umum menggunakan IPCC Guidelines (1996 atau 2006)
3	Memilih data aktivitas dan faktor emisi	Entitas merinci aktivitas yang menyebabkan emisi karbon berdasarkan cakupannya. Misalnya untuk entitas kecil cakupan 1 akan dihitung berdasarkan kuantitas pembelian dari bahan bakar

No	Tahapan identifikasi dan penghitungan emisi karbon	Rincian aktivitas
		yang diperdagangkan menggunakan faktor emisi yang telah ditetapkan (IPCC).
4	Menerapkan alat perhitungan	Terdapat dua alat perhitungan yaitu; (1) *cross-sector tools* yang dapat diterapkan pada beragam sektor dan (2) *sector-spesific tools* yang dirancang untuk menghitung emisi yang spesifik misalnya di industri alumunium, baja, semen, migas, dll.
5	Menyimpulkan data pada level entitas	Pengelolaan pengumpulan data dapat mempertimbangkan aspek berikut ini; (1) melindungi akses database (intranet maupun internet); (2) membuat *spreadsheet templates* yang akan didistribusi ke semua divisi; (3) Entri data dalam database perusahaan; (4) sentralisasi dalam proses aktivitas pelaporan atas perhitungan emisi karbon dan (5) desentralisasi laporan perhitungan emisi karbon yang telah disetujui pada level perusahaan

Pada tahapan menyimpulkan data maka entitas harus membedakan dua pendekatan;

1. Pendekatan sentralisasi dimana;
   Emisi karbon yang dihitung pada level entitas/perusahaan diperoleh dengan cara sbb;
   Data aktivitas * faktor emisi
   Pendekatan ini cocok digunakan untuk *office-based organizations* yang melakukan permintaan fasilitas laporan aktivitas/bahan bakar yang digunakan;
   a. SDM/divisi dapat menghitung emisi data secara lansung berdasarkan aktivitas/penggunaan bahan bakar
   b. Perhitungan emisi adalah standar melalui sejumlah fasilitas

   Contoh aktivitas yang dilaporkan pada level entitas/perusahaan adalah; data aktivitas transportasi, data aktivitas untuk proses emisi (jumlah pupuk yang diproduksi), konsumsi listrik.
2. Pendekatan desentralisasi dimana;
   Emisi karbon yang dihitung dari data aktivitas yang dikalikan dengan faktor emisi akan didistribusikan pada level entitas/perusahaan. Pendekatan ini biasanya digunakan;
   a. Perhitungan emisi karbon mensaratkan pengetahuan menyeluruh untuk peralatan apa saja yang digunakan
   b. Metode perhitungan emisi karbon beragam
   c. Proses emisi berkontribusi dalam emisi karbon secara keseluruhan
   d. Terdapat sumber pelatihan yang memadai bagi SDM untuk melaksanakan perhitungan dan audit
   e. Terdapat alat yang mudah untuk digunakan dalam perhitungan dan pelaksanaan pelaporan oleh SDM
   f. Terdapat regulasi internal yang mensaratkan pelaporan emisi karbon

   Contoh kategori data diantara lain adalah; deskripsi metode perhitungan emisi karbon dan jika ada perubahan dari laporan sebelumnya, indikator rasio yang digunakan serta

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

rincian referensi data yang digunakan untuk perhitungan dalam penggunaan faktor emisi untuk menentukan faktor emisi berdasarkan kategori dan cakupan

Gambar 9.2. Faktor emisi berdasarkan IPCC dalam *Emission Factor Database* (IPCC n.d.)

Sumber: entitas dapat mengakses https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/find_ef.php?ipcc_code=1&ipcc_level=0

C. Laporan Emisi Karbon

Entitas/perusahaan mengikuti panduan pengungkapan 305-1 untuk cakupan 1. Adapun kualifikasi informasi yang harus dipenuhi dalam pengungkapan laporan:

1. Emisi karbon (cakupan 1) lansung kotor dalam satuan metrik ton setara CO_2
2. Gas yang ada dalam perhitungan misalnya; CO2, CH4, HCF
3. Emisi CO2 biogenik dalam satuan metrik ton setara CO2
4. Tahun dasar untuk penghitungan, meliputi; (i) alasan untuk memilihnya, (ii) emisi pada tahun dasar dan (iii) konteks untuk setiap perubahan yang signifikan dalam emisi yang memicu penghitungan ulang emisi tahun dasar
5. Sumber faktor emisi dan nilai potensi pemanasan global (GWP) yang digunakan atau referensi sumber GWP
6. Pendekatan konsolidasi untuk emisi; apakah porsi ekuitas, pengendalian finansial atau pengendalian operasional
7. Standar, metologi, asumsi dan alat perhitungan yang digunakan

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Pertimbangan khusus ketika menyusun informasi pada pengungkanan 305-1 adalah sebagai berikut;

1. Tidak memasukkan perdagangan emisi dalam penghitungan emisi bruto
2. Melaporkan emisi CO_2 biogenik dari pembakaran atau biodegradasi biomassa secara terpisah dari emisi karbon (cakupan 1) lansung kotor. Tidak memasukkan emisi biogenik lain (CH_4 dan N_2) dan emisi biogenik dari CO_2 yang terjadi dalam siklus hidup biomassa selain dari pembakaran atau biodegradasi.

Rekomendasi pelaporan untuk cakupan 1

1. Menerapkan faktor emisi dan nilai GWP secara konsisten untuk setiap data yang diungkapkan
2. Menggunakan nilai GWP dari IPCC
3. Menggunakan pendekatan yang konsisten untuk proses konsolidasi emisi karbon lansung (cakupan 1) dan emisi cakupan 2 tidak lansung
4. Mengungkapkan justifikasi ketika menggunakan standar yang berbeda
5. Transparasi dan komparabilitas berdasarkan unit bisnis/fasilitas, negara, jenis sumber dan jenis kegiatan

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN OPINI PUBLIK

Panduan 305-2 untuk emisi karbon cakupan 2 tidak lansung, adapun persyaratan pelaporan adalah sbb;

1. Emisi cakupan 2 tidak lansung kotor berdasarkan lokasi dalam metrik ton setara CO2
2. Jika ada, emisi karbon cakupan 2 tidak lansung kotor berdasarkan pasar dalam metrik ton setara CO2
3. Jika ada, gas yang termasuk dalam perhitungan seperti; CO2, CH4, N2O, dll
4. Tahun dasar untuk perhitungan meliputi; (i) alasan pemilihan; (ii) emisi pada tahun dasar dan (iii) konteks untuk setiap perubahan yang signifikan dalam emisi yang memicu penghitungan ulang emisi tahun dasar
5. Sumber faktor emisi dan nilai potensi (GWP) yang digunakan atau referensi

6. Pendekatan dalam konsolidasi
7. Standar, metodologi, asumsi dan alat perhitungan yang digunakan

Pertimbangan khusus yang digunakan dalam menyusun informasi pada pengungkapan 305-2 adalah sbb;

1. Tidak memasukkan perdagangan emisi karbon dalam penghitungan emisi bruto
2. Tidak memasukkan emisi karbon (cakupan 3) tidak lansung lainnya
3. Mengungkapkan emisi karbon cakupan 2 tidak lansung berbasis pada metode berdasarkan lokasi, jika organisasi beroperasi di pasar tanpa memiliki data khusus pemasok atau produk
4. Mengungkapkan dan melaporkan emisi karbon (cakupan 2) tidak lansung berbasir pada metode berdasarkan lokasi dan berdasarkan pasar, jika entitas beroperasi di pasar dengan memberi data khusus pemasok atau produk dalam bentuk instrumen kontrak

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Rekomendasi pelaporan cakupan 2;

1. Menerapkan faktor emisi dan nilai GWP secara konsisten untuk data yang diungkapkan
2. Menggunakan nilai GWP dari IPCC
3. Menggunakan pendekatan konsisten dalam proses konsolidasi emisi lansung cakupan 1 dan emisi cakupan 2 tidak lansung
4. Mengungkapan justifikasi ketika menggunakan metodologi yang berbeda
5. Transparansi dan komparabilitas berdasarkan unit bisnis atau fasilitas, negara, jenis sumber dan jenis kegiatan

Panduan 305-3 untuk emisi karbon cakupan 3 tidak lansung lainnya, adapun persyaratan pelaporan adalah sbb;

1. Emisi cakupan 3 tidak lansung lainnya kotor berdasarkan lokasi dalam metrik ton setara CO2

2. Jika ada, gas yang termasuk dalam perhitungan seperti; CO2, CH4, N2O, dll
3. Emisi CO2 biogenik dalam metrik ton setara CO2
4. Kegiatan dan kategori emisi cakupan 3 tidak lansung lainnya dimasukkan dalam perhitungan
5. Tahun dasar untuk perhitungan meliputi; (i) alasan pemilihan; (ii) emisi pada tahun dasar dan (iii) konteks untuk setiap perubahan yang signifikan dalam emisi yang memicu penghitungan ulang emisi tahun dasar
6. Sumber faktor emisi dan nilai potensi (GWP) yang digunakan atau referensi
7. Standar, metodologi, asumsi dan alat perhitungan yang digunakan

Pertimbangan khusus yang digunakan dalam menyusun informasi pada pengungkapan 305-3 adalah sbb;

1. Tidak memasukkan perdagangan emisi karbon dalam penghitungan emisi bruto
2. Tidak memasukkan emisi karbon (cakupan 2) tidak lansung lainnya
3. Melaporkan emisi biogenik CO2 dari pembakaran atau biodegradasi biomassa yang muncul dalam rantai nilainya secara terpisah dari emisi bruto (cakupan 3) tidak lansung lainnya. Tidak memasukkan emisi biogenik jenis lain dan emisi biogenik dari CO2 yang terjadi dalam siklus hidup biomassa selain dari pembakaran atau biodegradasi

Rekomendasi pelaporan cakupan 3;

1. Menerapkan faktor emisi dan nilai GWP secara konsisten untuk data yang diungkapkan
2. Menggunakan nilai GWP dari IPCC
3. Menggunakan pendekatan konsisten dalam proses konsolidasi emisi lansung cakupan 1 dan emisi cakupan 2 tidak lansung
4. Membuat daftar emisi cakupan 3 tidak lansung lainnya dengan uraian berdasarkan kegiatan dan kategori hulu dan hilir

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN OPINI PUBLIK

5. Transparansi dan komparabilitas berdasarkan unit bisnis atau fasilitas, negara, jenis sumber dan jenis kegiatan

D.Regulasi dan Kebijakan tentang Emisi Karbon

Indonesia mendukung konsep berkelanjutan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper). Salah satu metodologi yang diusulkan Proper adalah *Life Cycle Assessment* (LCA) sebagai matriks keberlanjutan dan mendukung upaya penurunan emisi karbon dari tahun ke tahun(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2019).

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN,SURVEY,KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

BAB 10 AKUNTANSI ENERGI DAN AIR

Sobrotul Imtikhanah, S.E.,MSI
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

A. Pengenalan Akuntansi Energi dan Air

1. Akuntasi Energi

Akuntansi energi adalah cabang akuntansi baru yang menggabungkan teori dan metode akuntansi dengan ekonomi untuk memberikan informasi yang diperlukan bagi manajemen energi yang efisien dan promosi energi yang sepenuhnya berkelanjutan. Akuntansi energi berkaitan dengan pemahaman tentang bagaimana sistem akuntansi energi mengukur dan melaporkan kegiatan konservasi energi dan pengurangan polusi organisasi untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan dan perlindungan sumber daya alam (Goh dan Ang, 2019). Dari sudut pandang ekonomi, energi merupakan *input* (faktor produksi) dan *output* (produk) dari suatu proses. Oleh karena energi adalah *input* dan *output* dari setiap proses dan hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, energi input selalu terdiri dari bagian energi yang diubah menjadi energi yang berguna (jumlah energi yang tidak dapat di hindari yang diperlukan untuk melakukan proses) dan bagian lain dari energi (yang secara teoritis dapat dihindari, tetapi juga diperlukan dalam proses menghasilkan output) sehingga harus diklasifikasikan menjadi energi yang hilang atau sebagian besar menjadi limbah (Bierer & Götze, 2012).

Bhattacharyya (2019) mendefiniksan akuntansi energi sebagai sistem yang mencatat, menganalisis, dan melaporkan konsumsi dan biaya energi. Output yang dihasilkan akan memberikan gambaran tentang penggunaan energi sehingga dapat dilakukan pengamatan terhadap pusat biaya energi (energy cost center) yang menggunakan energi berlebih.

Menurut Almagtome & Abdlazez (2022) Terdapat beberapa fungsi akuntansi energi yaitu :

a. Fungsi pengelolaan dan pengendalian biaya energi
   Fungsi ini merupakan fungsi mengelola dan mengendalikan biaya konsumsi energi dalam unit ekonomi, menggunakan alat dan teknologi modern, berinvestasi dalam energi, dan menggunakan metode manajemen yang canggih untuk mencapai tujuan efisiensi energi.
b. Pengeluaran energi, pencegahan dan penanganan polutan
   Fungsi ini membutuhkan sistem akuntansi untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ditawarkan perusahaan kepada masyarakat sebagai bagian dari komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan efisiensi energi.
c. Fungsi penghematan manfaat energi dan pengurangan emisi.
   Fungsi ini melibatkan pengungkapan informasi dan investasi perusahaan dalam pengelolaan dan pencegahan polusi, seperti sistem pengelolaan lingkungan, insentif lingkungan, dll.

Dalam konteks akuntansi biaya, akuntansi biaya energi di anggap sebagai konsep akuntansi biaya parsial. Tujuannya adalah menghasilkan informasi yang di butuhkan manajemen tentang konsumsi energi yang digunakan oleh perusahaan, kerugian akibat konsumsi energi yang berlebihan maupun efesiensi biaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan (Bierer & Götze, 2012).

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEI, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Adapun tujuan dan manfaat akuntansi energi antara lain:

a. Berguna dalam menentukan rencana, target atau anggaran energi
b. Membantu dalam menghitung pemakaian energi tiap unit perbulan
c. Memberikan catatan konsumsi energi aktual
d. Memudahkan perbandingan unjuk kerja pemakaian energi aktual terhadap target
e. Menjelaskan variasi konsumsi energi dan grend konsumsi tiap bulan
f. Memudahkan penyelidikan dan pelaporan untuk kerja dan konservasi

2. Akuntansi air

Air merupakan sumberdaya yang banyak digunakan oleh semua orang dimuka bumi ini. Kekhawaritan tentang kekurangan air yaitu kekurangan pasokan air mutlak dalam domain tertentu dan kelangkaan air yaitu kelebihan permintaan air atas pasokan air yang tersedia merupakan tantangan global saat ini. Menurut FAO (2012) akuntansi air merupakan studi sistematis tentang status dan tren saat ini dalam pasokan, permintaan, aksesibilitas, dan penggunaan air di domain yang telah ditentukan. Dengan tata kelola air yang baik dan penerapan strategi penanggulangan yang tepat, tidak ada alasan tidak cukup air untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan lingkungan secara adil, berkelanjutan dan efisien, bahkan di daerah yang menghadapi peningkatan air yang cepat. Namun untuk mencapai tujuan ini, dalam banyak kasus, pertanian, yang merupakan sektor yang paling banyak mengonsumsi air, perlu mengurangi konsumsi terutama di daerah yang mengalami atau menghadapi peningkatan kelangkaan air (Karimi et al., 2013).

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Hadirnya akuntansi air dapat memberikan kerangka kerja yang solid dan sistematis untuk memperoleh, mengontrol kualitas, dan menganalisis informasi dan bukti terkait air. Menurut *Water Accounting Standards Board* (WASB, 2009), akuntansi air didefinisikan sebagai:

"a systematic process of identifying, recognising, quantifying, reporting, and assuring information about water, the rights and other claims to that water, and the obligations against that water"

Akuntansi air dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan untuk menjawab pertanyaan seperti: apa penyebab mendasar dari ketidakseimbangan pasokan air (kuantitas dan kualitas) dan permintaan pengguna dan penggunaan air yang berbeda. Apakah tingkat penggunaan air konsumtif saat ini berkelanjutan?, peluang apa yang ada untuk membuat penggunaan air lebih adil atau berkelanjutan?. Penghitungan air sering digunakan sebagai dasar penilaian multi-skalar untuk: 1) efisiensi atau produktivitas penggunaan atau pengguna air yang berbeda; dan 2) risiko bahwa upaya untuk meningkatkan efisiensi atau produktivitas air menghasilkan eksternalitas negatif, yaitu keuntungan seseorang dalam produktivitas air akan mengakibatkan berkurangnya akses orang lain terhadap air yang tidak tercemar (Batchelor, C.; Hoogeveen, J.; Faurès, J.M.; Peiser, 2016).

Beberapa tujuan akuntansi air menurut *Water Accouting Standar Board* (WASB) adalah :

a. Menyediakan informasi yang relevan, andal, sebanding dan dapat dimengerti
b. Memberikan informasi kepada pengguna tentang bagaimana sumber daya air diperoleh, dikelola, dibagikan, dan digunakan selama periode pelaporan
c. Meningkatkan kepercayaan pengguna air terkait dengan keputusan investasi. Keputusan tentang alokasi sumber daya dapat mencakup keputusan tentang pengelolaan atau perdagangan air dan hak atau kewajiban air dari

waktu ke waktu, atau penyediaan pelayanan yang berhubungan dengan air. Investasi juga dapat berupa pemberian dana kepada manajemen entitas laporan air, atau kebutuhan untuk membangun infrastruktur tambahan untuk menyimpan air.

Adapun manfaat akuntansi air terbagi menjadi manfaat untuk penyedia air dan pengguna air. Manfaat bagi penyedia air adalah (1) Kesempatan menunjukan kepada khalayak tentang hak pengurusan akan barang publik, (2) Memenuhi kewajiban beberapa pelaporan sekaligus laporan (3) Mempunyai potensi untuk berbagi informasi kepada *stake holder* tentang sumber daya air. Sedangkan keuntungan bagi pengguna adalah;(1) Memperoleh akses informasi penting tentang *core* bisnis misalnya hak atas air, klaim atas air, dan kewajiban atas air, (2) Meningkatkan relevansi dan keterbandingan informasi, melalui penggunaan standar dan (3) Memperoleh Keandalan informasi yang terjamin

B. Pengukuran dan Pelaporan Konsumsi Energi dan Air

1. Pengukuran dan Pelaporan Konsumsi Energi

Pengungkapan konsumi energi pada suatu entitas di atur dalam GRI (*Global Reporting Initiave*) No 302 yang di susun oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSSB) sebagai pedoman perusahaan dalam melaporkan konsumsi energy (GRI, 2016). Menurut GRI 302 suatu organisasi dapat mengkonsumsi energi dalam berbagai bentuk, seperti bahan bakar, listrik, pemanasan, pendinginan, atau uap. Energi dapat dihasilkan sendiri atau dibeli dari sumber eksternal dan dapat berasal dari sumber daya terbarukan (seperti angin, air, atau solar) atau dari sumber daya tak terbarukan (seperti batu bara, minyak bumi, atau gas alam). Menggunakan energi dengan lebih efisien dan memilih sumber daya energi terbarukan sangat penting untuk

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

memerangi perubahan iklim dan menurunkan dampak organisasi secara keseluruhan terhadap lingkungan.

Standar GRI 302 ini mencakup pengungkapan dengan topik spesifik yang terdiri dari : (1) pengungkapan 302-1 Konsumsi energi dalam organisasi (2) Pengungkapan 302-2 Konsumsi energi di luar organisasi (3) Pengungkapan 302-3 Intensitas energi (4) Pengungkapan 302-4 Pengurangan konsumsi energi dan (5) Pengungkapan 302-5 Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa.

Pengukuran konsumsi energi dalam organisasi diihitung dalam joule atau kelipatannya dengan formula: Konsumsi energi total dalam organisasi = Bahan bakar tak terbarukan yang dikonsumsi + Bahan bakar terbarukan yang dikonsumsi+Listrik, pemanasan, pendinginan, dan uap yang dibeli untuk konsumsi + Listrik, pemanasan, pendinginan, dan uap yang dihasilkan sendiri, yang tidak dikonsumsi - Listrik, pemanasan, pendinginan, dan uap yang dijual

Pengukuran konsumsi energi total diluar organisasi dihitung dalam joule atau kelipatannya dengan membuat daftar konsumsi energi di luar organisasi, dengan perincian berdasarkan kategori dan kegiatan hulu dan hilir. Kegiatan hulu misalnya: barang dan jasa yang dibeli, barang modal, aktivitas terkait bahan bakar dan energi (tidak tercakup dalam Pengungkapan energi dalam organisasi), distribusi dan transportasi hulu, limbah yang dihasilkan dalam operasi, perjalanan bisnis, pulang pergi karyawan , aset yang disewa di hulu. Kategori hilir misalnya:distribusi dan transportasi hilir,pengolahan produk terjual, penggunaan produk terjual, penanganan pada akhir masa pakai produk terjual,aset disewa di hilir, waralaba, investasi hilir lainnya.

Pengukuran intensitas energi digunakan rasio intensitas penggunaan energi dari waktu kewaktu. Sedangkan pengukuran pengurangan konsumsi energi terjadi karena konversi dan pemasangan tambahan (*retrofit)* pada peralatan; perancangan ulang proses; perubahan

LARISDA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTORAL PUBLIK

perilaku; kecuali pengurangan yang disebabkan menurunnya kapasitas produksi atau pengalihdayaan.

Menurut Baskoro fajar (2015) dalam pengukuran dan pelaporan konsumsi energi perlu diketahui tentang beberapa langkah dalam akuntansi energi antara lain:

a. Pengumpulan data penggunaan energi
   Meliputi pemakaian energi dan biaya energi keseluruhan (*overall energy utilization dan overall energy cost),* konsumsi tiap jenis energi untuk produksi dan jumlah tiap jenis produksi dan faktor lain.
b. Pengelompokan data energi
c. Penyusunan pusat biaya energi
d. Penyusunan neraca energi dan laporan konsumsi energi
e. Analisis data
f. Pelaporan yang berhubungan dengan biaya energi

2. Pengukuran dan Pelaporan Konsumsi Air

Pengungkapan informasi pelaporan air sebagai dasar akuntansi air *(water accounting)* dipengaruhi oleh kesadaran pertanggungjawaban penggunaan air. Pengungkapan informasi secara naratif dan bahkan menggunakan data kuantitatif (GRI Standards 303). Proses ini mengindikasikan telah adanya kesadaran terkait pentingnya air dan pelaporan akan penggunaan air sebagai rekomendasi penerapan pelaporan air (Nasir, et al. 2014; Febiola, 2018)

Saat ini penggunaan standar akuntansi air di Indoneia belum secara spesifik diatur. Standar pelaporan akuntansi air telah banyak digunakan oleh pemerintah Australia. Standar Akuntansi Air di Australia telah mengatur secara lengkap tentang kerangka konseptual akuntansi air, pengakuan dan pengukuran air yang tertuang dalam *Australian Water Accounting Standard 1* yang di keluarkan oleh *Water Accounting Standards Board.* Menurut Standar tersebut basis akuntansi yang digunakan dalam akuntansi air adalah *accrual basis.* Ruang lingkup akuntansi air yang diatur dalam standar ini meliputi air yang berada didalam bumi dan atas siklus air

yang terkait dengannya, tidak termasuk air laut dan atmosfer dan siklus air laut. Jadi akuntansi air hanya fokus pada air yang digunakan untuk tujuan tertentu yang tergantung pada alam yang relatif dapat diukur dan digunakan untuk tujuan pelaporan akuntansi air. Atribut air dapat diukur dengan berbagai cara misalnya dengan melihat volume, salinitas, dan nilai moneter. Dalam hal ini pengukuran air diukur dengan menggunakan volume.

Adapun unsur-unsur dalam laporan akuntansi air meliputi:

a. *Water assets*; (asset air)
b. *Water liabilities;* (kewajiban air)
c. *Net water assets*;(aset air bersih)
d. *Changes in water assets;* (perubahan aset air)
e. *Changes in water liabilities* (perubahan Kewajiban air)

Laporan akuntansi air terdiri dari :

a. Pernyataan Kontekstual

   Pernyataan Kontekstual harus memberikan informasi yang membantu pengguna laporan akuntansi air untuk memahami aspek fisik dan administratif entitas laporan air. Ini harus berisi informasi kontekstual tentang aset air dan kewajiban air entitas pelapor air, termasuk setiap kondisi, atau variasi kondisi, yang berdampak pada pengelolaan aset air dan kewajiban air tersebut. Informasi kontekstual tentang aset air dan kewajiban air dari entitas pelapor air misalnya, mencakup perincian lokasi geografis air dan volume penyimpanan sebenarnya dibandingkan dengan total volume penyimpanan air memungkinkan.

b. Pernyataan Akuntabilitas

   Pernyataan akuntabilitas harus memberikan informasi yang membantu pengguna laporan akuntansi air untuk menilai apakah laporan tersebut telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Air yang berlaku. Dalam hal laporan akuntansi air belum disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Air yang berlaku, informasi berikut

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN MENADA DAN KINDOK PUBLIK

harus diungkapkan dalam Pernyataan Akuntabilitas mengenai; (1) sifat ketidakpatuhan; (2) alasan ketidakpatuhan; dan (3) rujukan ke pengungkapan lain dalam laporan akuntansi air yang memberikan informasi lebih lanjut yang relevan dengan ketidakpatuhan.

c. Pernyataan Aset Air dan Kewajiban Air
Pernyataan aset air dan kewajiban air harus menyajikan informasi pada tanggal pelaporan berupa volume atas (1) asset air (2) kewajiban air (3) aset air bersih.

Suatu pos yang memenuhi definisi aset air diakui dalam Pernyataan aset air dan kewajiban air hanya jika: a) kemungkinan besar manfaat masa depan terkait dengan item tersebut akan diperoleh oleh entitas pelapor air atau pemangku kepentingan entitas pelapor air; dan b) volume item dapat diukur dengan konsisten dan andal.

Manfaat yang terkandung dalam aset air dapat di peroleh dengan beberapa cara misalnya: a) digunakan secara tunggal atau dalam kombinasi dengan sumber daya atau aset air lainnya; b) ditukar dengan aset air lainnya atau dijual; c) digunakan untuk menyelesaikan kewajiban air atau kewajiban lainnya; atau d) didistribusikan kepada pemangku kepentingan entitas pelapor air.

3. Pernyataan Perubahan Aset Air dan Kewajiban Air

Laporan Perubahan Aset Air dan Kewajiban Air harus berisi informasi yang membantu pengguna laporan akuntansi air untuk memahami perubahan volume dan sifat aset air bersih entitas laporan air selama periode pelaporan. Pernyataan Perubahan Aset Air dan Kewajiban Air memberikan informasi tentang transaksi, transformasi dan peristiwa yang menimbulkan perubahan aset air atau perubahan kewajiban air, terlepas dari apakah transaksi, transformasi atau peristiwa tersebut mewakili aliran air. Misalnya, alokasi yang tidak terpakai mewakili volume air yang diwajibkan oleh entitas laporan air tersedia untuk

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN OPINI PUBLIK

diambil dan diserahkan pada tanggal pelaporan sebagai konsekuensi dari penentuan alokasi dan pengumuman sebelum akhir periode pelaporan berdasarkan rencana pembagian air. Alokasi yang tidak terpakai diakui sebagai kewajiban air pada tanggal pelaporan. Saldo liabilitas alokasi yang tidak terpakai berubah dari satu periode pelaporan ke periode berikutnya karena ada beberapa hal yaitu (a) meningkat sebagai akibat dari penentuan alokasi dan pengumuman yang dibuat selama periode pelaporan; (b) berkurang sebagai akibat keluarnya air secara fisik untuk menyelesaikan alokasi; dan (c) peristiwa lain seperti penyesuaian evaporasi diterapkan pada alokasi yang tidak terpakai sesuai dengan rencana pembagian air.

Pernyataan Perubahan Aset Air dan Hutang Air harus memuat pos-pos yang menunjukkan volume berikut untuk periode pelaporan:

a. Aset air meningkat;
b. Aset air berkurang;
c. Kewajiban air meningkat;
d. Kewajiban air menurun; dan
e. Perubahan aset air bersih.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Suatu pos yang memenuhi definisi perubahan aset air atau perubahan kewajiban air diakui dalam Pernyataan Perubahan Aset Air dan Kewajiban Air hanya jika:

a. Kemungkinan besar telah terjadi perubahan aset air atau perubahan kewajiban air;
b. Aset air atau liabilitas air yang mengalami kenaikan atau penurunan diakui dalam laporan aset air dan kewajiban air; dan
c. Volume perubahan aset air atau liabilitas air dapat diukur dengan ketepatan representasional

4. Pernyataan Aliran Air

Pernyataan Aliran Air memberikan informasi tentang transaksi, transformasi, dan peristiwa yang menimbulkan aliran air selama periode pelaporan. Misalnya, dalam kasus kewajiban air yang timbul dari alokasi yang tidak digunakan, Pernyataan Aliran Air:

a. Termasuk dampak dari penurunan kewajiban air akibat aliran keluar air untuk menyelesaikan alokasi yang diumumkan; Dan
b. Tidak termasuk pengaruh penentuan alokasi dan pengumuman yang dibuat selama periode pelaporan yang tetap tidak terkirim pada tanggal pelaporan.

Hal ini karena belum menimbulkan aliran air selama periode pelaporan. Pernyataan Aliran Air harus mencakup item baris yang menyajikan volume berikut untuk periode pelaporan: (1) aliran air;(2) Aliran air keluar;(3) perubahan penyimpanan air; (3) membuka tempat penyimpanan air; Dan (4) menutup tempat penyimpanan air.

5. Pengungkapan catatan

Informasi yang harus di ungkapkan dalam catatan akuntansi air adalah (1) kecuali untuk informasi aliran air, laporan akuntansi air telah disusun dengan menggunakan basis akrual akuntansi air; (2) ringkasan kebijakan akuntansi air signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan akuntansi air; (3) informasi yang disyaratkan untuk diungkapkan oleh standar ini yang tidak disajikan di tempat lain dalam laporan akuntansi air untuk tujuan umum; dan (4) setiap informasi tambahan yang tidak secara eksplisit disyaratkan oleh pernyataan ini yang relevan untuk dipahami yaitu tentang: aset air dan kewajiban air dari entitas pelapor air; dan pengelolaan aset air dan kewajiban air tersebut.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN OPINI PUBLIK

Untuk membantu pemahaman pengguna tentang informasi yang termasuk dalam laporan akuntansi air dan untuk memfasilitasi perbandingan, catatan biasanya disajikan dalam urutan sebagai berikut:

a. Ringkasan kebijakan akuntansi air yang signifikan
b. Informasi pendukung untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan akuntansi air secara berurutan dimana setiap pernyataan dan setiap item disajikan, termasuk: (a) informasi tentang penyajian kembali informasi komparatif (b) informasi tentang kesalahan periode lalu, (c) informasi tentang peristiwa non-penyesuaian setelah akhir periode pelaporan (d) informasi tentang pendekatan kuantifikasi, (e) rekonsiliasi dan informasi lain yang terkait dengan pernyataan aliran air
c. Catatan lain, termasuk informasi tentang prospek masa yang akan datang, aset air kontinjensi dan kewajiban air kontinjensi, aset air dan kewajiban air yang tidak memenuhi kriteria pengakuan, hak atas air, alokasi air, dan pembatasan air, kegiatan pasar air, air untuk manfaat lingkungan, sosial dan budaya, dan ekonomi, informasi segmen dan laporan akuntansi kelompok air

LAPISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

C. Efesiensi Energi dan Penghematan Air

Penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi untuk suatu hal yang tidak berguna. Sedangkan konservasi energi adalah penggunaan energi dengan efisiensi dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Menurut *International Energy Agency* (2022) menyatakan bahwa efesiensi energi penting karena dapat mngurangi biaya energi bagi entitas dan juga dapat meningkatkan kemanan energi di dunia. Masing-

masing negara melakukan efesiensi energi melalui beberapa cara antaralain: beralih ke bola lampu LED, menggunakan hemat energi peralatan elektronik, memasang sistem panel surya, mengurangi emisi karbon, penggunaan motor listrik untuk mengurangi penggunaan BBM pada sekto transportasi, pembangunan gedung dengan menggunakan teknik hemat energy, *green a*rsitektur, efesiensi konsumsi energi rumah tangga dan kampanye pemerintah untuk merubah perilaku masyarakat untuk menghemat energi.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memasukkan efisiensi energi sebagai salah satu komponen utama dalam mencapai keberlanjutan melalui pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dari semua negara sangat dianjurkan untuk menanamkan kebijakan perubahan iklim yang diterima secara global ke dalam kebijakan nasional terkait lingkungan untuk memastikan bahwa agenda keberlanjutan dapat tercapai secara keseluruhan. PBB telah menentukan sejumlah tema bisnis utama yang harus ditangani oleh setiap tujuan dan beberapa tema terkait langsung dengan peningkatan efisiensi energi; SDG7 (akses listrik, ketersediaan dan keandalan listrik, energi terbarukan, efisiensi energi, investasi infrastruktur, dan investasi lingkungan) dan SDG12 (sumber berkelanjutan, efisiensi sumber daya Pengelolaan energi berkelanjutan memainkan aspek penting dalam memenuhi target SDG7 dan SDG12 terutama di sektor konstruksi karena menggunakan hingga 80% dari total energi global sementara setengah dari jumlah tersebut terkait dengan sektor bangunan (Bimahardji, 2020a)

Selain efesiensi pada energi, penghematan air sebagai salah satu sumber energi juga dilakukan sebagai upaya mengatasi krisis air dimasa mendatang. Penghematan air dikenal dengan istilah *water conservation* yaitu upaya memelihara keberadaan dan keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan makhluk hidup sekarang dan masa depan. Adapun tolok ukur dari konservasi air yang mengacu pada penilaian dengan standar yang telah

ditetapkan oleh *Green Building Council Indonesia* adalah sebagai berikut: (a) Melakukan pemasangan alat meteran air yang ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu pada sistem distribusi air. (b) Menggunakan seluruh bekas pakai (*grey water*) yang telah didaur ulang untuk kebutuhan sistem *flushing atau cooling tower* Pemanfaatan air limbah menjadi air yang dapat dikonsumsi kembali melalui proses daur ulang air dengan teknologi tinggi seperti mengolah limbah air *grey water (*air *bathup, shower* atau bak mandi, air bekas mencuci pakaian baik dari mesin cuci atau ember-ember cucian, dan air bekas aktifitas dapur rumah tangga, gedung-gedung perkantoran maupun sekolah menjadi air yang dapat di konsumsi kembali. Selain itu juga dapat dilakukan pengolahan limbah *black water* (air yang dihasilkan dari aktifitas sehari-hari seperti *flushing toilets dan urinals*) yang di reduksi menjadi air yang layak pakai untuk kebutuhan sehari hari. Begitupula air kondensat digunakan untuk membuat kenyamanan suhu ruangan maupun pengawetan bahan makanan. (c) Menggunakan salah satu atau lebih dari tiga alternatif sebagai berikut: air kondensasi AC, air bekas wudhu, atau air hujan. (d). Menyediakan instalasi tangki penampungan air hujan (Bimahardji, 2020b) .

D.Kebijakan dan Regulasi Energi dan Air

Pelaporan akuntansi energi dan air merupakan salah satu bagian dari laporan akuntansi berkelanjutan (*sustainability report*). Laporan keberlanjutan adalah laporan yang menyajikan informasi ekonomik, sosial dan lingkungan yang dapat membantu perusahaan dalam menetapkan tujuan perusahaan, mengukur kinerja dan alat komunikasi dalam rangka menghadirkan operasi berkelanjutan. Penerapan sustainability accounting memiliki banyak manfaat bagi organisasi. Konsep mengenai sustainability accounting tidak hanya berfokus pada nilai-nilai finansial perusahaan, namun juga berfokus pada strategi keberlanjutan dari perusahaan (*sustainability strategy*). Regulasi akuntansi energi dan air sebagai bagian dari akuntansi keberlanjutan saat ini belum di atur oleh Standar Akuntansi

Keuangan secara khusus. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 1 (revisi 2013) belum mengatur secara jelas terkait kewajiban menyajikan informasi terkait pelestarian lingkungan, yang menyatakan "*Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.*"

Karena sifatnya yang sukarela ini, perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diperoleh atas manfaat pengungkapan informasi ini (Kusumaningtias, 2013). Saat ini pembahasan akuntansi energi dan air untuk entitas bisnis yang ingin mengungkapkan secara sukarela terkait dengan akuntansi energi dapat menggunakan Standar GRI (*Global Reporting Initiave*) No 302 yang di susun oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSSB) sebagai pedoman pelaporan akuntansi energi. Sedangkan pelaporan penggunaan energi bagi orgnaisasi non bisnis atau entitas pemerintah telah diatur dalam peraturan presiden No 33 tahun 2023 tentang konservasi energi sebagai pengganti dari peraturan Presiden no 70 tahun 2009.

Demikian pula dengan praktik pelaporan akuntansi air di indonesia belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sehingga praktik voluntary dari akuntansi airini dapat merujuk pada Standar GRI no 303 tentang *water and effluent*. Regulasi pengelolaan air dan pelaporan akuntansi air yang telah baik pelaksanaan dan pelaporannya di lakukan oleh negara Australia melalui *Australian Water Accounting Standards* (AWAS) telah menetapkan *Water Accounting Conceptual Framework* (WACF) ytang terdiri dari 8 pernyataan standar yaitu : (1) WAC 1 – Definisi Entitas Pelaporan Air (2) SWAC 2 - Laporan Akuntansi Air untuk Tujuan Umum (3) SWAC 3 - Karakteristik Kualitatif Laporan Akuntansi Air untuk Tujuan Umum (4) SWAC 4 - Definisi Elemen Laporan Akuntansi Air

untuk Tujuan Umum (5) SWAC 5 - Pengakuan Elemen Laporan Akuntansi Air untuk Tujuan Umum (6) SWAC 6 - Kuantifikasi Atribut Elemen Laporan Akuntansi Air untuk Tujuan Umum, (7) SWAC 7 - Pengungkapan Kepatuhan dalam Laporan Akuntansi Air untuk Tujuan Umum dan (8) SWAC 8 - Jaminan Laporan Akuntansi Air untuk Tujuan Umum

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN,SURVEY,KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

BAB 11

AKUNTANSI UNTUK LIMBAH DAN DAUR ULANG

Antonius Grivaldi Sondakh, SE, M.Sc., Ak., CA
Universitas Lambung Mangkurat

A.Pendahuluan

Isu lingkungan telah menjadi persoalan penting yang dihadapi saat ini, dimana manusia telah kehilangan kesadaran akan pentingnya alam untuk kelangsungan hidupnya. Pola pikir antroposentris, yang meletakkan manusia sebagai pemilik alam dan segala ciptaan lainnya, telah mengakibatkan potensi krisis bagi generasi mendatang. Pendekatan yang mengeksploitasi alam dan pola pembangunan yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan bencana dan pencemaran lingkungan. Alam seringkali hanya dianggap sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis dan siap dieksploitasi. Staib (2005) menyatakan bahwa kekayaan alam sering kali diinterpretasikan dengan cara yang keliru, hanya sebagai sumber daya ekonomi yang siap digunakan untuk pertumbuhan ekonomi. Pandangan dan pola pembangunan yang mengeksploitasi alam merupakan faktor utama yang harus diatasi oleh pemerintah dalam upaya melindungi lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 di Indonesia bertujuan untuk mengatur perusahaan yang melakukan pencemaran limbah. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga komunitas internasional telah mencetuskan standar lingkungan yang harus dipatuhi secara global. *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Bini & Bellucci, 2020). Standar internasional ISO 14001 mengatur perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan yang mencakup prosedur pengelolaan lingkungan, yang pada akhirnya mencerminkan kinerja lingkungan (Mowen dkk., 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, perusahaan diwajibkan untuk mematuhi peraturan terkait pengelolaan dampak lingkungan. Informasi yang dihasilkan dari pengelolaan biaya lingkungan memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak eksternal, tetapi juga bagi kepentingan internal dalam pengelolaan biaya lingkungan secara efisien. Akuntansi lingkungan berperan penting dalam mencapai eko-efisiensi usaha, yang berarti mempertahankan produksi barang dan jasa yang bermanfaat sambil mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan (Mowen dkk., 2018). Eko-efisiensi meningkatkan efisiensi biaya melalui perbaikan kinerja lingkungan. Sebelum adanya akuntansi lingkungan, biaya lingkungan dicatat sebagai biaya overhead, yang membuat manajer kesulitan dalam mengambil keputusan tepat terkait perbaikan kinerja lingkungan.

Pengelolaan limbah dan daur ulang merupakan bagian dari upaya perbaikan kinerja lingkungan dalam konteks eko-efisiensi. Hal ini juga berhubungan dengan upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan limbah dan daur ulang memiliki keterkaitan dengan isu-isu seperti kesehatan, perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, keamanan pangan dan sumber daya, serta produksi dan konsumsi berkelanjutan (Septian, 2022). Pengelolaan limbah dan daur ulang juga terkait dengan konsep akuntansi berkelanjutan.

Akuntansi berkelanjutan merupakan bidang ilmu akuntansi yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis. Tujuan akuntansi berkelanjutan adalah menyediakan informasi relevan dan dapat dipercaya

LARISA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN REPUBLIK

mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu organisasi kepada para pemangku kepentingan (Septian, 2022). Dengan demikian, akuntansi berkelanjutan dapat membantu organisasi mengukur, mengelola, dan melaporkan dampak positif dan negatif dari aktivitas mereka terhadap lingkungan hidup.

Salah satu bentuk akuntansi berkelanjutan yang digunakan untuk meningkatkan pengelolaan limbah dan daur ulang adalah akuntansi manajemen lingkungan (*environmental management accounting*). Bentuk ini melibatkan proses identifikasi, alokasi, dan analisis aliran material dan hubungan terkait arus biaya lingkungan dalam suatu organisasi. Akuntansi manajemen lingkungan dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi biaya lingkungan yang tersembunyi, menghitung eko-efisiensi usaha, mengurangi limbah dan polusi, serta meningkatkan inovasi dan keunggulan bersaing.

Satu contoh adalah apa yang dilakukan CV. Andi Offset, sebuah perusahaan percetakan yang telah menerapkan akuntansi manajemen lingkungan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup. Selama proses produksi, terdapat dua jenis limbah yang dihasilkan, limbah padat dan limbah cair. Limbah padat terdiri dari endapan kapur dan kain bekas yang digunakan untuk membersihkan minyak yang dipisahkan dari limbah cair. Sedangkan limbah cair terdiri dari campuran minyak dan air yang berasal dari proses produksi. Limbah cair diolah kembali sebelum dibuang, sementara limbah padat diserahkan/dijual kepada pihak ketiga untuk diproses lebih lanjut atau didaur ulang. Langkah ini membawa dampak penghematan dan eko-efisiensi terhadap kinerja biaya lingkungan perusahaan (Paru & Nahartyo, 2020).

Bab ini memperkenalkan akuntansi untuk limbah dan daur ulang secara umum. Akuntansi untuk limbah dan daur ulang sendiri tidak memiliki aturan khusus. Praktik yang terjadi adalah akuntansi sebagai alat mengolah data menjadi informasi keuangan, dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Bab ini dibuka dengan berbagai

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

hal terkait akuntansi untuk limbah dan daur ulang sebagai bagian dari akuntansi berkelanjutan, kemudian dipaparkan pentingnya pengelolaan limbah dan daur ulang. Selanjutnya untuk tujuan eko efisiensi, perlu pula mengenal macam-macam biaya lingkungan. Biaya untuk pengolahan limbah dan daur ulang, dapat terjadi di berbagai macam biaya lingkungan ini. Selanjutnya akan diperkenalkan konsep eko-efisiensi sebagai bagian dari akuntansi berkelanjutan, dan diakhiri dengan membahas akuntansi lingkungan terkait limbah dan daur ulang. Bab ini ditutup dengan simpulan dari isi keseluruhan bab.

B. Pentingnya Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang

Pengelolaan limbah dan daur ulang menjadi penting karena memiliki banyak manfaat bagi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dari berbagai literatur (Bini & Bellucci, 2020; Camilleri, 2017; Nabila & Adina, 2021; Staib, 2005), terdapat beberapa alasan mengapa pengelolaan limbah dan daur ulang menjadi penting adalah karena:

1. Pengelolaan limbah dan daur ulang dapat mengurangi jumlah limbah baru yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Limbah yang menumpuk di lingkungan dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, penyebaran penyakit, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim.
2. Pengelolaan limbah dan daur ulang dapat menghemat sumber daya alam yang semakin terbatas. Dengan mendaur ulang limbah, kita dapat mengurangi penggunaan dan eksploitasi sumber daya alam yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang baru. Hal ini dapat menjaga ketersediaan dan kelangsungan sumber daya alam bagi generasi sekarang dan mendatang.
3. Pengelolaan limbah dan daur ulang dapat meningkatkan nilai ekonomi dari limbah. Limbah yang didaur ulang dapat diolah menjadi produk-produk baru yang bermanfaat dan bernilai jual. Hal ini dapat menciptakan peluang usaha, lapangan kerja, dan pendapatan bagi masyarakat.

4. Pengelolaan limbah dan daur ulang dapat mendukung pencapaian SDGs sebagai tujuan global yang diusung oleh PBB. SDGs sendiri terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

C. Biaya-biaya Lingkungan

Biaya lingkungan merujuk pada biaya yang dikeluarkan oleh organisasi untuk memperbaiki kualitas lingkungan, baik pada saat ini maupun di masa depan (Mowen dkk., 2018). Secara garis besar, empat macam biaya lingkungan dapat di bagi dalam 2 kelompok yaitu biaya pencegahan dan deteksi serta biaya kegagalan. Biaya untuk pengolahan limbah dan daur ulang sendiri, dapat terjadi di berbagai macam biaya lingkungan ini. Misal pada biaya pencegahan, pemilihan alat dan bahan yang baik, dapat mencegah limbah berlebih yang membahayakan lingkungan. Adapun empat kategori biaya lingkungan tersebut yaitu:

1. Biaya pencegahan lingkungan, yang mencakup aktivitas seperti evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi, audit risiko lingkungan, daur ulang produk, pelatihan pegawai, penelitian lingkungan, dan perolehan sertifikasi ISO 14001.
2. Biaya deteksi lingkungan, yang melibatkan aktivitas seperti audit aktivitas lingkungan, pengembangan ukuran kinerja lingkungan, pengujian pencemaran, pengukuran tingkat pencemaran, dan pemeriksaan produk dan proses.
3. Biaya kegagalan internal lingkungan, yang mencakup aktivitas seperti pengolahan dan pembuangan limbah beracun, pemeliharaan peralatan, dan pengoperasian peralatan untuk mengurangi dan menghilangkan polusi.
4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan, yang melibatkan aktivitas seperti pembersihan danau yang tercemar, pembersihan tumpahan minyak, dan penggunaan bahan baku energi yang tidak efisien.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN DI KADA DAN SEKTOR PUBLIK

Dengan mengklasifikasikan biaya lingkungan ke dalam kategori-kategori ini, organisasi dapat lebih memahami dan mengelola biaya yang terkait dengan upaya perlindungan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran akan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka.

D.Eko-efisiensi Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang

Eko-efisiensi adalah konsep yang dikemukakan oleh Hansen dan Mowen yang mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan produksi barang dan jasa yang lebih bermanfaat sambil mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut (Mowen dkk., 2018). Beberapa faktor yang mendorong terjadinya eko-efisiensi adalah:

1. Pelanggan. Perkembangan teknologi memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mendapatkan informasi tentang kerusakan atau dampak lingkungan yang dihasilkan oleh suatu produk. Faktor ini memengaruhi pola pikir masyarakat dalam memilih produk yang mereka konsumsi. Masyarakat cenderung lebih tertarik pada produk yang diproduksi tanpa merusak lingkungan dan menggunakan praktik yang ramah lingkungan.
2. Pegawai. Pegawai cenderung lebih memilih bekerja di perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Lingkungan kerja yang aman dan bersih akan mendorong produktivitas pegawai. Peningkatan produktivitas pegawai ini akan berdampak positif pada kinerja keseluruhan perusahaan.
3. Keuntungan finansial. Perusahaan yang menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan cenderung mendapatkan keuntungan finansial tambahan karena mereka tidak perlu mengeluarkan dana untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas mereka.
4. Citra perusahaan. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik akan mendapatkan citra positif di mata

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan yang ketat.

5. Inovasi dan peluang baru. Perusahaan yang fokus pada peningkatan kinerja lingkungan akan mendorong kreativitas manajemen dalam melakukan inovasi dan menemukan peluang baru yang ramah lingkungan, seperti mengubah limbah menjadi produk bernilai yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan.
6. Keunggulan kompetitif. Eko-efisiensi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dengan cara mengurangi dampak lingkungan melalui pengurangan limbah, pengurangan konsumsi sumber daya, peningkatan nilai produk, dan produksi produk yang ramah lingkungan.

Dengan menerapkan konsep eko-efisiensi, perusahaan dapat mencapai keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan bisnis mereka, sambil memberikan manfaat yang lebih baik bagi pelanggan dan lingkungan.

E. Akuntansi untuk Limbah dan Daur Ulang

Mowen dkk. (2018) menjelaskan bahwa akuntansi lingkungan adalah suatu proses yang melibatkan identifikasi, alokasi, dan analisis aliran material serta hubungan antara arus kas dengan menggunakan sistem akuntansi lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai dampak lingkungan yang terkait dengan aspek keuangan. Penerapan akuntansi lingkungan dalam perusahaan memiliki beberapa tujuan yaitu: pertama, Menggunakan akuntansi lingkungan sebagai alat manajemen lingkungan untuk mengevaluasi aktivitas lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan klasifikasinya. Kedua, Menggunakan akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat. Dalam hal ini, akuntansi lingkungan menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang telah memperoleh manfaat dari sumber daya alam.

LARISPA LEMBAGA RISET PUBLIK PENELITIAN SURVEI KONSULTAN PUKAU DAN SEKTOR PUBLIK

Sebagaimana praktik akuntansi pada umumnya, akuntansi untuk limbah dan daur ulang melibatkan pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian informasi keuangan yang berkaitan dengan limbah dan kegiatan daur ulang dalam suatu entitas bisnis (De Villiers & Maroun, 2018). Tujuan akuntansi ini adalah untuk mengelola dan mengontrol dampak finansial dari limbah serta mendorong praktik daur ulang yang berkelanjutan. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam akuntansi limbah dan daur ulang (lihat, De Villiers & Maroun, 2018; Mowen dkk., 2018; Paru & Nahartyo, 2020; Septian, 2022) yaitu:

1. Pengakuan limbah: Limbah dapat diakui sebagai biaya operasional atau biaya produksi tergantung pada sifatnya. Limbah yang terkait dengan produksi barang atau jasa dapat dikategorikan sebagai biaya produksi, sementara limbah yang timbul dari kegiatan operasional, seperti limbah kantor atau limbah pengemasan, dapat dianggap sebagai biaya operasional.
2. Pengukuran limbah: Limbah dapat diukur dengan berbagai cara, tergantung pada jenis limbahnya. Misalnya, limbah padat dapat diukur berdasarkan berat atau volume, sedangkan limbah cair dapat diukur berdasarkan volume atau konsentrasi zat pencemar di dalamnya. Pengukuran yang akurat penting untuk menghitung biaya dan nilai limbah yang tepat.
3. Pelaporan limbah: Informasi mengenai limbah dan kegiatan daur ulang perlu dilaporkan secara transparan dalam laporan keuangan. Hal ini dapat mencakup pengungkapan tentang jumlah dan jenis limbah yang dihasilkan, biaya yang terkait, serta upaya yang dilakukan untuk mengurangi, mendaur ulang, atau membuang limbah dengan aman dan sesuai peraturan.
4. Penyusutan dan nilai limbah: Jika entitas memiliki aset terkait limbah, seperti fasilitas daur ulang atau peralatan pengolahan limbah, maka nilai-nilai ini perlu dipertimbangkan dalam proses akuntansi. Nilai aset dapat

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTASI PEMERINTAHAN DAN SEKTOR PUBLIK

disusutkan seiring waktu, dan nilai limbah yang dihasilkan dari proses daur ulang juga dapat dihitung dan dilaporkan.

5. Pemantauan dan pengendalian: Sistem pengendalian internal harus diterapkan untuk memastikan pengelolaan limbah yang efektif dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku. Ini termasuk pemantauan dan pengendalian terhadap pembuangan limbah, penggunaan bahan baku yang bertanggung jawab, dan penerapan praktik daur ulang yang tepat.

Pengelolaan limbah dan daur ulang memiliki keterkaitan yang erat dengan akuntansi berkelanjutan. Akuntansi manajemen lingkungan sebagai bentuk akuntansi berkelanjutan memberikan informasi akuntansi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan aspek lingkungan yang terkait dengan keberadaan organisasi dalam lingkungan sosial dan alam sekitar. Pengelolaan limbah dan daur ulang yang baik dapat mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN,SURVEY,KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

BAB 12 AKUNTANSI BIODIVERSITAS

Medina Almunawwaroh, S.Mn., M.Ak., CRP., CIAP.
Universitas Siliwangi

Akuntansi biodiversitas merupakan konsep dan praktik yang berkaitan dengan pengukuran, pencatatan, dan pelaporan nilai biodiversitas. Biodiversitas merujuk pada keragaman hayati yang mencakup keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistem di planet ini (Hendra & Rachman, 2016). Konsep akuntansi biodiversitas muncul sebagai tanggapan terhadap perlunya mengakui pentingnya nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan dari biodiversitas (Heniwati & Asni, 2019).

Dalam era yang semakin sadar akan isu lingkungan dan keberlanjutan, akuntansi biodiversitas memiliki peran penting dalam menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur dan melaporkan dampak kegiatan manusia terhadap biodiversitas (Syarifuddin & Damayanti, 2020). Melalui akuntansi biodiversitas, perusahaan dan organisasi dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko terhadap biodiversitas serta mengintegrasikan pertimbangan biodiversitas ke dalam pengambilan keputusan bisnis yang berkelanjutan (Katic et al., 2023).

Dengan demikian, akuntansi biodiversitas bukan hanya tentang aspek ekologis, tetapi juga melibatkan dimensi ekonomi dan sosial. Tujuan akuntansi biodiversitas adalah untuk mendorong pemahaman yang lebih baik tentang nilai dan pentingnya biodiversitas, serta mendorong perlindungan dan pelestariannya dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, DEMOKRASI, PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

A. Pengenalan Biodiversitas dan Pentingnya dalam Akuntansi

Biodiversitas merujuk pada keanekaragaman hayati di planet Bumi, termasuk keberagaman genetik, spesies, dan ekosistem. Keberadaan biodiversitas yang kaya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan berbagai layanan ekosistem, dan mendukung kelangsungan hidup manusia (Du et al., 2023). Akuntansi, di sisi lain, adalah sistem pengukuran, pengungkapan, dan pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan dalam konteks organisasi (Posadas et al., 2022). Saat ini, kesadaran akan pentingnya melindungi dan melestarikan biodiversitas semakin meningkat, dan akuntansi dapat memainkan peran yang signifikan dalam mengukur, melaporkan, dan mengelola dampak organisasi terhadap biodiversitas (Schlaepfer & Lawler, 2023).

Pentingnya biodiversitas dalam akuntansi tidak dapat diremehkan. Akuntansi biodiversitas melibatkan pengukuran dan pelaporan dampak organisasi terhadap keberagaman hayati, serta upaya untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan kontribusi positif terhadap biodiversitas (Gough, 2016). Dengan memasukkan biodiversitas ke dalam laporan keuangan dan non-keuangan, organisasi dapat mengakui pentingnya faktor-faktor lingkungan dan sosial dalam keberlanjutan bisnis mereka. Beberapa alasan mengapa biodiversitas penting dalam konteks akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Nilai Ekonomi: Biodiversitas menyediakan berbagai sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi. Misalnya, hutan hujan tropis menghasilkan kayu yang dapat digunakan dalam industri konstruksi, tumbuhan obat-obatan yang berpotensi bernilai tinggi dalam industri farmasi, dan bahan pangan yang merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Dalam akuntansi, pengukuran dan pelaporan nilai ekonomi dari sumber daya alam ini dapat

membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

2. Kewajiban Lingkungan: Organisasi memiliki kewajiban untuk memahami dan mengelola dampak mereka terhadap biodiversitas. Dalam banyak kasus, kegiatan bisnis dapat menyebabkan penurunan biodiversitas, seperti deforestasi, penggunaan air yang berlebihan, atau penggunaan bahan kimia berbahaya. Akuntansi biodiversitas membantu organisasi mengidentifikasi dan mengukur dampak negatif mereka terhadap biodiversitas, serta mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Dengan mengintegrasikan biodiversitas dalam praktik akuntansi mereka, organisasi dapat mengambil langkah-langkah yang lebih berkelanjutan untuk meminimalkan dampak mereka terhadap lingkungan.

Melalui akuntansi biodiversitas, organisasi juga dapat membangun reputasi yang kuat dalam hal keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan (Gough, 2016). Konsumen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya semakin memperhatikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan melaporkan dampak dan tindakan yang diambil untuk melindungi biodiversitas, organisasi dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan dari para pemangku kepentingan.

Dalam melakukan akuntansi biodiversitas, organisasi dapat mengacu pada kerangka kerja dan panduan yang telah dikembangkan oleh berbagai organisasi dan lembaga. Misalnya, The Natural Capital Coalition telah mengembangkan Protokol Akuntansi Biodiversitas yang menyediakan panduan praktis bagi organisasi dalam mengukur dan melaporkan dampak mereka terhadap biodiversitas (Gough, 2016). Selain itu, Global Reporting Initiative (GRI) menyediakan panduan bagi organisasi untuk melaporkan aspek lingkungan, termasuk biodiversitas, dalam laporan keberlanjutan mereka (GRI Standards, 2018).

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN OPINI PUBLIK

Dengan memahami pentingnya biodiversitas dalam akuntansi, organisasi dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati. Akuntansi biodiversitas bukan hanya tentang memenuhi persyaratan peraturan dan standar, tetapi juga tentang pengakuan akan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melekat pada operasi bisnis. Dengan mengintegrasikan biodiversitas dalam akuntansi, organisasi dapat menjadi agen perubahan yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan planet kita.

B. Akuntansi untuk Pengelolaan Biodiversitas

Biodiversitas adalah keanekaragaman hayati yang meliputi keberagaman genetik, spesies, dan ekosistem di Bumi. Kehadiran biodiversitas yang kaya memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan berbagai layanan ekosistem, serta mendukung kehidupan manusia (Rodrigues-Filho et al., 2023). Namun, ancaman terhadap biodiversitas semakin meningkat akibat aktivitas manusia, seperti deforestasi, degradasi habitat, perubahan iklim, dan polusi (Mestanza-Ramón et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk melibatkan akuntansi dalam pengelolaan biodiversitas guna mengukur, mengelola, dan melaporkan dampak organisasi terhadap keanekaragaman hayati (Elo et al., 2023).

Akuntansi untuk pengelolaan biodiversitas melibatkan penggunaan alat dan metode akuntansi untuk mengidentifikasi, mengukur, melaporkan, dan mengelola dampak organisasi terhadap biodiversitas (Gonzalez et al., 2023). Hal ini memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam upaya melestarikan biodiversitas dan mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan (Alkaraan et al., 2023).

LARISA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Beberapa poin penting tentang akuntansi untuk pengelolaan biodiversitas (GRI Standards, 2018) adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Dampak: Akuntansi biodiversitas melibatkan pengukuran dampak organisasi terhadap biodiversitas. Hal ini meliputi identifikasi dan evaluasi dampak langsung maupun tidak langsung yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis, seperti konversi lahan, penggunaan air, penggunaan bahan kimia, atau kegiatan penangkapan ikan. Pengukuran ini dapat dilakukan menggunakan indikator dan metode yang telah ditetapkan, seperti analisis jejak ekologi, penghitungan keanekaragaman spesies, atau estimasi kerugian ekonomi akibat kerusakan habitat.
2. Penilaian Nilai Ekonomi: Akuntansi biodiversitas juga melibatkan penilaian nilai ekonomi dari keanekaragaman hayati. Biodiversitas menyediakan berbagai sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, seperti kayu, obat-obatan, atau bahan pangan. Penilaian nilai ekonomi ini memungkinkan organisasi untuk memahami kontribusi biodiversitas terhadap perekonomian dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk melestarikan aset-aset alam ini.
3. Pelaporan dan Transparansi: Akuntansi biodiversitas melibatkan pelaporan dampak organisasi terhadap biodiversitas dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan. Organisasi perlu melaporkan upaya mereka dalam melindungi dan melestarikan biodiversitas, serta mengungkapkan inisiatif perlindungan lingkungan yang diambil. Pelaporan ini memberikan informasi yang penting bagi pemangku kepentingan, seperti investor, konsumen, dan masyarakat umum, untuk mengevaluasi kinerja dan komitmen organisasi terhadap keberlanjutan lingkungan.
4. Manajemen Risiko: Akuntansi biodiversitas dapat membantu organisasi dalam mengelola risiko yang terkait dengan biodiversitas. Risiko kerusakan atau kehilangan biodiversitas dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bagi

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

kelangsungan hidup organisasi. Dengan menggunakan alat dan metode akuntansi yang tepat, organisasi dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko terkait biodiversitas dengan lebih efektif.

Dalam melaksanakan akuntansi untuk pengelolaan biodiversitas, organisasi dapat mengacu pada kerangka kerja dan panduan yang telah dikembangkan oleh berbagai organisasi dan lembaga. Misalnya, Convention on Biological Diversity (CBD) telah mengembangkan Guidelines for the Financial Reporting and Disclosure of Biodiversity and Ecosystem Services (PTF - ESRS, 2022), yang menyediakan panduan praktis dalam melaporkan informasi terkait biodiversitas dalam laporan keuangan. Selain itu, The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) menyediakan berbagai alat dan panduan untuk mengevaluasi dan mengukur nilai ekonomi dari layanan ekosistem dan biodiversitas.

Dengan menggunakan akuntansi untuk pengelolaan biodiversitas, organisasi dapat mengambil langkah-langkah yang lebih berkelanjutan dalam melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati. Akuntansi yang berfokus pada biodiversitas membantu organisasi untuk memahami dampak mereka terhadap lingkungan dan mendorong adopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap biodiversitas. Melalui akuntansi biodiversitas, organisasi dapat berkontribusi pada upaya global dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan mempertahankan keanekaragaman hayati untuk masa depan yang lebih baik.

C. Pelaporan Biodiversitas

Pelaporan biodiversitas merupakan bagian penting dalam praktik akuntansi yang berkelanjutan (Sandström et al., 2023). Melalui pelaporan ini, organisasi dapat mengungkapkan dampak mereka terhadap keanekaragaman hayati dan tindakan yang diambil untuk melindungi biodiversitas. Pelaporan biodiversitas dari sisi akuntansi memberikan transparansi

kepada pemangku kepentingan mengenai komitmen dan kinerja organisasi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

1. Pelaporan dalam Laporan Keuangan: Pelaporan biodiversitas diintegrasikan dalam laporan keuangan organisasi sebagai komponen dari pelaporan keberlanjutan. Laporan keuangan yang inklusif mencakup informasi mengenai dampak terhadap biodiversitas dan tindakan yang dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif. Informasi ini dapat mencakup kerugian atau kerusakan yang terkait dengan biodiversitas, langkah-langkah mitigasi yang diambil, dan investasi dalam pelestarian dan pemulihan habitat.
2. Laporan Keberlanjutan Terpisah: Selain laporan keuangan, organisasi juga dapat menyusun laporan keberlanjutan terpisah yang secara khusus membahas isu-isu lingkungan, termasuk biodiversitas. Laporan ini dapat berisi informasi rinci tentang tujuan, kebijakan, dan program yang dilakukan oleh organisasi dalam melindungi dan mempromosikan biodiversitas. Laporan keberlanjutan dapat melibatkan penggunaan indikator kinerja lingkungan yang terukur dan tujuan jangka panjang yang terkait dengan biodiversitas.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN OPINI PUBLIK

Pelaporan biodiversitas dari sisi akuntansi memiliki manfaat penting bagi organisasi dan pemangku kepentingan. Melalui pelaporan yang transparan, organisasi dapat meningkatkan reputasi mereka sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pemangku kepentingan, seperti investor, konsumen, dan masyarakat umum, dapat menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan yang didasarkan pada pertimbangan keberlanjutan (GRI Standards, 2018).

D.Regulasi dan Kebijakan terkait Biodiversitas

Biodiversitas adalah aset yang berharga bagi kehidupan di planet ini. Untuk menjaga keberlanjutannya, diperlukan regulasi dan kebijakan yang memadai. Regulasi dan kebijakan terkait biodiversitas bertujuan untuk melindungi, memelihara,

dan mengelola keanekaragaman hayati secara berkelanjutan (Hahn & Lülfs, 2014). Dalam penjelasan ini, akan dibahas pentingnya regulasi dan kebijakan tersebut serta beberapa contoh yang relevan.

1. Pentingnya Regulasi dan Kebijakan Biodiversitas
   Regulasi dan kebijakan terkait biodiversitas memiliki peran kunci dalam menjaga keberlanjutan alam (Balsalobre-Lorente et al., 2023). Mereka membantu mencegah kerusakan terhadap ekosistem dan spesies yang dapat mengancam keseimbangan lingkungan. Regulasi dan kebijakan juga memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah, bisnis, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dengan bijak. Melalui regulasi dan kebijakan yang efektif, kita dapat melindungi habitat penting, mencegah kepunahan spesies, dan mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap biodiversitas.
2. Contoh Regulasi dan Kebijakan terkait Biodiversitas
   a. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity*
   b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika
   d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
   e. Kementerian Lingkungan Hidup, 2011, Protokol Nagoya
   f. Kementerian Lingkungan Hidup, 2011, Protokol Cartagena
   g. Kementerian Lingkungan Hidup, 2011, Menjamin Pembagian Keuntungan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik: Protokol Nagoya
   h. Modul Diklat PPLH Pusdiklat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

3. Implementasi dan Pengawasan
   Regulasi dan kebijakan terkait biodiversitas memiliki dampak nyata jika diimplementasikan dengan baik dan diawasi secara ketat (Lehtiniemi et al., 2023). Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pengawas, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan tersebut.

Regulasi dan kebijakan terkait biodiversitas adalah instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan alam (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). Melalui perlindungan dan pengelolaan yang baik, kita dapat memastikan kelangsungan keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang. Dukungan dan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam mengimplementasikan dan mematuhi regulasi dan kebijakan tersebut.

Akuntansi biodiversitas memiliki peran penting dalam mengukur, melaporkan, dan memonitor nilai ekonomi dari keanekaragaman hayati. Melalui pendekatan akuntansi yang berkelanjutan, informasi yang relevan dapat disediakan untuk pengambilan keputusan yang bijak dalam pengelolaan sumber daya alam. Regulasi dan kebijakan yang mendukung akuntansi biodiversitas menjadi landasan penting untuk menjaga keberlanjutan alam dan melindungi biodiversitas. Dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan, akuntansi biodiversitas dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mempromosikan praktik pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dalam era yang semakin menyadari pentingnya keanekaragaman hayati, akuntansi biodiversitas menjadi alat yang relevan dalam mengintegrasikan nilai ekonomi dan lingkungan. Melalui pelaporan yang akurat dan transparan, serta kebijakan yang mendukung, kita dapat menjaga keberlanjutan biodiversitas untuk masa depan yang lebih baik. Dalam upaya melindungi alam, akuntansi biodiversitas menawarkan solusi yang menggabungkan kepentingan

ekonomi dan lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN,SURVEY,KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

BAB 13

AKUNTANSI RISIKO DAN PELUANG BERKELANJUTAN

Drs. Ec Jantje Lagu Ak.,MM.,CIAP.,CIAE., CRM.,ACPA(Cand).
Universitas Papua Otto dan Geisler

A. Identifikasi Risiko dan Peluang Berkelanjutan

"Akuntansi Risiko dan Peluang Berkelanjutan" mengacu pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis risiko dan peluang dalam proses akuntansi, dengan fokus pada keberlanjutan. Konsep ini berakar dalam pengakuan bahwa organisasi perlu mempertimbangkan tidak hanya faktor ekonomi tetapi juga lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam pengambilan keputusan strategis. Mari kita telusuri lebih lanjut aspek-aspek kunci dari konsep ini:

1. **Risiko Berkelanjutan**: Ini melibatkan identifikasi dan penilaian potensi risiko yang dapat mengganggu tujuan keberlanjutan suatu organisasi. Risiko ini bisa berkaitan dengan perubahan iklim, kegagalan kepatuhan hukum lingkungan, atau reputasi yang terkait dengan masalah sosial.
2. **Peluang Berkelanjutan**: Di sisi lain, peluang berkelanjutan mengacu pada cara di mana organisasi dapat menciptakan nilai tambah melalui komitmen terhadap tujuan keberlanjutan. Misalnya, pengembangan produk atau layanan yang **ramah lingkungan dapat membuka pasar baru atau meningkatkan loyalitas pelanggan.**
3. **Pengintegrasian dalam Akuntansi: Proses ini melibatkan penyatuan informasi** tentang risiko dan peluang ke dalam

sistem akuntansi organisasi, sehingga informasi ini dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Ini mungkin melibatkan penyesuaian dalam cara laporan keuangan disusun atau pengembangan laporan keberlanjutan yang terpisah.

4. **Pengukuran dan Penilaian**: Untuk mengelola risiko dan peluang, organisasi perlu mampu mengukur dan menilai mereka dengan cara yang konsisten dan dapat diandalkan. Ini bisa melibatkan pengembangan metrik atau standar khusus.
5. **Pengambilan Keputusan Strategis:** Akhirnya, informasi tentang risiko dan peluang harus digunakan dalam pengambilan keputusan strategis, membantu organisasi dalam menavigasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam konteks keberlanjutan.
6. **Kepatuhan dan Transparansi:** Dengan meningkatnya tekanan dari regulator, investor, dan konsumen, organisasi semakin diharuskan untuk melaporkan risiko dan peluang keberlanjutan dalam cara yang transparan dan dapat diverifikasi.
7. **Standar dan Pedoman**: Organisasi seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan Sustainability Accounting Standards Board (SASB) telah mengembangkan standar dan pedoman untuk membantu organisasi dalam pelaporan keberlanjutan, termasuk risiko dan peluang.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, INVESTIGASI DAN ADVOKASI PUBLIK

Akuntansi Risiko dan Peluang Berkelanjutan menjadi semakin penting di dunia yang semakin sadar akan isu-isu lingkungan dan sosial. Dengan mengintegrasikan pertimbangan ini ke dalam proses akuntansi dan pengambilan keputusan strategis, organisasi dapat lebih siap untuk masa depan yang berkelanjutan dan tangguh, sambil memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan. Identifikasi Risiko dan Peluang Berkelanjutan adalah langkah kunci dalam manajemen keberlanjutan. Ini melibatkan pengenalan dan analisis faktor yang mungkin memiliki dampak negatif atau positif pada tujuan

keberlanjutan suatu organisasi. Berikut adalah beberapa cara untuk mengidentifikasi risiko dan peluang tersebut:

Identifikasi Risiko Berkelanjutan

1. **Analisis Lingkungan**: Memahami dampak potensial perubahan iklim, polusi, kehilangan keanekaragaman hayati, dan masalah lingkungan lainnya pada operasi organisasi.
2. **Kepatuhan Hukum dan Regulasi**: Menilai risiko dari perubahan dalam undang-undang atau peraturan lingkungan dan sosial.
3. **Reputasi dan** Tanggung **Jawab Sosial**: Mengidentifikasi risiko terkait dengan citra publik dan ekspektasi masyarakat mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.
4. **Risiko Pasar dan Ekonomi**: Analisis risiko terkait dengan volatilitas harga sumber daya, perubahan preferensi konsumen, atau dampak ekonomi dari perubahan regulasi.

Identifikasi Peluang Berkelanjutan

1. **Inovasi Produk dan Layanan**: Mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang lebih ramah lingkungan atau etis.
2. **Efisiensi Operasional**: Menganalisis cara-cara untuk meningkatkan efisiensi melalui pengurangan limbah, penggunaan energi, atau penggunaan sumber daya lainnya.
3. **Akses Pasar**: Mengidentifikasi peluang untuk memasuki pasar baru atau segmen melalui komitmen terhadap keberlanjutan.
4. **Kemitraan dan Kolaborasi**: Menemukan peluang untuk bekerja sama dengan organisasi lain dalam proyek keberlanjutan bersama.

Alat dan Pendekatan

1. **Pengkajian Materialitas**: Menentukan isu-isu yang paling relevan dan signifikan bagi organisasi dan pemangku kepentingannya.
2. **Analisis Pihak Berkepentingan**: Melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses identifikasi untuk

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEI KONSULTAN PILKADA DAN PEKTOR PUBLIK

mendapatkan pandangan yang berbeda dan lebih komprehensif.

3. **Pemantauan dan Intelijen Pasar**: Menggunakan alat pemantauan dan intelijen untuk mengidentifikasi tren pasar dan perubahan regulasi yang mungkin menciptakan risiko atau peluang.
4. **Penggunaan Standar dan Kerangka Kerja**: Menerapkan kerangka kerja dan standar yang ada, seperti ISO 26000 atau GRI, untuk membantu dalam proses identifikasi.

Proses identifikasi Risiko dan Peluang Berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari strategi dan operasi bisnis, dan diperlukan komitmen dari manajemen puncak, koordinasi lintas departemen, serta pendekatan yang berorientasi pada data dan berbasis bukti.

B. Pengukuran Risiko dan Peluang Berkelanjutan

Identifikasi Risiko dan Peluang Berkelanjutan adalah langkah kunci dalam manajemen keberlanjutan. Ini melibatkan pengenalan dan analisis faktor yang mungkin memiliki dampak negatif atau positif pada tujuan keberlanjutan suatu organisasi. Berikut adalah beberapa cara untuk mengidentifikasi risiko dan peluang tersebut:

Identifikasi Risiko Berkelanjutan

1. **Analisis Lingkungan**: Memahami dampak potensial perubahan iklim, polusi, kehilangan keanekaragaman hayati, dan masalah lingkungan lainnya pada operasi organisasi.
2. **Kepatuhan Hukum dan Regulasi**: Menilai risiko dari perubahan dalam undang-undang atau peraturan lingkungan dan sosial.
3. **Reputasi dan Tanggung Jawab Sosial**: Mengidentifikasi risiko terkait dengan citra publik dan ekspektasi masyarakat mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.
4. **Risiko Pasar dan Ekonomi**: Analisis risiko terkait dengan volatilitas harga sumber daya, perubahan preferensi konsumen, atau dampak ekonomi dari perubahan regulasi.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, KONSULTANSI, KAJIAN DAN STUDI PUBLIK

Identifikasi Peluang Berkelanjutan

1. **Inovasi Produk dan Layanan**: Mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang lebih ramah lingkungan atau etis.
2. **Efisiensi Operasional**: Menganalisis cara-cara untuk meningkatkan efisiensi melalui pengurangan limbah, penggunaan energi, atau penggunaan sumber daya lainnya.
3. **Akses Pasar**: Mengidentifikasi peluang untuk memasuki pasar baru atau segmen melalui komitmen terhadap keberlanjutan.
4. **Kemitraan dan Kolaborasi**: Menemukan peluang untuk bekerja sama dengan organisasi lain dalam proyek keberlanjutan bersama.

Alat dan Pendekatan

1. **Pengkajian Materialitas**: Menentukan isu-isu yang paling relevan dan signifikan bagi organisasi dan pemangku kepentingannya.
2. **Analisis Pihak Berkepentingan**: Melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses identifikasi untuk mendapatkan pandangan yang berbeda dan lebih komprehensif.
3. **Pemantauan dan Intelijen Pasar**: Menggunakan alat pemantauan dan intelijen untuk mengidentifikasi tren pasar dan perubahan regulasi yang mungkin menciptakan risiko atau peluang.
4. **Penggunaan Standar dan Kerangka Kerja**: Menerapkan kerangka kerja dan standar yang ada, seperti ISO 26000 atau GRI, untuk membantu dalam proses identifikasi.

Proses identifikasi Risiko dan Peluang Berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari strategi dan operasi bisnis, dan diperlukan komitmen dari manajemen puncak, koordinasi lintas departemen, serta pendekatan yang berorientasi pada data dan berbasis bukti.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

C. Pengelolaan Risiko Berkelanjutan

Pengelolaan Risiko Berkelanjutan adalah proses sistematis mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang berhubungan dengan keberlanjutan dalam suatu organisasi. Ini termasuk risiko yang terkait dengan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Berikut adalah langkah-langkah dan prinsip utama yang terlibat dalam pengelolaan risiko berkelanjutan:

1. **Identifikasi Risiko**
   Ini adalah langkah pertama dan melibatkan pengenalan risiko potensial yang berhubungan dengan keberlanjutan. Risiko ini mungkin terkait dengan perubahan iklim, regulasi, reputasi, dll.
2. **Pengukuran dan Penilaian Risiko**
   Setelah mengidentifikasi risiko, organisasi perlu menilai dan mengukur risiko tersebut dalam hal probabilitas dan dampak potensial.
3. **Penentuan Strategi dan Respon Risiko**
   Ini melibatkan pengembangan strategi untuk mengatasi risiko, yang mungkin termasuk:
   a. **Mitigasi**: Mengurangi probabilitas atau dampak risiko.
   b. **Transfer**: Memindahkan beberapa atau semua risiko kepada pihak ketiga (misalnya, melalui asuransi).
   c. **Penerimaan**: Menilai bahwa risiko berada dalam tingkat toleransi yang dapat diterima dan memilih untuk menerima tanpa tindakan khusus.
   d. **Penghindaran**: Mengubah rencana atau proses untuk menghindari risiko sepenuhnya.
4. **Implementasi Strategi**
   Ini melibatkan pelaksanaan strategi yang telah ditentukan untuk mengelola risiko, termasuk alokasi sumber daya yang diperlukan dan pengaturan tanggung jawab.
5. **Pemantauan dan Tinjauan**
   Proses ini harus terus-menerus memantau dan meninjau risiko dan efektivitas strategi manajemen risiko, termasuk melakukan audit dan penilaian berkala.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTANSI, PILKADA DAN SERVICE PUBLIK

6. **Pelaporan dan Komunikasi**
   Informasi tentang risiko dan bagaimana mereka dikelola harus dikomunikasikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk manajemen, karyawan, pemegang saham, dan lainnya.

Alat dan Pendekatan Umum

1. **Kerangka Kerja Manajemen Risiko**: Penggunaan kerangka kerja seperti ISO 31000 dapat membantu memandu proses manajemen risiko.
2. **Teknologi dan Alat Analitik**: Alat teknologi dapat membantu dalam analisis, pemantauan, dan pelaporan risiko.
3. **Keterlibatan Pihak Berkepentingan**: Konsultasi dan keterlibatan dengan pihak berkepentingan dalam proses manajemen risiko.

Pentingnya Pengelolaan Risiko Berkelanjutan

Dengan memahami dan mengelola risiko yang berhubungan dengan keberlanjutan, organisasi dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan mereka, sementara juga memenuhi harapan regulator, investor, pelanggan, dan pihak berkepentingan lainnya. Ini juga membantu dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi dan tangguh terhadap ketidakpastian dan perubahan di lingkungan bisnis.

D. Pelaporan Risiko dan Peluang Berkelanjutan

Pelaporan Risiko dan Peluang Berkelanjutan adalah proses komunikasi transparan dan terstruktur tentang bagaimana organisasi mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan merespons risiko dan peluang yang terkait dengan keberlanjutan. Pelaporan ini penting untuk membangun kepercayaan dan keterbukaan dengan pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, regulator, dan masyarakat umum.

Berikut adalah beberapa elemen kunci dan praktik terbaik dalam pelaporan risiko dan peluang berkelanjutan:

1. **Identifikasi dan Deskripsi Risiko dan Peluang**
   a. **Risiko**: Sertakan deskripsi lengkap dari risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang dihadapi oleh organisasi.
   b. **Peluang**: Jelaskan peluang berkelanjutan yang telah diidentifikasi, termasuk potensi dampak positif pada bisnis dan masyarakat.
2. **Penilaian dan Pengukuran**
   Sajikan informasi tentang cara organisasi menilai dan mengukur risiko dan peluang, termasuk metodologi, kriteria, dan indikator kunci yang digunakan.
3. **Strategi dan Respons**
   Gambarkan strategi dan tindakan yang diambil untuk mengelola risiko dan memanfaatkan peluang, termasuk hasil dan pencapaian.
4. **Pemantauan dan Tinjauan**
   Sertakan detail tentang proses pemantauan dan peninjauan risiko dan peluang, serta bagaimana temuan dan pembelajaran diterapkan.
5. **Keterlibatan Pihak Berkepentingan**
   Jelaskan bagaimana organisasi melibatkan pihak berkepentingan dalam pengidentifikasian, pengukuran, dan pengelolaan risiko dan peluang.
6. **Kesesuaian dengan Standar dan Pedoman**
   Ikuti standar dan pedoman yang diakui, seperti Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), atau Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas.
7. **Transparansi dan Kejelasan**
   Berikan informasi yang jelas, tepat, dan mudah diakses, serta hindari jargon atau bahasa teknis yang dapat mengaburkan pemahaman.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITI, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

8. **Verifikasi Eksternal**
   Pertimbangkan untuk menggunakan pihak ketiga yang independen untuk memverifikasi pelaporan, yang dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dalam informasi yang dilaporkan.
9. **Integrasi dengan Pelaporan Keuangan**
   Integrasikan informasi tentang risiko dan peluang berkelanjutan dengan pelaporan keuangan, jika relevan, untuk memberikan pandangan yang lebih holistik tentang posisi dan prospek organisasi.

Pentingnya Pelaporan Risiko dan Peluang Berkelanjutan

Pelaporan Risiko dan Peluang Berkelanjutan bukan hanya tentang kepatuhan dengan persyaratan regulasi atau pelaporan; ini adalah alat strategis yang membantu organisasi dalam mengkomunikasikan komitmen dan kinerja mereka terhadap keberlanjutan. Ini membantu dalam membangun reputasi, meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang tepat dan transparan.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN,SURVEY,KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

BAB 14

PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM AKUNTANSI BERKELANJUTAN

Alfian, SE., Akt., M.Si., CA, CPA
Universitas Lambung Mangkurat

A.Identifikasi Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan *(stake holders)* dalam akuntansi berkelanjutan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dan dapat dipengaruhi oleh kinerja berkelanjutan suatu entitas. Menurut *The Global Reporting Initiative (GRI)*, pemangku kepentingan terkait dengan akuntansi berkelanjutan meliputi: pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat lokal, dan masyarakat umum.

Pemangku kepentingan, baik individu maupun kelompok, dapat memiliki kepentingan ekonomi, sosial, atau lingkungan yang berbeda-beda terhadap entitas akuntansi. Identifikasi pemangku kepentingan yang tepat menjadi langkah penting dalam memahami kebutuhan dan harapan mereka. Pada Tabel 14.1 berikut dijelaskan peran masing-masing pemangku kepentingan.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PERADA DAN SERTOK PUBLIK

Tabel 14.1. Peran Pemangku Kepentingan

No.	Jenis Pemangku Kepentingan	Peran Pemangku Kepentingan
1.	Pemegang saham	Pihak-pihak inilah yang memberikan modal dalam perusahaan agar operasional berjalan. Mereka juga menjadi supervisor yang mengamati kinerja bawahannya.
2.	Karyawan	Penentu kinerja perusahaan. Itu sebabnya mereka juga menjadi pemangku kepentingan perusahaan.
3.	Pemasok	Juga membantu kinerja perusahaan karena menyediakan berbagai barang atau jasa bagi perusahaan.
4.	Konsumen	Gunakan produk atau layanan perusahaan dan mengevaluasi mereka.
5.	Bank atau lembaga keuangan	Perusahaan yang memberikan bantuan permodalan untuk operasional perusahaan.
6.	Kompetitor	Berperan dalam pengambilan keputusan, kebijakan dan strategi perusahaan.
7.	Pemerintah	Keputusan yang dibuat oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, turut mempengaruhi kebijakan, keputusan, dan strategi yang akan diterapkan oleh suatu perusahaan.

No.	Jenis Pemangku Kepentingan	Peran Pemangku Kepentingan
8.	Media massa	Pemberitaan atau sorotan media dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata khalayak luas.
9.	Masyarakat umum	Orang-orang yang dikatakan terkena dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari kegiatan operasional perusahaan.

B. Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan

Komunikasi dengan pemangku kepentingan adalah proses menyampaikan informasi yang relevan kepada individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dan dapat dipengaruhi oleh kinerja berkelanjutan suatu entitas. Komunikasi yang efektif dan terbuka dengan pemangku kepentingan adalah aspek penting dalam praktik akuntansi berkelanjutan. Komunikasi yang efektif dan terbuka dengan pemangku kepentingan dapat meningkatkan transparansi, memperkuat hubungan, dan membangun kepercayaan.

Laporan keuangan dan laporan berkelanjutan menjadi sarana penting dalam menyampaikan informasi yang relevan dan akurat kepada pemangku kepentingan.

1. Metode Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan

   Metode komunikasi yang digunakan dapat bervariasi, berikut beberapa contoh yang umum digunakan, yaitu:

   a. Laporan Keuangan Berkelanjutan

      Laporan keuangan berkelanjutan menggabungkan informasi keuangan dengan informasi non-keuangan yang relevan untuk kinerja berkelanjutan entitas. Laporan ini dapat mencakup informasi tentang dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi perusahaan.

Contoh laporan keuangan berkelanjutan adalah:

1) Laporan Keberlanjutan *GRI (Global Reporting Initiative)*, dan
2) Laporan Tahunan Terpadu *(Integrated Annual Report)*.

Misal, PT X sebuah perusahaan manufaktur merilis Laporan Keberlanjutan GRI yang mencantumkan kinerja keuangan serta informasi tentang inisiatif pengurangan emisi gas rumah kaca dan program tanggung jawab sosial perusahaan. Laporan ini disampaikan kepada pemangku kepentingan seperti pemegang saham, pelanggan, dan pemerintah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja berkelanjutan perusahaan.

b. Pertemuan Pemangku Kepentingan

Pertemuan pemangku kepentingan merupakan platform interaktif di mana entitas akuntansi dapat berkomunikasi langsung dengan para pemangku kepentingan. Pertemuan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk rapat pemangku kepentingan, konferensi, atau forum terbuka.

Contoh pertemuan pemangku kepentingan, Bank ABC mengadakan pertemuan tahunan dengan pemangku kepentingan utamanya, termasuk nasabah, karyawan, dan masyarakat setempat. Pada pertemuan ini, bank menyampaikan informasi tentang upaya mereka dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui program kredit mikro dan juga mendengarkan masukan dan umpan balik dari pemangku kepentingan.

c. Media Sosial

Media sosial menjadi alat yang semakin penting dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Perusahaan dapat menggunakan platform ini untuk berbagi informasi tentang kinerja berkelanjutan, menanggapi pertanyaan atau masukan, dan mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan secara langsung.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN OPINI PUBLIK

Platform media sosial memberikan sarana interaktif yang kuat untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Melalui platform ini, entitas akuntansi dapat membagikan informasi tentang kinerja berkelanjutan, menanggapi pertanyaan atau masukan, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam diskusi yang lebih luas.

Contoh, PT Y sebuah perusahaan teknologi menggunakan akun media sosial mereka untuk berbagi *update* tentang program pengurangan limbah elektronik dan penggunaan energi terbarukan. Mereka juga berinteraksi dengan pengikut mereka melalui komentar dan pesan pribadi, menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang upaya berkelanjutan yang mereka lakukan.

2. Manfaat Komunikasi Efektif dengan Pemangku Kepentingan

Komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan akan membawa manfaat yang signifikan, seperti:

a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas akuntansi terhadap pemangku kepentingan.
b. Membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan.
c. Memperkuat citra perusahaan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi entitas.
d. Membuka peluang untuk mendapatkan masukan dan umpan balik yang berharga dari pemangku kepentingan.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas akuntansi terhadap pemangku kepentingan

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas akuntansi terhadap pemangku kepentingan adalah salah satu manfaat utama dari komunikasi yang efektif dalam praktik akuntansi berkelanjutan. Transparansi mengacu pada penyediaan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses, sedangkan akuntabilitas mengacu pada kewajiban

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

entitas untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka.

a. Entitas akuntansi dapat membangun kepercayaan yang kuat dengan pemangku kepentingan dengan meningkatkan transparansi.

   Pemberian informasi yang jelas dan akurat tentang kinerja berkelanjutan mereka, entitas dapat memastikan bahwa pemangku kepentingan memiliki keyakinan terhadap praktik dan komitmen yang dijalankan.

   Sebagai contoh, perusahaan farmasi mengumumkan kepada publik secara terbuka daftar bahan kimia yang digunakan dalam produk-produk mereka, serta kebijakan dan prosedur yang dijalankan untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Hal ini memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan bahwa perusahaan tersebut beroperasi dengan transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola risiko lingkungan.

b. Entitas akuntansi dapat mengidentifikasi risiko dan peluang yang relevan dalam konteks berkelanjutan dengan meningkatkan transparansi.

   Informasi yang terbuka dan terstruktur membantu pemangku kepentingan dalam memahami dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan entitas tersebut, serta memberikan kesempatan untuk memberikan saran atau umpan balik yang berharga.

   Sebagai contoh, sebuah perusahaan pertambangan menyediakan laporan keuangan berkelanjutan yang mencakup informasi tentang penggunaan sumber daya alam, emisi gas rumah kaca, dan kegiatan pemulihan lingkungan. Informasi ini membantu pemangku kepentingan seperti investor dan masyarakat lokal untuk mengidentifikasi risiko lingkungan, serta peluang dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan inovasi teknologi yang lebih ramah lingkungan.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTANSI KADA DAN SEKTOR PUBLIK

c. Entitas akuntansi dapat merespons kekhawatiran dan permintaan pemangku kepentingan dengan lebih efektif dengan meningkatkan transparansi.

Komunikasi yang terbuka memungkinkan entitas untuk mendengarkan dan mengatasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan, serta menyampaikan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja berkelanjutan mereka.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan ritel menerima keluhan dari pemangku kepentingan tentang kondisi kerja yang buruk di pabrik-pabrik pemasok mereka. Perusahaan tersebut merespons dengan meningkatkan transparansi dan membentuk kebijakan baru yang memastikan kondisi kerja yang lebih adil dan aman di seluruh rantai pasokan mereka. Mereka juga secara terbuka membagikan informasi tentang proses audit dan pemantauan yang mereka lakukan untuk memastikan kepatuhan pemasok terhadap standar kerja yang setara.

Dalam semua contoh yang telah disebutkan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas membantu entitas akuntansi untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan, mendorong kepercayaan, mengidentifikasi risiko dan peluang, serta merespons kekhawatiran dan permintaan yang relevan. Dalam praktiknya, entitas dapat menggunakan berbagai mekanisme komunikasi seperti laporan keuangan berkelanjutan, pertemuan pemangku kepentingan, dan platform media sosial untuk mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan

Membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan merupakan tujuan penting dalam komunikasi dalam konteks akuntansi berkelanjutan. Kepercayaan adalah fondasi yang mendasari hubungan yang

sehat antara entitas akuntansi dan pemangku kepentingan. Hubungan yang kuat dapat memberikan manfaat jangka panjang seperti dukungan, kolaborasi, dan kesempatan untuk menciptakan nilai bersama.

a. Dukungan pemangku kepentingan,

Entitas akuntansi dapat mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan untuk inisiatif berkelanjutan mereka dengan membangun kepercayaan. Pemangku kepentingan yang percaya akan komitmen dan integritas entitas lebih mungkin untuk memberikan dukungan finansial, membeli produk atau layanan, atau mendukung upaya perusahaan dalam mencapai tujuan berkelanjutan mereka.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan teknologi mengumumkan target pengurangan emisi gas rumah kaca mereka dan mendapatkan dukungan pemegang saham utama dalam bentuk investasi. Dukungan ini memungkinkan perusahaan untuk melaksanakan inisiatif hijau yang memerlukan investasi modal yang signifikan.

b. Kolaborasi dan kemitraan

Membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan dapat membuka pintu untuk kolaborasi dan kemitraan yang saling menguntungkan. Dalam beberapa kasus, entitas akuntansi dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan yang kompleks dan membangun solusi bersama.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan perkebunan berkelanjutan menjalin kemitraan dengan kelompok petani lokal dan organisasi lingkungan untuk mempromosikan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Melalui kolaborasi ini, perusahaan dapat mengakses sumber daya lokal, pengetahuan tradisional, dan memperoleh kepercayaan dan dukungan dari komunitas setempat.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN OPINI PUBLIK

c. Penciptaan nilai bersama

Membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi entitas akuntansi dan pemangku kepentingan mereka. Melalui dialog yang terbuka dan kolaborasi yang berkelanjutan, entitas dapat mengidentifikasi peluang untuk mengintegrasikan kebutuhan pemangku kepentingan dalam strategi bisnis mereka, menciptakan keunggulan kompetitif, dan mempromosikan pertumbuhan jangka panjang.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur mengadopsi pendekatan kemitraan dengan pemasoknya untuk meningkatkan kinerja berkelanjutan. Mereka menyadari bahwa dengan mengintegrasikan pemasok dalam inisiatif berkelanjutan mereka, mereka dapat mengurangi risiko rantai pasokan dan meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai hasilnya, perusahaan berhasil mengurangi biaya logistik sebesar 10% dan meningkatkan efisiensi produksi sebesar 15%, yang menghasilkan penghematan total sebesar $500.000 dalam satu tahun.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Dalam kasus-kasus di atas, membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan membawa manfaat seperti dukungan, kolaborasi, dan penciptaan nilai bersama. Ilustrasi perhitungan juga menunjukkan bahwa investasi dalam membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dapat menghasilkan penghematan biaya dan peningkatan efisiensi, yang berdampak pada kinerja finansial dan berkelanjutan perusahaan secara keseluruhan. Walaupun, contoh dan perhitungan yang diberikan disini bersifat hipotetis dan dapat bervariasi tergantung pada konteks, jenis industri, dan skala entitas akuntansi.

Memperkuat citra perusahaan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi entitas

Memperkuat citra perusahaan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi entitas adalah hasil yang diinginkan dari membangun komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan dalam praktik akuntansi berkelanjutan. Citra perusahaan yang kuat dan nilai jangka panjang dapat membawa manfaat seperti keunggulan kompetitif, kepercayaan pelanggan, dan keberlanjutan bisnis yang berkelanjutan.

a. Keunggulan kompetitif

Entitas akuntansi dapat membedakan diri dari pesaingnya dan menciptakan keunggulan kompetitif dengan memperkuat citra perusahaan yang berkelanjutan. Konsumen yang semakin peduli terhadap isu-isu berkelanjutan lebih mungkin memilih produk atau layanan dari perusahaan yang memiliki reputasi baik dalam hal praktik sosial dan lingkungan.

Contoh, sebuah merek pakaian berkelanjutan telah secara konsisten mengadopsi praktik produksi yang ramah lingkungan dan memastikan upah yang adil bagi pekerja pabrik mereka. Sebagai hasilnya, merek tersebut memperoleh citra sebagai merek yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Citra ini membantu merek tersebut memenangkan pangsa pasar yang lebih besar dan meningkatkan loyalitas pelanggan.

b. Kepercayaan pelanggan

Entitas akuntansi dapat membangun kepercayaan pelanggan dengan melakukan komunikasi yang transparan dan terbuka. Konsumen yang merasa yakin terhadap komitmen entitas terhadap praktik berkelanjutan akan lebih cenderung mempertahankan loyalitas mereka dan merekomendasikan perusahaan kepada orang lain.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN OPINI PUBLIK

Contoh, sebuah perusahaan makanan menyediakan informasi yang terperinci tentang sumber bahan baku mereka, praktik pertanian yang berkelanjutan, dan dampak lingkungan produk-produk mereka. Hal ini memberikan keyakinan kepada pelanggan bahwa perusahaan tersebut beroperasi dengan tanggung jawab dan menghasilkan produk yang berkualitas. Kepercayaan ini dapat membantu perusahaan mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan.

c. Keberlanjutan bisnis

Entitas akuntansi dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi bisnis mereka dengan membangun citra yang positif dalam praktik berkelanjutan. Investasi dalam praktik berkelanjutan yang menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat membantu entitas menciptakan nilai yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko yang terkait dengan perubahan kebijakan atau tuntutan pemangku kepentingan.

Contoh, sebuah perusahaan manufaktur yang beralih ke sumber energi terbarukan berhasil mengurangi biaya energi mereka sebesar 20% dalam satu tahun. Selain itu, mereka mendapatkan insentif pajak dan pengurangan biaya operasional jangka panjang karena ketergantungan yang lebih rendah pada sumber energi fosil. Perhitungan ini menunjukkan bahwa investasi dalam praktik berkelanjutan dapat menghasilkan penghematan biaya dan keuntungan jangka panjang bagi entitas. Contoh dan perhitungan yang diberikan di sini bersifat hipotetis dan dapat bervariasi tergantung pada konteks, jenis industri, dan skala entitas akuntansi.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY KONSULTAN PADA BIDANG PUBLIK

Membuka peluang untuk mendapatkan masukan dan umpan balik yang berharga dari pemangku kepentingan

Membuka peluang untuk mendapatkan masukan dan umpan balik yang berharga dari pemangku kepentingan merupakan aspek penting dalam komunikasi dengan pemangku kepentingan dalam konteks akuntansi berkelanjutan. Masukan dan umpan balik dari pemangku kepentingan dapat memberikan wawasan berharga tentang isu-isu yang relevan, kebutuhan mereka, dan harapan yang diinginkan. Hal ini dapat membantu entitas akuntansi dalam menginformasikan keputusan strategis, meningkatkan kinerja berkelanjutan, dan menciptakan nilai jangka panjang.

a. Memahami isu-isu penting

   Entitas akuntansi dapat memperoleh wawasan tentang isu-isu sosial, lingkungan, dan ekonomi yang relevan dalam konteks operasional mereka dengan membuka dialog dengan pemangku kepentingan. Masukan ini dapat membantu entitas dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu yang paling penting dan merancang strategi berkelanjutan yang lebih efektif.

   Contoh, sebuah perusahaan makanan mengadakan pertemuan dengan kelompok advokasi lingkungan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak lingkungan dari rantai pasokan mereka. Melalui dialog ini, perusahaan memperoleh wawasan tentang isu-isu seperti deforestasi dan penggunaan pestisida yang berlebihan. Informasi ini membantu perusahaan dalam merancang kebijakan dan praktik yang lebih berkelanjutan.

b. Mengidentifikasi peluang dan risiko

   Entitas akuntansi dapat mengidentifikasi peluang baru untuk inovasi berkelanjutan dan memitigasi risiko yang terkait dengan praktik yang tidak berkelanjutan dengan memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan. Masukan yang diberikan oleh pemangku

LARISA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

kepentingan dapat membantu entitas dalam mengidentifikasi tren pasar, kebutuhan konsumen, serta perubahan regulasi dan kebijakan yang relevan.

Contoh, sebuah perusahaan teknologi mengadakan survei kepada pelanggan dan mitra bisnis untuk mendapatkan pemahaman tentang preferensi mereka terkait produk ramah lingkungan dan kebutuhan akan teknologi yang lebih berkelanjutan. Berdasarkan umpan balik tersebut, perusahaan mengembangkan produk baru yang menggunakan bahan daur ulang dan memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi. Hal ini membantu perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan mengantisipasi perubahan permintaan pasar.

c. Perbaikan kinerja berkelanjutan

Masukan dan umpan balik dari pemangku kepentingan dapat membantu entitas akuntansi dalam mengidentifikasi area perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja berkelanjutan mereka. Entitas dapat mengambil tindakan yang relevan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan mereka dengan memperoleh informasi langsung dari pemangku kepentingan.

Contoh, sebuah perusahaan manufaktur mengadakan konsultasi dengan para pekerja dan serikat pekerja untuk mendapatkan masukan tentang kondisi kerja dan kebutuhan mereka terkait kesejahteraan dan keselamatan. Berdasarkan umpan balik tersebut, perusahaan memperbaiki sistem keselamatan kerja dan memberikan pelatihan yang lebih baik kepada pekerja. Akibatnya, tingkat kecelakaan kerja menurun sebesar 30% dan produktivitas meningkat sebesar 15% dalam satu tahun.

Entitas akuntansi dapat mencapai tingkat komunikasi yang lebih baik dengan pemangku kepentingan mereka dengan menggunakan berbagai metode komunikasi seperti laporan keuangan berkelanjutan, pertemuan pemangku

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

kepentingan, dan media sosial. Hal ini membantu membangun hubungan yang saling menguntungkan dan memastikan bahwa informasi tentang kinerja berkelanjutan disampaikan secara efektif dan transparan kepada semua pemangku kepentingan yang relevan.

C. Tanggapan Pemangku Kepentingan terhadap Laporan Keuangan Berkelanjutan

Tanggapan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan berkelanjutan adalah respons atau reaksi yang diberikan oleh individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dan terpengaruh oleh kinerja berkelanjutan suatu entitas. Tanggapan ini dapat beragam, mulai dari tanggapan positif yang mendukung hingga tanggapan negatif yang kritis. Tanggapan tersebut dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pemangku kepentingan mengevaluasi dan menafsirkan informasi dalam laporan keuangan berkelanjutan serta dampaknya terhadap persepsi mereka terhadap entitas akuntansi.

Laporan keuangan berkelanjutan dapat memicu tanggapan yang beragam dari pemangku kepentingan. Tanggapan positif meliputi meningkatnya kepercayaan, identifikasi peluang dan risiko, dan peningkatan citra perusahaan. Namun, ada juga kemungkinan terjadinya tanggapan negatif, seperti ketidakpuasan terhadap kinerja berkelanjutan atau dugaan greenwashing.

Laporan keuangan berkelanjutan yang komprehensif dan akurat dapat membantu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap entitas akuntansi. Mereka dapat melihat bagaimana entitas mengelola dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi mereka secara transparan.

1. Tanggapan positif

   Tanggapan positif terjadi ketika pemangku kepentingan merespons laporan keuangan berkelanjutan dengan dukungan, pengakuan, dan apresiasi terhadap praktik berkelanjutan yang dilakukan oleh entitas akuntansi.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Ini dapat memperkuat kepercayaan, meningkatkan citra perusahaan, dan memunculkan tanggapan yang menguntungkan dari pemangku kepentingan.

Contoh, sebuah perusahaan energi mengumumkan dalam laporan keuangan berkelanjutan mereka bahwa mereka telah mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca yang ambisius. Sebagai respons, investor dan pemegang saham memberikan tanggapan positif dengan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan dan mempertahankan investasi mereka. Tanggapan positif ini juga dapat berdampak pada peningkatan nilai saham perusahaan.

2. Tanggapan negatif

   Tanggapan Negatif dari pemangku kepentingan dapat terjadi jika terdapat ketidaksesuaian antara tindakan nyata perusahaan dan klaim yang terdapat dalam laporan keuangan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemangku kepentingan mungkin meragukan kinerja berkelanjutan perusahaan atau mencurigai praktik *greenwashing*.

3. Tanggapan kritis

   Tanggapan kritis terjadi ketika pemangku kepentingan menyuarakan ketidakpuasan, kritik, atau kekhawatiran terhadap laporan keuangan berkelanjutan. Tanggapan ini dapat muncul jika ada ketidaksesuaian antara tindakan nyata perusahaan dan klaim yang terdapat dalam laporan, atau jika ada dugaan praktik greenwashing atau manipulasi informasi.

   Contoh, sebuah perusahaan makanan mengklaim dalam laporan keuangan berkelanjutan mereka bahwa mereka sepenuhnya berkomitmen untuk memastikan rantai pasokan bebas dari deforestasi. Namun, pemangku kepentingan seperti organisasi lingkungan mendeteksi adanya bukti bahwa perusahaan masih terkait dengan pemasok yang terlibat dalam deforestasi. Sebagai respons, organisasi lingkungan memberikan tanggapan kritis dan

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

menekankan perlunya perusahaan untuk memperbaiki kebijakan dan praktik mereka.

4. Permintaan informasi tambahan

   Tanggapan pemangku kepentingan juga dapat berupa permintaan informasi tambahan atau klarifikasi terkait laporan keuangan berkelanjutan. Pemangku kepentingan mungkin membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang metode pengukuran, kebijakan, atau tujuan yang terdapat dalam laporan untuk memahami informasi dengan lebih baik.

   Contoh, sebuah perusahaan manufaktur merilis laporan keuangan berkelanjutan yang mencantumkan indikator kinerja lingkungan mereka, seperti penggunaan air dan limbah yang dihasilkan. Pemangku kepentingan, seperti organisasi non-pemerintah, menanggapi dengan meminta informasi tambahan tentang metode pengukuran dan sumber data yang digunakan dalam laporan. Permintaan ini mendorong perusahaan untuk menyediakan penjelasan yang lebih rinci dan transparan, sehingga pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi laporan dengan lebih baik.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Perhitungan yang terkait dengan tanggapan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan berkelanjutan lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Sebagai contoh, perusahaan dapat melacak jumlah dan sifat tanggapan yang diterima, seperti tanggapan positif dari investor atau tanggapan kritis dari organisasi lingkungan. Selain itu, perusahaan dapat melakukan survei atau wawancara untuk memperoleh masukan lebih mendalam dari pemangku kepentingan terkait persepsi dan dampak laporan keuangan berkelanjutan mereka.

D. Pengaruh Pemangku Kepentingan terhadap Kinerja Berkelanjutan

Pemangku kepentingan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja berkelanjutan entitas akuntansi. Mereka dapat mempengaruhi perubahan dan inovasi dalam praktik berkelanjutan serta mendorong perusahaan untuk mengadopsi kebijakan yang lebih baik dalam hal lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.

Investor yang peduli terhadap kinerja berkelanjutan dapat mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan faktor lingkungan dan sosial dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam hal ini, pemangku kepentingan keuangan dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam memajukan praktik berkelanjutan.

Organisasi non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat mempengaruhi kinerja berkelanjutan perusahaan melalui advokasi, kampanye, dan pemantauan. Mereka dapat menyuarakan kepentingan masyarakat dan lingkungan serta menekan perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Organisasi LSM dapat memastikan bahwa mereka terlibat dengan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam pelaporan keberlanjutan dengan melakukan langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi pemangku kepentingan
   Perusahaan harus mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan.
2. Komunikasi terbuka
   Perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki saluran komunikasi terbuka dengan semua pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat memberikan umpan balik dan berpartisipasi dalam proses pelaporan keberlanjutan.

3. Melibatkan pemangku kepentingan
   Perusahaan harus melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan strategis untuk memastikan bahwa kepentingan mereka dipertimbangkan.
4. Transparansi
   Perusahaan harus memastikan bahwa mereka memberikan informasi yang jelas dan transparan dalam pelaporan keberlanjutan, termasuk informasi tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka terlibat dengan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam pelaporan keberlanjutan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN,SURVEY,KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

BAB 15

AUDIT DAN *ASSURANCE* DALAM AKUNTANSI BERKELANJUTAN

Made Dudy Satyawan, S.E.,Ak.,M.Si.,CA.,CPA.,CTA.,BKP
Universitas Negeri Surabaya

A. Peran Audit dalam Akuntansi Berkelanjutan

Regulator dibawah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan-peraturan bagi perusahaan di Indonesia dengan kriteria tertentu untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif dalam sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup atau dikenal dengan sebutan "Roadmap Keuangan Berkelanjutan" sebagaimana yang tertuang di dalam peraturan – peraturan pemerintah Republik Indonesia seperti (Otoritas Jasa Keuangan, 2017): POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dan; SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pemerintah Indonesia berkomitmen membuat kebijakan mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan mengintegrasikan instrumen ekonomi ke dalam kebijakan

ramah lingkungan hidup di bidang perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank. Untuk mewujudkannya, maka lahirlah peraturan-peraturan dari OJK yang bersifat teknis dan implementatif diperuntukkan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik agar memiliki kesadaran dan komitmen terhadap pelaksanaan prinsip Keuangan Berkelanjutan, berkontribusi dalam pengembangan produk berupa barang dan jasa yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, dengan adanya pengaturan ini diharapkan akan tercipta kondisi persaingan yang sehat serta menghindari adanya aktivitas arbitrase yang merugian salah satu pihak. Untuk itu terdapat beberapa tujuan dari penerapan Keuangan Berkelanjutan yaitu :

1. Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai;
2. Meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik melalui pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup yang lebih baik dengan cara mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan;
3. Mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan Lingkungan Hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam; dan
4. Mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan.

Sebagaimana disebutkan pula dalam peraturan tersebut yang didefinisikan sebagai laporan berkelanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEI KONSULTAN PILKADA ANALISIS OPINI PUBLIK

dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Berikut adalah tren waktu dipublikasikannya laporan keberlanjutan dari perusahaan-perusahaan yang telah menyusun laporan keberlanjutan yang dapat diakses oleh publik dari website OJK, sebagai berikut :

Tabel 13.1. Tren Waktu dipublikasikannya Laporan Keberlanjutan Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik Periode Tahun 2019-2023 (5 Tahun Terakhir)

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
Perbankan	10	11	0	7	89
IKNB	0	1	0	57	0
Pasar Modal	1	1	0	0	0
Total	11	13	0	64	89

Sumber: www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/id/Publication, diakses per 19 Juni 2023.

Semakin meningkat-nya kesadaran dan komitmen perusahaan berkategori LJK, Emiten dan Perusahaan Publik dalam mempublikasikan laporan berkelanjutan (*Sustainability Reporting*) berdasarkan POJK nomor 51/03/2017 tersebut menjadikan situasi dimana oleh asosiasi profesi Akuntan Publik IAPI melihatnya sebagai peluang bagi profesi auditor untuk dapat mengembangkan peran serta kontribusinya dalam memberikan jasa asurans lainnya diluar laporan keuangan. Oleh sebab itu, Langkah nyata yang dilakukan oleh IAPI melalui Divisi Teknis dan Standar Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan supervisi *Task Force Extended Eksternal Reporting* - IAPI menerbitkan IAPI Newsletter Edisi 1 tahun 2022 (IAPI, 2022a), ditujukkan kepada seluruh anggota profesi auditor di Indonesia dan masyarakat yang membutuhkan informasi terkait sejauh mana kesiapan profesional auditor di bawah naungan IAPI mengambil peran dalam membangun *public trust*. Profesi akuntan publik memiliki kesempatan memenuhi permintaan yang semakin meningkat dari pengguna laporan keberlanjutan

(misalnya : investor, regulator, entitas, dan pemangku kepentingan lainnya) atas pemberian asurans. Terdapat beberapa alasan manfaat mengapa diperlukan asurans dari akuntan publik atas laporan keberlanjutan, yaitu :

1. Memastikan kredibilitas, keandalan, dan akurasi pengungkapan nonkeuangan dalam laporan tahunan dan terintegrasi;
2. Memperkuat kesadaran internal entitas tentang risiko dan peluang keberlanjutan yang material
3. Mendorong entitas untuk meningkatkan sistem, proses, dan pengendalian internal mengenai pengumpulan dan pelaporan data ESG;
4. Entitas menjadi lebih siap jika laporan asurans atas pelaporan keberlanjutan menjadi hal yang mandatori;
5. Entitas memiliki kesempatan untuk membuat tolok ukur atas pengungkapan keberlanjutan serta meningkatkan kualitas keseluruhan pengungkapan keberlanjutan.

Akuntan publik dapat menjadi bagian dari perubahan untuk mewujudkan dunia yang lebih baik, dengan terlibat aktif menjaga kredibilitas serta public trust laporan keberlanjutan. Untuk itu akuntan publik harus mempersiapkan diri dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki melalui pendidikan profesional berkelanjutan (ppl) dengan topik-topik seperti "Penerapan Standar Perikatan Asurans/SPA 3000 (Revisi 2022) pada Perikatan Asurans Pelaporan Keberlanjutan dan Pelaporan Eksternal yang Diperluas.

B. Standar Audit untuk Akuntansi Berkelanjutan

Standar Pengungkapan Keberlanjutan semakin berkembang dengan pembentukkan International Sustainability Standards Board (ISSB) oleh International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation pada November 2021, bertujuan untuk mengembangkan *global baseline* yang komprehensif atas standar pengungkapan berkelanjutan yang berkualitas tinggi dengan menyediakan informasi material yang signifikan

mengenai risiko dan peluang terkait keberlanjutan suatu entitas kepada investor, pelaku pasar modal, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. ISSB pada Maret 2022 menerbitkan *Exposure Draft* (ED) yaitu IFRS S1 *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* dan IFRS S2 *Climate-related Disclosures*. Tujuan keduanya adalah untuk menghasilkan standar pelaporan keberlanjutan yang lebih *reliable, consistent, comparable*, dan *assurable*.

Sejalan dengan perkembangan standar pelaporan keberlanjutan tersebut, IAPI sebagai induk organisasi tunggal dari para professional akuntan publik di Indonesia pada Desember 2022 telah melakukan pengadopsian International Standar Assurance Engagements/ISAE 3000 (Revised) yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)-International Federation of Accountants (IFAC). SPA 3000 (Revisi 2022), "Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" telah disetujui oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik pada tanggal 2 Desember 2022 dan berlaku efektif untuk perikatan asurans yang surat perikatannya tertanggal pada atau setelah 1 Januari 2024, penerapan dini diperkenankan. Standar ini diperuntukkan kepada profesi akuntan publik dalam pemberian jasa asuransi atas laporan akuntansi keberlanjutan.

C. Proses Audit Akuntansi Berkelanjutan

Berdasarkan contoh perikatan yang dapat dilakukan menurut SPA 3000 (Revisi 2022) ini adalah Pelaporan Keberlanjutan, yaitu suatu perikatan atas keberlanjutan yang melibatkan pemerolehan asurans atas suatu laporan yang disusun oleh manajemen atau pakar manajemen (pengukur dan pengevaluasi) atas kinerja keberlanjutan entitas. Berikut adalah tahapan-tahapan dari proses audit atas laporan keberlanjutan yang dimulai dari :

1. Penerimaan dan Keberlanjutan
   a. Prakondisi untuk perikatan asuransi

b. Pembatasan ruang lingkup sebelum penerimaan perikatan
c. Kesepakatan ketentuan perikatan
d. Penerimaan suatu perubahan dalam ketentuan perikatan
e. Laporan asurans yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Pengendalian Mutu
   a. Karakteristik rekan perikatan
   b. Penugasan tim
   c. Tanggung jawab rekan perikatan
   d. Penelahaan pengendalian mutu perikatan
3. Skeptisisme Profesional, Pertimbangan Profesional, serta Kemampuan dan Teknik Asuransi
4. Perencanaan dan Pelaksanaan Perikatan
   a. Perencanaan
   b. Materialitas
   c. Pemahaman hal pokok pendasar dan kondisi perikatan lain
5. Pemerolehan Bukti
   a. Pertimbangan atas risiko dan respon terhadap risiko
   b. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh pakar praktisi
   c. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh praktisi lain, pakar dari pihak yang bertanggung jawab atasu dari pengukur atau pengevaluasi atau auditor internal
   d. Representasi tertulis
   e. Representasi tertulis yang diminta tidak tersedia atau tidak dapat diandalkan
6. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
7. Informasi Lain
8. Deskripsi atas Kriteria yang Berlaku
9. Perumusan Suatu Kesimpulan Asurans
10. Penyusunan Laporan Asurans
11. Kesimpulan Tanpa Modifikasian dan Kesimpulan Modifikasian

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

12. Tanggung Jawab Komunikasi Lain
    a. Komunikasi kepada Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
    b. Pelaporan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Diidentifikasi atau Diduga Terjadi Kepada Otoritas yang Tepat di Luar Entitas
13. Dokumentasi
    a. Pengumpulan Kertas Kerja Perikatan Final

D. Assurance Laporan Keuangan Berkelanjutan

Semua perikatan asurans memiliki setidaknya tiga pihak : pihak yang bertanggung jawab, praktisi, dan pengguna yang dituju. Bergantung pada kondisi perikatan, mungkin juga terdapat peran yang terpisah dari pengukur atau pengevaluasi, atau pihak yang melakukan perikatan. Gambar 15.1./Diagram di bawah ini mengilustrasikan bagaimana peran berikut ini berhubungan dengan perikatan asurans atas laporan keuangan berkelanjutan :

1. Pihak yang bertanggung jawab memiliki tanggung jawab atas hal pokok pendasar.
2. Pengukur atau pengevaluasi menggunakan kriteria untuk mengukur atau mengevaluasi hal pokok pendasar untuk menghasilkan informasi hal pokok.
3. Pihak yang melakukan perikatan menyepakati ketentuan perikatan dengan praktisi.
4. Praktisi memperoleh bukti cukup dan tepat untuk menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan derajat keyakinan pengguna.
5. Pengguna yang dituju membuat keputusan berdasarkan informasi hal pokok. Pengguna yang dituju adalah individu atau organisasi, atau grup yang diekspektasikan oleh praktisi akan menggunakan laporan asurans.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

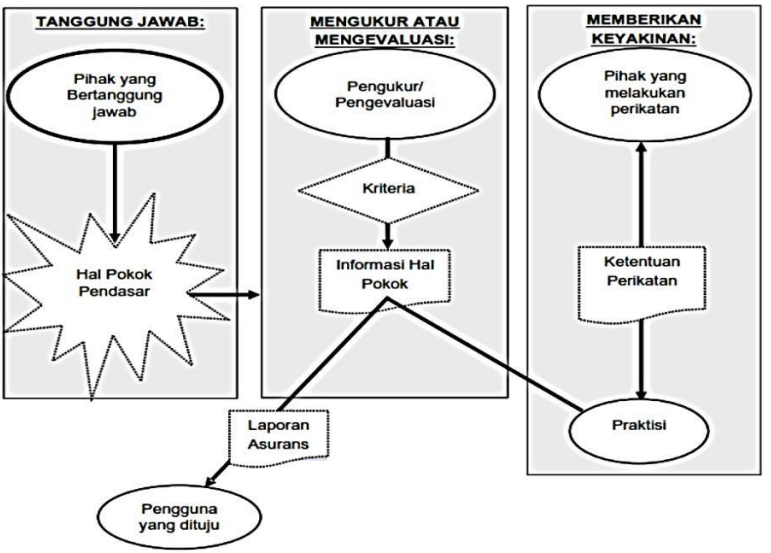

Gambar 12.1. Ilustrasi Peran dan Tanggung Jawab
Sumber : (IAPI, 2022)

Kesimpulan praktisi dapat diungkapkan dalam bentuk : Hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku; Informasi hal pokok dan kriteria yang berlaku; atau Pernyataan yang dibuat oleh pihak yang tepat. Praktisi dan pihak yang bertanggung jawab dapat menyepakati untuk menerapkan prinsip SPA 3000 (Revisi 2022) ke dalam perikatan Ketika tidak terdapat pengguna yang dituju selain pihak yang bertanggung jawab namun semua ketentuan lain dari SPA harus terpenuhi. Dalam kondisi demikian, laporan praktisi mencantumkan pernyataan yang membatasi penggunaan laporan kepada pihak yang bertanggung jawab.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK

Berikut adalah contoh laporan keberlanjutan yang telah mendapatkan asuransi dari praktisi akuntan publik.

Moores Rowland

Independent Assurance Statement
Report No. 0322/BD/0006/JK

To the Management of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,

We were engaged by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ('Bank Mandiri') to provide assurance in respect to its Sustainability Report 2021 ('the Report'). The assurance engagement was conducted by a multidisciplinary team with relevant experience in sustainability reporting.

Independence

We carried out our assurance with independence and autonomy having not been involved in the preparation of any key part of the Report, nor did we provide any services to Bank Mandiri during 2021 that could conflict with the independence of the assurance engagement.

Assurance Standards

Our work was carried out in accordance with ISAE3000 'Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information' issued by the International Auditing and Assurance Standards Board. This standard requires that we comply with ethical requirements and plan, and perform the assurance engagement to obtain limited assurance.

Level of Assurance

By designing our evidence-gathering procedures to obtain a limited level of assurance based on ISAE3000, readers of the Report can be confident that all risks or errors have been reduced to a very low level, although not necessarily to zero.

Scope of Assurance

The scope of our work is restricted to following selected information:

- Sustainable finance management
- Partnership and community stewardship programme
- Human resources management.

Responsibility

Bank Mandiri is responsible for the preparation of the Report and all information and claims therein, which include established sustainability management targets, performance management, data collection, etc. In performing this engagement, our responsibility to the management of Bank Mandiri is solely to verify the statements it has made concerning its sustainability performance, specifically as described in the selected information, and expressing our opinion on the conclusions reached.

Methodology

In order to assess the veracity of certain assertions and specified data sets included within the Report, as well as the systems and processes used to manage and report them, the following methods were employed during the engagement process:

- Review of the Report, internal policies, documentation, management and information systems;

PT. Moores Rowland Indonesia
Jl. Sisingamangaraja No. 26 – Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Tel: +62 21 720 2605 - Fax: +62 21 720 2606 - www.moores-rowland.com

PRAXITY
Empowering Business Globally

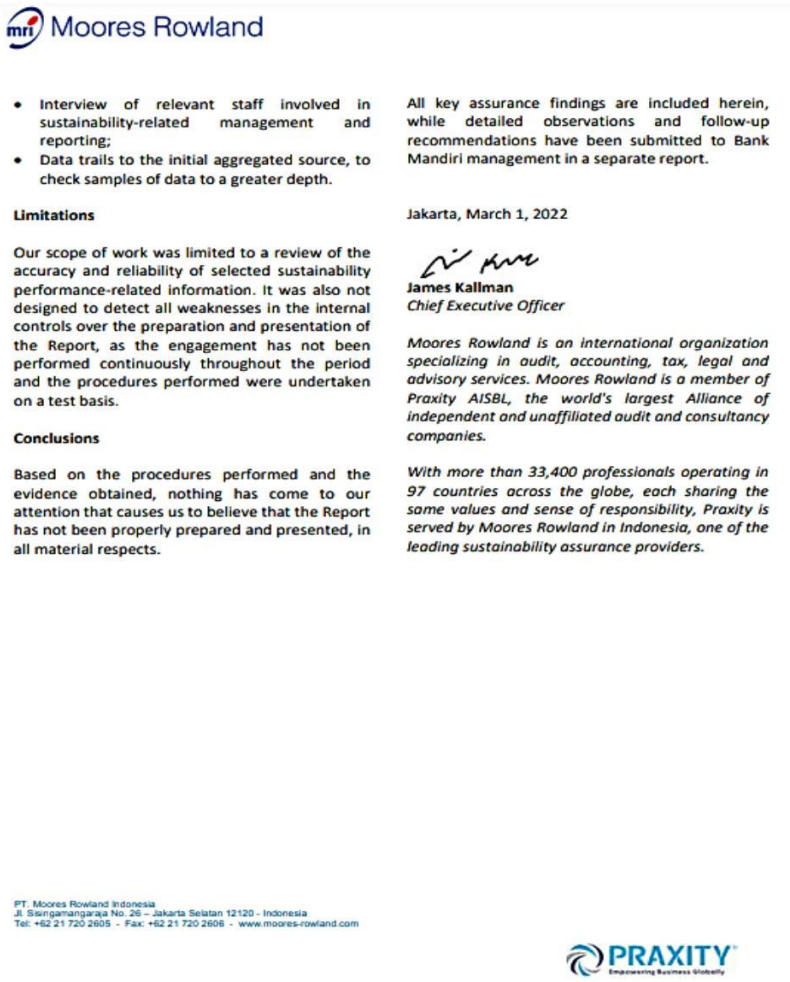

Moores Rowland

- Interview of relevant staff involved in sustainability-related management and reporting;
- Data trails to the initial aggregated source, to check samples of data to a greater depth.

Limitations

Our scope of work was limited to a review of the accuracy and reliability of selected sustainability performance-related information. It was also not designed to detect all weaknesses in the internal controls over the preparation and presentation of the Report, as the engagement has not been performed continuously throughout the period and the procedures performed were undertaken on a test basis.

Conclusions

Based on the procedures performed and the evidence obtained, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Report has not been properly prepared and presented, in all material respects.

All key assurance findings are included herein, while detailed observations and follow-up recommendations have been submitted to Bank Mandiri management in a separate report.

Jakarta, March 1, 2022

James Kallman
Chief Executive Officer

Moores Rowland is an international organization specializing in audit, accounting, tax, legal and advisory services. Moores Rowland is a member of Praxity AISBL, the world's largest Alliance of independent and unaffiliated audit and consultancy companies.

With more than 33,400 professionals operating in 97 countries across the globe, each sharing the same values and sense of responsibility, Praxity is served by Moores Rowland in Indonesia, one of the leading sustainability assurance providers.

PT. Moores Rowland Indonesia
Jl. Sisingamangaraja No. 26 – Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Tel: +62 21 720 2605 - Fax: +62 21 720 2606 - www.moores-rowland.com

PRAXITY
Empowering Business Globally

Gambar 15.2. Ilustrasi Laporan Asurans Independen
Sumber : (Bank Mandiri (Persero) Tbk, 2021)

BAB 16 ETIKA DAN PROFESIONALISME DALAM AKUNTANSI BERKELANJUTAN

Dr. Dewi Kusuma Wardani, SE, S.Psi., M.Sc., Ak., CA, CRM, BKP, ACPA
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

A. Etika dalam Praktik Akuntansi Berkelanjutan

Keberlanjutan adalah konsep penting yang dirujuk secara luas dan telah dicapai dukungan luas. Namun secara inheren tetap sulit untuk diimplementasikan karena kompleksitasnya dan karena perubahan besar dalam pemikiran yang diusulkannya. Yang menantang adalah pengembangan dan implementasi teknologi, yang sebagian besar memilikinya potensi konsekuensi negatif yang signifikan bagi kesehatan manusia dan planet.

Keberlanjutan umumnya dipahami sebagai perlunya keseimbangan antara kesehatan ekologi, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Itu didasarkan pada komitmen etika untuk kesejahteraan tidak hanya populasi saat ini, tetapi juga kesejahteraan dan peningkatan peluang generasi mendatang. Semua profesi memiliki tanggung jawab karena pengetahuan dan teknologi yang mereka kembangkan dan gunakan memiliki dampak besar pada lingkungan alam ekonomi, dan pemberdayaan warga negara dan masyarakat. Apalagi usaha dan prestasi mereka dapat terus menghasilkan efek, baik atau buruk, jauh di masa depan.

Tanggung jawab keberlanjutan merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengabaikan kebutuhan masa depan. Keberlanjutan didasarkan *triple bottom line* (TBL), yakni sinergi tiga unsur ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga elemen ini, disebut juga 3P (*profit, people, planet*), merupakan kunci terpenting dalam konsep keberlanjutan. Sebuah perusahaan dapat disebut berkelanjutan ketika semua operasi dan proses produksinya secara aktif mempromosikan perlindungan lingkungan dan memungkinkan masyarakat untuk tumbuh lebih kuat dan sejahtera, tetap ada, dan tetap bermanfaat.

Perusahaan yang mempraktikkan akuntansi berkelanjutan berdasarkan etika bisnis yang strategis dan berkelanjutan dapat membangun citra positif dan mendapatkan kepercayaan dan dukungan publik. Karena ketika sebuah perusahaan menjalankan bisnisnya dengan benar dan mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka pemerintah dan masyarakat menawarkan keleluasaan perusahaan untuk beroperasi di bidangnya. Citra positif ini merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi perusahaan untuk bertahan dari krisis.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Perusahaan menyadari pentingnya penerapan akuntansi berkelanjutan dalam menciptakan citra perusahaan yang positif dan memandang akuntansi berkelanjutan sebagai investasi di masa depan. Logikanya sederhana, jika akuntansi berkelanjutan diabaikan, terjadi penyimpangan dan biaya yang dihemat dengan tidak menggunakan akuntansi berkelanjutan melebihi biaya yang dikeluarkan. Dikecualikan adalah risiko non-keuangan, seperti hilangnya citra Perusahaan.

Penerapan akuntansi berkelanjutan di Indonesia. Benarkah akuntansi berkelanjutan perusahaan didasarkan pada tanggung jawab moral perusahaan kepada masyarakat atau hanya menjaga citra perusahaan di mata masyarakat? Penerapan akuntansi berkelanjutan yang hanya berdasarkan proses citra perusahaan dan prinsip kepatuhan terhadap peraturan pemerintah tidak memenuhi syarat moral. Moralitas harus

menjadi keyakinan dan sikap internal dan bukan hanya ketaatan pada aturan negara, adat istiadat atau agama. Mengikuti aturan saja tidak menjamin kualitas moral.

B. Tanggung Jawab Profesional Akuntan dalam Akuntansi Berkelanjutan

Di era globalisasi saat ini, pertumbuhan dan perkembangan industri semakin pesat. Semakin banyak industri yang berkembang berdampak positif pada ekonomi dan praktis pada kehidupan sosial. Meskipun berdampak positif bagi manusia, kegiatan industri juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Suhu bumi meningkat setiap tahun. Selain itu, pertumbuhan industri seringkali mempengaruhi aktivitas penduduk setempat. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami bahwa mereka tidak hanya harus mengutamakan keuntungan, tetapi juga mengutamakan manusia dan planet ini.

Untuk menjamin kelestarian lingkungan dan ekosistem, diperlukan laporan berkelanjutan. Akuntan memainkan peran penting dalam pelaporan akuntansi keuangan. Mempertimbangkan keberlanjutan dapat diartikan sebagai cara mengatasi dampak negatif dengan menggunakan data dan informasi untuk menciptakan dampak positif terhadap ekosistem dan lingkungan.

Pelaporan keberlanjutan sangat penting dan menjadi penting ketika pengguna informasi menggunakannya untuk membuat keputusan bisnis dan lainnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kualitas laporan keberlanjutan dengan reputasi baik perusahaan. Untuk menghubungkan kualitas laporan keberlanjutan perusahaan dengan persepsi reputasi perusahaan.

Agar dapat menyajikan laporan keberlanjutan yang handal dan berkualitas, maka keberlanjutan harus dilakukan. Pengecekan tersebut memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah benar apa adanya, tanpa ada kekurangan atau tambahan apapun. Agar laporan dapat dipertimbangkan, manajemen harus dapat menunjukkan bahwa laporan tersebut

disahkan. Bentuk dan isi laporan Indonesia dipengaruhi oleh standar akuntansi yang ditetapkan oleh berbagai profesional global. Di Indonesia khususnya dibentuk oleh badan akuntansi khusus, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Perhitungan keberlanjutan merupakan hasil dari proses dan pengukuran akuntansi yang memberikan informasi tentang bagaimana sistem ekonomi dikelola dan bagaimana keberlanjutan lingkungan diperhitungkan. Namun, untuk memastikan bahwa laporan diperhitungkan, diperlukan audit kelayakan, yang memeriksa dan mengevaluasi apakah laporan yang disajikan sesuai dengan aktivitas bisnis perusahaan yang sebenarnya. Perusahaan yang terdaftar diharuskan untuk menyiapkan laporan kewajiban sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan. Laporan tersebut terlebih dahulu harus ditinjau untuk menilai dan mengevaluasi kinerja perusahaan dan memastikan bahwa laporan yang disajikan adalah otentik dan sesuai dengan standar dan format pelaporan keberlanjutan yang ditetapkan dan memenuhi tiga aspek, yaitu: manusia, planet, dan laba.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

C. Isu-isu Etis Kontemporer dalam Akuntansi Berkelanjutan

1. Masalah etika terkait dengan pendanaan

   Pembiayaan terkait optimalisasi pembiayaan hutang dan ekuitas, bagi hasil/dividen serta investasi alternatif: opsi, futures dan derivatif sekuritas. Hal ini sering dianggap bebas dari masalah etika, padahal ada kerugian finansial yang merupakan akibat dari pelanggaran prinsip etika bisnis. Masalah lainnya adalah bahwa masalah keuangan sering dianggap legal daripada etis.

   a. Akuntansi kreatif, manajemen laba, analisis keuangan yang menyesatkan.

      Hal ini menjadi masalah etika karena akuntansi kreatif dan manajemen laba dapat mengaburkan laporan keuangan dan dapat menyesatkan pemangku kepentingan.

b. Perdagangan orang dalam, penipuan sekuritas, manipulasi pasar keuangan.

   Perdagangan orang dalam menjadi masalah etika karena dapat menguntungkan satu pihak yang memiliki informasi dan merugikan pihak yang tidak memiliki informasi.

c. Kompensasi bonus eksekutif.

   Kompensasi bonus eksekutif sebenarnya sesuatu yang wajar, namun menjadi tidak etis ketika bonus ini mendorong eksekutif untuk melakukan akuntansi kreatif dan manajemen laba.

d. Suap

   Suap menjadi masalah etis di negara kita karena sudah menjadi kebiasaan untuk memberikan sejumlah uang atau barang atau kenikmatan untuk membalas suatu bantuan atau jasa.

2. Masalah etika yang berkaitan dengan personel

   Bidang operasional manajemen personel adalah rekrutmen, seleksi, evaluasi kinerja, pelatihan, hubungan pasar tenaga kerja, serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3, yang sangat berkaitan dengan etika. Praktek di arena ini karena korporasi didorong kepentingan pasar yang memperdagangkan serta memanipulasi segalanya untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Pembahasan masalah etika personel, diskriminasi etika dan hak serta tanggung jawab pekerja, yang sering muncul. Banyak orang berpendapat bahwa hak bekerja, privasi, upah yang sama dan tidak diskriminatif. Di lain pihak, ada pendapat hak ini dapat dikompromikan.

   a. Diskriminasi karena gender, ras atau agama

      Diskriminasi karena gender, agama, atau ras menjadi masalah etis yang paling sering ditemukan terkait pengelolaan personel.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

b. Masalah muncul dari hubungan tradisional antara majikan dan pekerja/karyawan
   Hubungan tradisional majikan dan pekerja/karyawan memunculkan masalah ketika terjadi karena karakteristik, manajemen, dan kepemimpinan.
c. Isu-isu yang berkaitan dengan demokratisasi di tempat kerja, serikat pekerja, pemogokan
   Isu terkait dengan demokratisasi di tempat kerja biasanya terkait dengan bagaimana karyawan bisa menyampaikan pendapat, terkait dengan keadilan nafkah atau gaji, dan terkait dengan hak dan kewajiban karyawan.
d. Privasi karyawan, seperti tes narkoba.
   Banyak Perusahaan dan instansi pemerintah yang mensyaratkan tes narkoba sebagai bagian dari penerimaan personel atau promosi personel. Hal ini dikarenakan adanya larangan penggunaan narkoba di negara kita. Namun demikian, tes narkoba sebenarnya merupakan privasi karyawan, sehingga Perusahaan melanggar etika ketika meminta karyawan menunjukkan hasil tes narkoba.
e. Mengungkapkan rahasia tentang hal-hal yang mempengaruhi privasi pemberi kerja
   Perusahaan terkadang mengungkapkan identitas atau data karyawan di sosial media demi kepentingan atau promosi perusahaan.
f. Keadilan dan keseimbangan kontrak
   Indonesia menjadi tujuan bagi perusahaan asing untuk mendirikan pabrik atau cabang karena rendahnya nafkah atau gaji minimal yang dipersyaratkan. Ketidakadilan juga terjadi karena banyak karyawan yang tidak diberi ruang untuk melakukan negosiasi terkait kontrak (upah, waktu kerja, dan lain sebagainya)
g. Perbudakan tenaga kerja
   Demi efisiensi, terkadang perusahaan melakukan praktek-praktek yang menjurus ke perbudakan, seperti menghilangkan kebebasan karyawan untuk beristirahat

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTASI PUBLIK DAN SEKTOR PUBLIK

dan beribadah, memperkerjakan karyawan di bawah umur, dan membuat waktu kerja/ shift kerja yang membahayakan pekerja perempuan.

h. Kesehatan dan keselamatan tempat kerja

Masih banyak isu tidak etis terkait kesehatan dan keselamatan tempat kerja, misalnya mengurangi atau meniadakan pakaian atau alat keselamatan kerja. Selain itu, membuat penerangan/pencahayaan yang sangat terang agar karyawan bekerja lebih keras juga merupakan hal tidak etis karena pencahayaan yang sangat terang dapat mengganggu kesehatan mata.

3. Masalah Etika Terkait Pemasaran

Etika pemasaran mengacu pada prinsip, nilai, dan/atau cita-cita yang harus dipatuhi oleh pemasar (dan agen pemasaran). Perdebatan tentang etika pemasaran berfokus pada dua isu utama. Yang pertama adalah perhatian filosofis etika pemasaran dengan memaksimalkan pengembalian pemegang saham. Yang kedua menyangkut praktik bisnis transaksional, dengan alasan bahwa pemasaran sama bertanggung jawabnya kepada konsumen dan pemangku kepentingan seperti halnya kepada pemegang saham. Kebijakan etis terhadap konsumsi berlebihan atau produk berbahaya, transparansi tentang sumber tenaga kerja (pekerja anak, upah yang adil), perlakuan adil terhadap pekerja dan pelaporan upah yang adil, transparansi tentang risiko lingkungan, masalah etika tentang produk atau layanan, transparansi (pemujaan bahan, produk). Penggunaan organisme hasil rekayasa genetika, konten produk, kode sumber (dalam hal perangkat lunak), jaminan etis tentang risiko yang terkait dengan penggunaan produk/layanan (risiko kesehatan, risiko keuangan, risiko keamanan), keamanan produk/layanan, kewajiban, menghormati privasi dan independensi pihak yang terlibat, trik bisnis tak etis.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KOMUNITAS PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

a. Iklan harus benar, jujur, dan adil harganya
   Kompetisi antar perusahaan sering menjadikan perusahaan bersaing dengan cara yang tidak etis, seperti membuat iklan yang menyesatkan.
b. Penetapan, diskriminasi, dan manipulasi harga
   Diskriminasi harga merupakan kemampuan perusahaan menentukan harga yang berbeda untuk produk/jasa yang sama, namun pada konsumen yang berbeda. Manipulasi harga dilakukan oleh perusahaan untuk mengambil perhatian konsumen, misalnya, dengan menaikkan harga sebelum didiskon. Ada juga kolusi harga, yakni beberapa perusahaan bersatu secara rahasia untuk menahan harga barang/jasa pada tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi.
c. Manipulasi rantai pasokan
   Manipulasi rantai pasokan menjadi tidak etis bila bekerjasama dengan pemasok untuk menghalangi pemasok mengirimkan bahan baku kepada pesaing.
d. Iklan yang menyinggung, pesan bawah sadar, seks, produk berbahaya atau immoral
   Beberapa perusahaan menggunakan iklan dengan pesan bawah sadar agar dapat memasukkan pesan dalam bentuk gambar maupun suara yang dapat meningkatkan persuasi iklan, atau bahkan menyampaikan pesan yang sama sekali berbeda.
e. Memasarkan kepada anak di sekolah
   Pemasaran kepada anak di sekolah merupakan hal yang efektif karena anak-anak bisa menjadi *direct* market, *influence* market, dan *future market.* Namun pemasaran kepada anak di sekolah tidak etis, apalagi melibatkan guru sebagai pemasarnya, karena siswa berada pada kondisi sub ordinat sehingga bisa dipaksa untuk membeli oleh guru dengan ancaman nilai maupun ancaman lainnya.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEI, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

4. Masalah etika produksi

   Etika bisnis secara umum dipahami sebagai kewajiban perusahaan memastikan produk dan proses produksi tak menimbulkan kerugian. Masalah yang paling krusial muncul akibat setiap produk atau proses produksi biasanya memiliki tingkat risiko tertentu dan sulit untuk menetapkan tingkat yang dapat diterima atau perubahan teknologi yang dapat diterima, pencegahan atau perubahan mungkin tergantung pada masyarakat.

   a. Produk cacat, produk/jasa berbahaya (senjata, alkohol, tembakau, industri kimia, kendaraan bermotor)
   b. Polusi, etika lingkungan, perdagangan emisi karbon
   c. Radiasi ponsel
   d. Pengujian produk pada hewan percobaan dan kelompok yang kurang mampu secara ekonomi (misalnya siswa)

5. Masalah etika terkait dengan teknologi

   Komputer dan internet adalah dua penemuan terpenting abad ke-20. Teknik ini menimbulkan banyak pertanyaan etis.

   a. Apakah teknologi kloning dapat diterima?
   b. Apakah teknologi nuklir, khususnya di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih dapat dilestarikan?
   c. Apakah rekayasa genetika tanaman pangan dan ternak etis?
   d. Apakah transplantasi jantung/ginjal dari organ hewan etis?

D. Organisasi Profesional dan Standar Etika dalam Akuntansi Berkelanjutan

GRI (*Global Reporting Initiative*), sebuah organisasi independen yang mengembangkan standar pelaporan untuk pembangunan berkelanjutan, didirikan CERES (*Coalition for Ecologically Responsible Economies*) dan *United Nations Environmental Programme* (UNEP) pada tahun 1997. Pedoman GRI pertama diterbitkan pada tahun 1999. Terdapat 6 indikator

GRI non-keuangan: (1) masyarakat, (2) ekonomi, (3) lingkungan, (4) ketenagakerjaan, (5) hak asasi manusia dan (6) pengelolaan produk. Perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan terdorong ke arah yang lebih baik serta menjadi model. Model pelaporan akuntansi sosial dan lingkungan diinspirasi oleh model pelaporan GRI, sebagai alternatif pelaporan akuntansi tradisional. Model GRI dibuat tanpa perspektif intelektual, dan banyak ahli di berbagai bidang telah mencapai banyak prestasi dalam pelaporan bisnis yang komprehensif.

Standar GRI menjadi contoh pelaporan publik terbaik tentang dampak sosial. ekonomi, dan lingkungan. Pelaporan keberlanjutan yang sesuai GRI menyampaikan informasi kontribusi positif atau negatif organisasi dalam mempromosikan keberlanjutan. Standar ini adalah standar dengan sistem modular yang seragam. Tiga standar mendukung proses pelaporan: (1) standar universal GRI berlaku untuk semua organisasi; (2) standar sektor GRI berlaku untuk industri tertentu; dan (3) standar topik GRI, masing-masing berisi informasi relevan tentang topik tertentu. Standar ini dipakai menentukan materi dalam membantu organisasi mencapai keberlanjutan

LARISDA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN,SURVEY,KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

DAFTAR PUSTAKA

Adams, C. A., & Whelan, G. (2009, January 2). Conceptualising future change in corporate sustainability reporting. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 22(1), 118-143. doi:https://doi.org/10.1108/09513570910923033

Adams, r., martin, s., and boom, k. (2018) university culture and sustainability: designing and implementing an enabling framework. Journal of cleaner production, 171, pp. 434-445.

Adyaksana, R. I. & Pranosokodewo, B.G. (2020). Apakah Kinerja Lingkungan Dan Biaya Lingkungan Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan?. Jurnal Infestasi (Vol.16 No.2 (2020)). 157-165

Agency, I. E. (2022). Energy Efficiency. In book.

Aktivitas Ekonomi Dalam Perspektif Ruang Dan Lingkungan. (2021). (n.p.): Deepublish.Simkin, M. G., Norman, C. A. S., & Rose, J. M. (2014). Core concepts of accounting information systems. John Wiley & Sons.

Akuntansi Keberlanjutan; Suatu Pengantar, (2022). (n.p.): Universitas Indonesia, Publishing Vaassen, E. H., Meuwissen, R., & Schelleman, C. (2009). Accounting information systems and internal control. Wiley.

Alkaraan, F., Elmarzouky, M., Hussainey, K., & Venkatesh, V. G. (2023). Sustainable strategic investment decision-making practices in UK companies: The influence of governance mechanisms on synergy between industry 4.0 and circular economy. Technological Forecasting and Social Change, 187. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122187

Almagtome, A., & Abdlazez, M. (2022). Energy Accounting and Performance: A theoretical Perspective. Akkad Journal Of Contemporary Accounting Studies, 1(4), 232–245. https://doi.org/10.55202/ajcas.v1i4.88

Anderson, E. Biaya Lingkungan: Pengukuran dan Pelaporannya. Paper Academia. https://www.academia.edu/28295500/

LARISPA LEMBAGA RISET PUBLIK PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PUBLIK DAN SEKOLAH PUBLIK

BIAYA_LINGKUNGAN_PENGUKURAN_DAN_
PELAPORANNYA.

Arya Aji Aditya, I Made Narsa, 2022 "Pengaruh Ketidakseimbangan Dan Kompleksitas Informasi Laporan Keberlanjutan Terhadap Niat Perilaku Pro- Lingkungan: Studi Eksperimen" Jurnal Kajian Akuntansi, Vol. 6 No. 2 2022, http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka dan Pengungkapan. 2021

Astuti, I. (2022). [Media Online]. Diunduh 26 Juni 2023, dari Website Media Indonesia: https://mediaindonesia.com/humaniora/547861/perusahaan-berkinerja-pengelolaan-lingkungan-hidup-meningkat

Aziza, W. Q., & Sukoharsono, E. G. (2022). Evolusi Akuntansi Berkelanjutan. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(10), 188–199.

Balsalobre-Lorente, D., Abbas, J., He, C., Pilař, L., & Shah, S. A. R. (2023). Tourism, urbanization and natural resources rents matter for environmental sustainability: The leading role of AI and ICT on sustainable development goals in the digital era. Resources Policy, 82. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103445

Bank Mandiri (Persero) Tbk, P. (2021). Sustainability Report Bank Mandiri 2021 (pp. 1–239). https://bankmandiri.co.id/web/ir/annual-reports

Batchelor, C.; Hoogeveen, J.; Faurès, J.M.; Peiser, L. (2016). Water accounting and Auditing: A sourcebook. In FAO Water Reports 43. http://www.fao.org/publications/card/en/c/d43dad58-d587-48dd-ad0e-7c4a7397a175/

Bebbington, J., Unerman, J., & O'Dwyer, B. (2014). Sustainability accounting and accountability (2nd ed.). London: Routledge. doi:https://doi.org/10.4324/9781315848419

Belkaoui (1995). Akuntansi Sumber Daya manusia, edisi Bahasa Indonesia. PT Prehallindo, Jakarta.

LARISDA
LEMBAGA RISET DAERAH
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA SEKTOR PUBLIK

Bhattacharyya, S. C. (2019). Energy economics: concepts, issues, markets and governance: Springer Nature

Bierer, A., & Götze, U. (2012). Energy Cost Accounting: Conventional and Flow-oriented Approaches. Journal of Competitiveness, 4(2), 128–144. https://doi.org/10.7441/joc.2012.02.09

Bimahardji, A. Y. (2020a). Optimasi Water Conservation (Wac) Menggunakan Metode Stochastic Algorithm Pada Gedung Waskita Karya Jakarta. Departemen Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri Dan Rekayasa Sistem Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 1–99. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95864-4_15

Bimahardji, A. Y. (2020b). Water (Wac) Menggunakan Metode Stochastic Algorithm.

Bini, L., & Bellucci, M. (2020). Integrated Sustainability Reporting Linking Environmental and Social Information to Value Creation Processes. https://doi.org/10.1007/978-3-030-24954-0

Breliastiti, R., Setiawan, T., Herninta, T., Ramadhanti, V. (2023). Readiness Of Listed Companies In The Preparation Of Social And Environmental Responsibility Reports. Jurnal Ekonomi, Vol 12, No 2, 1291-1299. https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/1856/1498.

Bullen, M., & Eyler, K. (2010). Human resource accounting and international developments: implications for measurement of human capital. Journal of International Business and Cultural Studies, 3, 1–16. http://proquest.umi.com/pqdweb?did=2170766451&Fmt=7&clientId=5134&RQT=309&VName=PQD

Camilleri, M. A. (2017). Corporate sustainability, social responsibility, and environmental management: An introduction to theory and practice with case studies. In Corporate Sustainability, Social Responsibility and Environmental Management: An Introduction to Theory and

Practice with Case Studies. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46849-5

Coville, T. (2021). Book Review: AICPA Guide: Attestation Engagements on Sustainability Information (Including Greenhouse Gas Emissions Information). The Journal of Global Awareness, 2(Spring/Summer), 1–6. https://doi.org/10.24073/jga/02/01/08

Damayanti, A., & Hardiningsih, P. (2021). Determinan Pengungkapan Laporan Berkelanjutan. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 22(1), 175. https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2756

Daniel Martinez, Ben Ebenhack, Travis Wagner.(2019) Energy Efficiency Concepts and Calculations, 1st Edition - May 9, 2019 Paperback ISBN: 9780128121115

De Villiers, C., & Maroun, W. (2018). Sustainability Accounting and Integrated Reporting.

Du, N., Fathollahi-Fard, A. M., & Wong, K. Y. (2023). Wildlife resource conservation and utilization for achieving sustainable development in China: main barriers and problem identification. Environmental Science and Pollution Research. https://doi.org/10.1007/s11356-023-26982-7

Elkington, J. (1997). Cannibals with forks, the triple bottom line of 21st century business. Oxford: Capstone Publishing Limited. http://www.johnelkington.com/archi ve/TBL-elkington-chapter.pdf,

Elo, M., Hytönen, J., Karkulehto, S., Kortetmäki, T., Kotiaho, J. S., Puurtinen, M., & Salo, M. (2023). Interdisciplinary Perspectives On Planetary Well-Being.

Epstein, M. J., & Buhovac, A. R. (2014). Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental and Economic Impacts (2nd ed.). Routledge Taylor & Francis Group.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEI, KONSULTAN, PILKADA DAN OPINI PUBLIK

European Investment Bank. 2022. Carbon Footprint Report 2021 EIB Group Internal Operation.

Fatwa, M., Rismawati, & Hapid. (2023). Peran Akuntan dalam Mewujudkan Suistanaible Development Goals (SGDs). http://repository.umpalopo.ac.id/3034/1/JURNAL_Muhammad Fatwa 201830004.pdf

Fauzan. (2011). Corporate Social Responsibility dan Etika (Perspekif Etika Moral Immanuel Kant). Modernisasi, Volume 7, Nomor 2, Juni 2011

Findler, f., schönherr, n., lozano, r., reider, d., and martinuzzi, a. (2019) the impacts of higher education institutions on sustainable development: a review and conceptualization. International journal of sustainability in higher education, 20 (1), pp. 23-38.

Gary, S. N. (2021). Conflicts and Opportunities for Pension Fiduciaries in the ESG Environment. Oklahoma Law Review, Forthcoming, 39113, 607–652. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4004620

Global Reporting Initiative (GRI). (2023, June). Retrieved from www.globalreporting.org

Global Reporting Initiative. 2021. Global Reporting Initiative. https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-bahasa-indonesia-translations/

Gonzalez, A., Chase, J. M., & O'Connor, M. I. (2023). A framework for the detection and attribution of biodiversity change. In Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences (Vol. 378, Issue 1881, p. 20220182). NLM (Medline). https://doi.org/10.1098/rstb.2022.0182

Gough, M. (2016). Natural Capital Protocol.

Gray, R., Adams, C., & Owen, D. (2014). Accountability, Social Responsibility and Sustainability: Accounting for Society and the Environment. Pearson Higher Ed.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK

Gray, r., owen, d., & adams, c. (2014). Accountability, sustainability, and social accounting. Journal of business ethics, 120(1), 1-5.

GRI Standards. (2018). Notes for use of the GRI Standards Glossary. www.globalreporting.org/standards.

GRI. (2016). GRI 302: Energy. GRI Standards.

GRI-G4 Pedoman Pelaporan Keberlanjutan tentang Panduan Penerapan. 2021

GRI-G4 Pedoman Pelaporan Keberlanjutan tentang Prinsip-Prinsip Pelaporan

GRI-GR4 tentang GRI Standar 101 Pedoman Landasan. 2021

Gunawan, E. (2012). Tinjauan Teoritis Biaya Lingkungan Terhadap Kualitasproduk Dan Konsekuensinyaterhadap Keunggulan Kompetitifp Erusahaan. Jurnal Ilmiah Mahasiswaakuntansi (Vol 1, No 2 (2012)), 47-50.

Hahn, R., & Lülfs, R. (2014). Legitimizing Negative Aspects in GRI-Oriented Sustainability Reporting: A Qualitative Analysis of Corporate Disclosure Strategies. Journal of Business Ethics, 123(3), 401–420. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1801-4

Hapsari, H. R,.(2021). Pentingnya Alokasi Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja Lingkungan Dan Profitabilitas Perusahaan. Jurnal Riset Akuntasnis Dan Keuangan (Vol 9, No.2 (2021)). 407-420.

Hendra, M., & Rachman, N. (2016). Studi keanekaragaman hayati di danau kaskade mahakam. 2(4), 3222–3231.

Heniwati, E., & Asni, N. (2019). Intrinsic Value Dari Pelaporan Keanekaragaman Hayati. Jurnal Akuntansi Paradigma, 10(2), 207–226. https://doi.org/https://doi.org/10.18202/ja-mal.2019.08.10012

Hoesada, J. (2022). Makalah Green 2 - Akuntansi Hijau. Artikel KSAP. https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2022/09/MAKALAH-GREEN-2.pdf

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Hopwood, A. G. (2009, April-May). Accounting and the environment. Accounting, Organizations and Society, 34(3-4), 433-439. doi:https://doi.org/10.1016/j.aos.2009.03.002

https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pentingnya-penerapan-akuntansi-keberlanjutan-f9ae3e90/detail/

https://www.kompas.com/edu/read/2022/03/02/110300371/berkenalan-dengan-akuntansi-berkelanjutan-bidang-ilmu-akuntansi

https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/id/Publication/PublicationSustainabilityReport

Human Resource Accounting. Whatishumanresource.com [Media Online] Online website: https://www.whatishumanresource.com/Human-Resource--accounting

IAPI. (2022a). Media Komunikasi Task Force Extended External Reporting (EER) IAPI (Edisi 1) (pp. 1–9).

IAPI. (2022b). Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022) Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis. In IAPI (Issue Revisi, pp. 1–86).

IEA. 2023. CO2 Emission in 2022. France.

Ika Berty Apriliyani; Reni Farwitawati; Ria Apriani Nababan, 2021" Analisis Penerapan Global Reporting Initiative (GRI) G4 pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Sektor Pertanian" Jurnal Akuntansi Kompetif, Vol. 4, No. 2, Mei 2021 2622-5379

Index of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017

International Integrated Reporting Council (IIRC). (2023, June). Retrieved from https://www.integratedreporting.org/

IPCC. n.d. "Emission Factor Database."

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Iqbal, M. (2022). Pengertian LCA Diunduh 26 Juni 2023, dari Website Lindungi Hutan: https://lindungihutan.com/blog/pengertian-life-cycle-asssessment-lca/

Jorgenson, D. W., Landefeld, J. S., & Schreyer, P. (2015). Human Capital Accounting in the United States. Measuring Economic Sustainability and Progress. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226121475.003.0014

Karimi, P., Bastiaanssen, W. G. M., & Molden, D. (2013). Water Accounting Plus (WA+) - A water accounting procedure for complex river basins based on satellite measurements. Hydrology and Earth System Sciences, 17(7), 2459–2472. https://doi.org/10.5194/hess-17-2459-2013

Katic, P. G., Cerretelli, S., Haggar, J., Santika, T., & Walsh, C. (2023). Mainstreaming biodiversity in business decisions: Taking stock of tools and gaps. Biological Conservation, 277. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109831

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2019. PROPER 4.0 as SIMPLE as It Is. Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan. www.freepik.com

Khairin, N. F., L. Ginting, Y., Kusumawardani, A., & Syakura, M. A. (2021). Modul Akuntansi Berkelanjutan. 54.

Kolk, A. (2016). The Social Responsibility of International Business: From Ethics and the Environment to CSR and Sustainable Development. Journal of World Business, 23-34.

Kristanto, S. B. (2022). Berkenalan Dengan Akuntansi Keberlanjutan, Bidang Akuntansi Yang Berfungsi Menjaga Masa Depan. https://www.kompas.com/edu/read/2022/03/02/110300371/berkenalan-dengan-akuntansi-berkelanjutan-bidang-ilmu-akuntansi-yang

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK

Kristianto, P.L. (n.d.). Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial. https://e-jurnal.ukrimuniversity.ac.id/file/414.pdf

Kurniawan, P. S., & Wahyuni, M. A. (2019). Keberlanjutan Universitas : Mungkinkah Mengaplikasikan Akuntansi Keberlanjutan. Universitas Pendidikan Ganesha, 1–17.

Laine, M., Tregidga, H., & Unerman, J. (2021). Sustainability Accounting and Accountability. Routledge Taylor & Francis Group.

Lako, A. (2021). Akuntansi Hijau: Isu, Teori, dan Aplikasi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Lehtiniemi, H., Aulake, M., Paloniemi, R., & Huttunen, S. (2023). Pulling biodiversity offsetting in different directions – Stakeholder frames in the preparation of the Finnish nature conservation act. Biological Conservation, 283. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110137

Lestari, I. (2019). 6 Cara Penanggulangan Penipisan Lapisan Ozon. Diunduh 26 Juni 2023, dari Website Ilmu Geografi: https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/meteorologi/penanggulangan-penipisan-lapisan-ozon

Lozano, r., lukman, r., lozano, f.j., huisingh, d., and lambrechts, w. (2013) declarations for sustainability in higher education: becoming better leaders, through addressing the university system. Journal of cleaner production, 48, pp. 10-19.

Marakenko, I., & Plastun, A. (2017). AkAccounting and Financial Control, 1, 4–12.

Mathiyazhagan, k., sengupta, s., and mathivathanan, d. (2019) challenges for implementing green concept in sustainable manufacturing: a systematic review. Opsearch, 56, pp. 32-72salas-zapata, w. A. And ortiz-muñoz, s.m. (2019) analysis of meanings of the concept of sustainability. Sustainable development, 27 (1), pp. 153-161

LARISPA LEMBAGA RISET PUBLIK PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

Media Digital. (2023). PHR Raih 2 Penghargaan Indonesia Social Responsibility Award 2023 [Media Online]. Diunduh 27 Juni 2023, dari Website Media Digital – Bisnis.com: https://sumatra.bisnis.com/read/20230623/534/1668578/phr-raih-2-penghargaan-indonesia-social-responsibility-award-2023.

Meilanawati, R. (2014). Analisis Pengungkapan Biaya Lingkungan. Jurnal Akuntansi Https://Ejournal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Jurnal-Akuntansi/Article/View/6499/3406

Mestanza-Ramón, C., Monar-Nuñez, J., Guala-Alulema, P., Montenegro-Zambrano, Y., Herrera-Chávez, R., Milanes, C. B., Arguello-Guadalupe, C., Buñay-Guisñan, P., & Toledo-Villacís, M. (2023). A Review to Update the Protected Areas in Ecuador and an Analysis of Their Main Impacts and Conservation Strategies. In Environments - MDPI (Vol. 10, Issue 5). MDPI. https://doi.org/10.3390/environments10050079

Michael, j. And elser, n. (2019) personal waste management in higher education: a case study illustrating the importance of a fourth bottom line. International journal of sustainability in higher education, 20 (2), pp. 341-359.

Mohammad Iqbal As'ad Mauludy &Silvana Faiqoh "Penerapan Gri-G4 Sebagai Pedoman Baku Sistem Pelaporan Berkelanjutan Bagi Perusahaan Di Indonesia" Jurnal Akuntansi Universitas Jember Vol. 16 No. 2 Desember 2018

Mowen, M. M., Hansen, D. R., & Heitger Dan L. (2018). Managerial accounting: the cornerstone of business decision making: Vol. 7th eds. Cengage Learning.

Nabila, Z. N. A., & Adina, M. (2021). Pengelolaan Sampah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (Waste Management in the Context of Waste Management). Hmgp.Geo.

Niandari, N., & Handayani. (2023). Green Accounting, Kinerja Linkungan, dan Profitabilitas. Jurnal Akuntansi Bisnis, 16 (1), 83-96. https://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi.

LARSPA LEMBAGA RISET PUBLIK PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA DAN GERAKAN PUBLIK

Ningsih, N. W., Nurlaili., & Zuliansyah, A. (2022). Biaya Lingkungan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Dalam Ekonomi Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 3349-3356. Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.29040/Jiei.V8i3.5466

Otoritas Jasa Keuangan (2014) - Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia Roadmap For Sustainable Finance In Indonesia 2015-2019.

Otoritas Jasa Keuangan (2018) – Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Keuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik.aspx

Otoritas Jasa Keuangan, I. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emitten dan Perusahaan Publik. In Otoritas Jasa Keuangan (pp. 1–15).

Otoritas Jasa Keuangan. 2020. Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 20/SEOJK.04/2020 Tentang Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. Diunduh 25 Juni 2023, dari Website Otoritas Jasa Keuangan: https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/LAMPIRAN%20 RSEOJK%20II%20-%20BENTUK%20DAN%20ISI%20 LAPORAN%20TAHUNAN%20EMITEN%20ATAU%20PERUSAHAAN%20PUBLIK.pdf

Owen, D. L., Swift, T., & Hunt, K. (2001). Questioning the Role of Stakeholder Engagement in Social and Ethical Accounting, Auditing and Reporting. Accounting Forum, 25(3), 264 - 282. doi:10.1111/1467-6303.00066

Paru, S. M., & Nahartyo, E. (2020). Akuntansi Manajemen Lingkungan: Metoda Akuntansi Lingkungan Guna Meningkatkan Eko-effisiensi Usaha Dan Mengatasi Krisis Ekologi Studi Pada CV. Andi Offset.

Pengantar, K., Ekonomi, P., Tahun, T. I. I., & Pengantar, K. (2022). INDONESIA DAN DUNIA. 6(2).

Peraturan Menteri Sosial RI No.13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggungjawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah (PP) No.47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.

Pirmana, V. (2022). Riset: biaya lingkungan Indonesia nyaris seribu triliun setahun, ini 10 besar penyebabnya. Diunduh 27 Juni 2023, dari Website The Conversation: https://theconversation.com/riset-biaya-lingkungan-indonesia-nyaris-seribu-triliun-setahun-ini-10-besar-penyebabnya-176697#Kebijakan%20Pembangunan%20Mesti%20Diubah.

Posadas, S. C., Ruiz-Blanco, S., Fernandez-Feijoo, B., & Tarquinio, L. (2022). Institutional isomorphism under the test of Non-financial Reporting Directive. Evidence from Italy and Spain. Meditari Accountancy Research, 31(7), 26–48. https://doi.org/10.1108/MEDAR-02-2022-1606

Pratiwi, I. (2023). Opini Era Baru Laporan Berkelanjutan untuk Iklim (Harian Jogya).

Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya. Modul Akuntansi Lingkungan. Diunduh 26 Juni 2023, dari Website OCW UPJ: https://ocw.upj.ac.id/files/GBPP-LSE-204-Modul-akuntansi-lingkungan

PTF - ESRS. (2022). ESRS E4 Biodiversity and Ecosystem. EFRAG.

Purnama, N. A., Ruliana, T., & Suyatin. (2016). Penerapan Akuntansi Sumber Daya Manusia dan Kinerja Keuangan pada PT. Bank Mandiri Tbk. Ekonomia, 18, 90.

LEMBAGA RISET PUBLIK

Rahmawati, F. (2021). Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih. Jurnal Bisnis (Vol.9 No.1 (2021)).

Rifani, N., Simorangkir, R.T.M.C., & Liaoktaviana, C. (2022). Pengukuran dan Penyusunan Biaya Lingkungan. Diunduh 27 Juni 2023, dari Website Research Gate: https://www.researchgate.net/publication/360936190_PENGUKURAN_DAN_PENYUSUNAN_LAPORAN_BIAYA_LINGKUNGAN/link/629431b388c32b037b5cf4ee/download

Riyadi, P. (2017). Manajemen Biaya Lingkungan. Diunduh 20 Juni 2023, dari Website linkedin: https://id.linkedin.com/pulse/manajemen-biaya-lingkungan-sebuah-perspectip-padlah-riyadi-ca-mm-

Rodrigues-Filho, J. L., Macêdo, R. L., Sarmento, H., Pimenta, V. R. A., Alonso, C., Teixeira, C. R., Pagliosa, P. R., Netto, S. A., Santos, N. C. L., Daura-Jorge, F. G., Rocha, O., Horta, P., Branco, J. O., Sartor, R., Muller, J., & Cionek, V. M. (2023). From ecological functions to ecosystem services: linking coastal lagoons biodiversity with human well-being. In Hydrobiologia. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/s10750-023-05171-0

Salas-zapata, w. A. And ortiz-muñoz, s.m. (2019) analysis of meanings of the concept of sustainability. Sustainable development, 27 (1), pp. 153-161.

Sandström, C., Ring, I., Olschewski, R., Simoncini, R., Albert, C., Acar, S., Adeishvili, M., Allard, C., Anker, Y., Arlettaz, R., Bela, G., Coscieme, L., Fischer, A., Fürst, C., Galil, B., Hynes, S., Kasymov, U., Marta-Pedroso, C., Mendes, A., … Pergl, J. (2023). Mainstreaming biodiversity and nature's contributions to people in Europe and Central Asia: insights from IPBES to inform the CBD post-2020 agenda. Ecosystems and People, 19(1). https://doi.org/10.1080/26395916.2022.2138553

LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN MEDIA DAN CETAK PUBLIK

Saputra, K.A.K., Martini, N.P.R., & Pradnyanitasari, P.D. (2019). Akuntansi Sosial dan Lingkungan. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

Saving Water Helps Protect Our Nation's Water Supplies https://www.energystar.gov/products/saving_water_helps_protect_our_nations_water_supplies

Schaltegger, S., & Burritt, R. (2000). Contemporary Environmental Accounting: Issues, Concepts and Practice. Routledge.

Schaltegger, S., & Wagner, M. (2011, April 7). Sustainable entrepreneurship and sustainability innovation: categories and interactions. Business Strategy and the Environment, 20(4), 222-237. doi:https://doi.org/10.1002/bse.682

Schlaepfer, M. A., & Lawler, J. J. (2023). Conserving biodiversity in the face of rapid climate change requires a shift in priorities. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 14(1). https://doi.org/10.1002/wcc.798

Septian, B. (2022). Berkenalan dengan Akuntansi Berkelanjutan, Bidang Ilmu Akuntansi yang Berfungsi Menjaga Masa Depan Bumi. Kompas.Com.

Setiawan, Temy., Basri, Y. Z., Sudibyo, Y. A., Purwanti, A., Gunawan, J. (2018). A Development Of Sustainability Disclosure Practices In The Mining Oil and Gas 9MOG) Industries: A Study From Indonesia. International Knowledge Sharing Platform, Vol 9 No 14. https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/43417.

Setiawan, Temy., Nicholas, Jonathan., Kurniawati. (2022). Indicator Development And Quality Of Corporate Social Responsibility Disclosure For The Mining Industry In Indonesia (Qualitative Study During Observation Period 2017-2019). Media Riset Akuntansi Auditing & Informasi, Vol 22 No 2, 285-300.

Setiawan, Temy., Purwanti, Ari. (2017). Piramida Carroll Pada Perusahaan di Indonesia: Studi Pada 3 Perusahaan Pemenang

LARISPA LEMBAGA RISET PUBLIK PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

CSR Award 2016. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 6, No 1. https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jmb/article/view/998

Setiawan, Temy., Purwanti, Ari. (2021). Mahir Akuntansi Manajemen Seri Advance. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta.

Setiawan, Temy., Sudibyo, Y.A., Purwanti, Ari. (2021). Pengaruh Etika Terhadap Profitabilitas: Mediasi Image dan CSR. Jejak Pustaka: Jakarta.

Shuqin, c., minyan, l., hongwei, t., xiaoyu, l., and jian, g. (2019) assessing sustainability on chinese university campuses: development of a campus sustainability evaluation system and its application with a case study. Journal of building engineering, 24, 100747.

Sihombing, R. P., & Hastuti, T. D. (2018). Dukungan Akuntansi Bagi Berkelanjutan (pp. 1–223).

Smith, P. A., & Sharicz, C. (2011). The Shift Needed For Sustainability. The Learning Organization, Vol. 18. No. 1. Hal. 73-86.

Sofyanty, Yossie, R. (2017). Analisis Penerapan CSR dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Hotel Ibis Surabaya City Center). Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 42. No. 2. Hal 26-31. Retrieved from http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1682

Staib, R. (2005). Environmental Management and Decision Making for Business.

Sukma Arida, I. N. (2019). Pariwisata Berkelanjutan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Susandy, g. And prasetyo, y.e. (2019) social network and organizational leadership at the higher education institution: a case study. Indonesian journal of sustainability accounting and management, 3 (1), pp. 37-48.

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

SUSTAINABILITY - Konsep dan Pelaporan. (2023). (n.p.): Airlangga University Press, Dian Agustia, et al.

Sustainability Accounting Standards Board (SASB). (2023, June). Retrieved from www.sasb.org

Syarifuddin, S., & Damayanti, R. A. (2020). Biodiversity accounting: uncover environmental destruction in Indonesia. Social Responsibility Journal, 16(6), 809–825. https://doi.org/10.1108/SRJ-11-2018-0291

Tarigan, J., & Semuel, H. (2015). Pengungkapan Sustainability Report dan Kinerja Keuangan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 16(2), 88–101. https://doi.org/10.9744/jak.16.2.88-101

Tim Penyusun Laporan LCA. (2021). Pedoman Penyusunan Laporan LCA 2021. Diunduh 27 Juni 2023, dari Website Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: https://proper.menlhk.go.id/propercms/uploads/magazine/docs/buku/magazinePedoman_Penyusunan_Laporan_Penilaian_Daur_Hidup_2021.pdf

Tim Penyusun Modul Universitas Esa Unggul. Akuntansi Manajemen Materi 14 Manajemen Biaya Lingkungan. Diunduh 27 Juni 2023, dari Website Universitas Esa Unggul: https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F441522%2Fmod_resource%2Fcontent%2F28%2FAkmen_14_Modul_Manajemen%20Biaya%20Lingkungan.pdf.

Undang-undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 2007. Jakarta

Wardani, D.K & Antara, D.M. (2017). Pengaruh Annual Report Award (ARA) terhadap Nilai Perusahaan.JRAMB, volume 3, No.2. halaman 131-144

Wardani, D.K. & Susilowati, Urgensi Transparansi Informasi Dalam Perlawanan Pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2020, 11(1), 127-138

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, KONSULTAN PILKADA DAN

WBCSD, and WRI. 2015. The Greenhouse Gas Protocol. A Corporate Accounting and Reporting Standard.

Wirawan (2009). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Salemba Empat. Jakarta.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). (2000). Measuring eco-efficiency: A guide to reporting company performance. Geneva: WBCSD.

Zadek, S., Evans, R., & Pruzan, P. (2013). Building Corporate Accountability: Emerging Practice in Social and Ethical Accounting and Auditing (1st ed.). London: Routledge. doi:https://doi.org/10.4324/9781315070933

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN,SURVEY,KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

TENTANG PENULIS

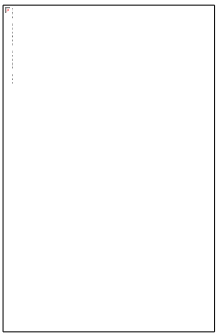

Hantono, dilahirkan di Medan, 27 Agustus 1978 lulusan Akuntansi dari Universitas Methodist Indonesia, Medan, pada tahun 2002 melanjutkan pendidikan S-2 program Pascasarjana Magister Sains Program Studi Ilmu Ekonomi di Universitas Negeri Medan dan menyelesaikannya pada tahun 2011 dan pada tahun 2015 mengikuti perkuliahan di PPAK USU dan telah menyelesaikan pada tahun 2016. Dan juga dosen tetap di Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan pada jurusan Akuntansi. Penulis juga pernah mempresentasikan artikel di Fakultas Bisnis - Unika Widya Mandala Surabaya pada kegiatan *The 9th NCFB 2016 and Doctoral Colloquium 2016*, Selain itu mempresentasikan artikel di Universitas Indonesia (FEB UI) tanggal 2 – 3 Agustus 2017 pada kegiatan *International Conference And Doctoral Colloquium In Finance 2017 (The 3rd IFA Annual Conference)*. Penulis ada publikasinya di jurnal internasional hingga sekarang. Penulis pernah meraih meraih Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah di Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan pada tahun 2016. Beliau juga reviewer di beberapa jurnal seperti Jurnal Owner Riset dan Jurnal Akuntansi, Jurnal Jesya dan Jurnal LLDIKTI – 1, Jurnal Jebma, Jurnal Auditing dan Perpajakan. Pada tahun 2021, artikel penulis lolos seleksi pada kegiatan Simposium Nasional Akuntansi ke – 24 di Jambi dan Pada tahun 2022, artikel penulis lolos seleksi pada kegiatan SNA ke – 25 di Makasar. Email Penulis: hantono_78@yahoo.com

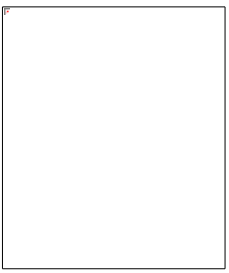

Dr. Temy Setiawan,S.E., M.Ak., M.Th., Ak., CA., CIBA., CPMA., CertDA., CSRS., Asean CPA. Lahir di Jakarta 1985. Beliau lulus S1 dari Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya tahun 2008 dan melanjutkan S2 di Universitas Mercubuana. Setelah lulus S2, kemudian melanjutkan pendidikan S3

program doktor Ilmu ekonomi Konsentrasi Akuntansi di Universitas Trisakti. Saat ini aktif sebagai praktisi di konsultan bisnis, mengajar di beberapa perguruan tinggi program sarjana dan pascasarjana serta menjadi penulis buku. Bidang pengajaran dan penelitiannya umumnya pada akuntansi manajemen, tata kelola dan keberlanjutan, sistem pengendalian manajemen.

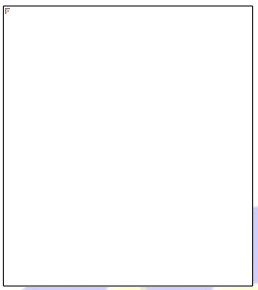

Muhammad Rizal, M.Si., Ak., CMA., CSRS., CSRA Lahir di Pancurbatu 13 April 1976, menempuh Sarjana akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (1999) dan magister Akuntasi di Universitas Diponegoro (2001) saat ini menempuh Program Doktor Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). aktif di organisasi pergerakan mahasiswa; ketua Senat fakultas (1997-1998), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Medan sampai dengan tingkat daerah Sumatera Utara (2020-2022). Pada tahun 2001 menjadi Dosen tetap di Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan pernah mengajar pada fakultas Ekonomi UMSU, dan Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Pengabdian pada tridarma perguruan tinggi di wujudkan dengan mendirikan Lembaga Riset Publik (LARISPA) Indonesia, tahun 2003 www.larispa.or.id., serta aktif sebagai peneliti dan pelatih di tingkat nasional melalui Perkumpulan Konsultan Manajemen Pendidikan (PKMPI) www.pkmpi.or.id dan penggiat pendidikan www.yamubtasi.or.id dan www.arrozzaq.sch.id.
Email : muhammadrizall@unimed.ac.id

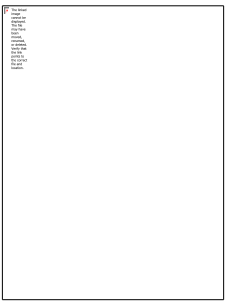

Dwi Urip Wardoyo, SE., MMSI. beliau ini menamatkan Program S1-Akuntansi dari Universitas Gunadarma, dan Magister Sistem Informasi, Konsentrasi Sistem Informasi Akuntansi dari Universitas yang sama. Saat ini beliau sedang melanjutkan studi Program PhD bidang International Business, di Universiti Utara Malaysia (UUM). Menjadi Dosen sejak tahun 2002, beberapa Kampus yang pernah beliau masuki sebagai pengajar, baik sebagai dosen Luar Biasa maupun Dosen Tetap diantaranya; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, STIA Mandala Indonesia, STEKPI (Univ Trilogi), Universitas Islam Attahiriyah, Indonesia Banking School, Trisakti School of Management, Program Vokasi IPB, Universitas Mercu Buana, Kalbis Institute, hingga kini menjadi Dosen Tetap dan Peneliti di Telkom University. Aktifitas lainnya disamping pernah menjadi Tenaga Konsultan di beberapa Proyek Instansi Pemerintah juga kini sebagai Konsultan Pendamping UMKM, serta aktif dalam komunitas UMKM Oke Oce dan Halal Center Cendekia Muslim.
Email : dwiurip@telkomuniversity.ac.id

LAPISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN SURVEY KONSULTAN PILKADA DAN OPINI PUBLIK

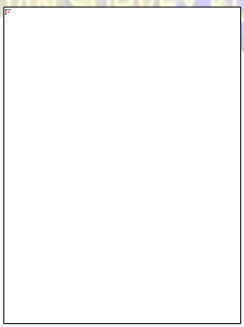

Dr. Agustine Dwianika, SE., M.Ak., CMA., CIBA., adalah seorang Doktor dibidang Akuntansi, saat ini penulis mengajar sebagai Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya, dan Dosen Tidak Tetap di Magister Akuntansi Universitas Trisakti dan berbagai kampus lainnya. Pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Perpajakan, Riset Akuntansi dan Manajemen, Perpajakan Lanjutan, Akuntansi Pajak, Manajemen pajak, *International Businees Issue*, Seminar Akuntansi Keuangan, Seminar Akuntansi Pajak, dan *Accounting Bussiness and Entrepreneurship*. Beliau berpengalaman sebagai konsultan dibidang keuangan lebih dari 13 tahun dan saat ini masih sebagai Tax Audit Specialist pada KAP Devid Putra Arda. Penulis adalah Member

CMA (Certified Management Accounting), CIBA (Certified International Business Analyst), dan IFA (Indonesia Finance Association). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd) DKI Jakarta sejak 2018. Berbagai hibah didapatkan diantaranya research grant dari UiTM, Seca Kusuma Grant, Penelitian Dosen Pemula pada tahun 2019 dan 2020, Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada 2022, dan Hibah PDUPT pada 2022-2023 dari Simlitabmas Kemendikbud Republik Indonesia. Email : agustine.dwianika2020gmail.com

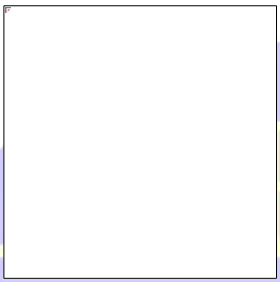

Victoria Ari Palma Akadiati S.Pd., Ak., M.S.Ak., CA, Asean CPA, QIA. Beliau menyelesaikan pendidikan S1, PPA, S2 pada Universitas Lampung. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras, Bandar Lampung. Hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah diterbitkan pada beberapa jurnal nasional dan jurnal terindeks *Science and Technology Index (SINTA).* Email: vicaripalma23@gmail.com

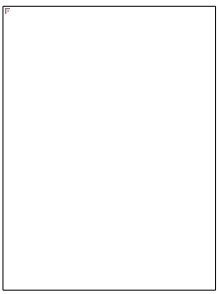

Intan Rakhmawati, SE., M.Ak., beliau ini S1 dan S2 Akuntansi dari Universitas Mataram. Beliau mengajar mata kuliah Akuntansi Keuangan, Perpajakan dan Akuntansi Pajak, semenjak menjadi dosen pada 2009. Selain mengajar perpajakan, beliau juga seringkali memberikan penyuluhan atau pelatihan akuntansi keuangan bagi pengelola keuangan desa dan pembuatan aplikasi komputer akuntansi. Beliau juga memiliki sertifikat konsultan pajak sejak 2022. Email : intanrakhmawati@gmail.com

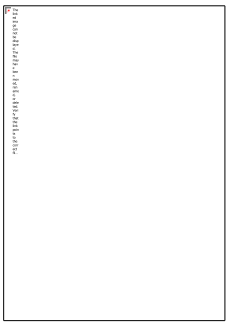

Galuh Tresna Murti adalah Associate Professor (Lektor Kepala) bidang Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom, Bandung, Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana, Magister Ilmu Akuntansi dan Doktor Ilmu Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia. Beliau seorang peneliti dan telah menerbitkan jurnal dan juga pembicara pada beberapa konferensi nasional dan internasional. Galuh Tresna Murti telah menyelesaikan proyek penelitian dengan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Indonesia. Minat penelitiannya terutama mengenai Sistem Informasi Akuntansi. Beliau terdaftar sebagai anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Ikatan Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI), Beliau adalah dosen di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Beliau memegang sertifikasi profesi Ak (Akuntan), Chartered Accountant (CA), Asean Chartered Professional Accountant (ACPA), dan Certified Risk, Governance and Compliance Professional Advance (CRGCPA). Alamat e-mail beliau : galuht@telkomuniversity.ac.id

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, SURVEY, KONSULTAN PILKADA DAN SEKTOR PUBLIK

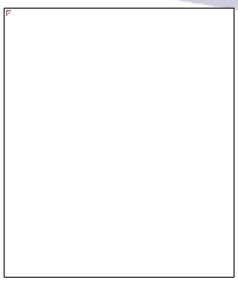

Yennisa, M.Sc., Ak., CA., CTA. beliau menempuh S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan melanjutkan S2 di Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Aktif mengajar dari tahun 2012 dan saat ini menjadi dosen tetap di Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta. Penulis memiliki Register Negara Untuk Akuntan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan memiliki ijazah Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Selain itu penulis juga merupakan anggota aktif asosiasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan menyandang gelar Chartered Accountant (CA Indonesia) dan

memiliki Certificate in Teaching Audit (CTA). Selain aktif di dunia akademisi melalui bidang pendidikan, penulis sampai saat sekarang ini masih aktif sebagai *professional trainer* dalam pengembangan kompetensi SDM dengan latar belakang ilmu yang relevan baik di perusahaan swasta terutama industri tambang, instansi pemerintah dan BUMN. Terkait dengan konsep keberlanjutan, penulis banyak memperoleh pengalaman dari diskusi dengan praktisi di industri tambang.
Email: yennisaicha@gmail.com atau yennisa.icha@upy.ac.id

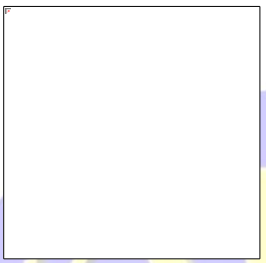

Sobrotul Imtikhanah, SE.,MSI. Beliau ini mengajar di Kampus di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan hingga Sekarang. Mengampu mata kuliah Akuntansi Publik, Akuntansi keuangan Daerah, Metodologi Penelitian dan Akuntansi Keuangan. Kuliah S1 di tempuh di Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Malang, S2 dari Universitas Gadjah Mada. Selain jadi dosen, Beliau aktif menjadi konsultan pemerintah daerah, narasumber diberbagai kegiatan profesional baik dilingkungan pemerintahan maupun di kegiatan profesional lainnya, Beliau juga menjadi anggota dewan pengupahan pemerintah daerah kota Pekalongan serta sebagai tim reviewer riset-unggulan daerah kota Pekalongan Jawa Tengah.
Email : emmaferdiz.umpp@gmail.com

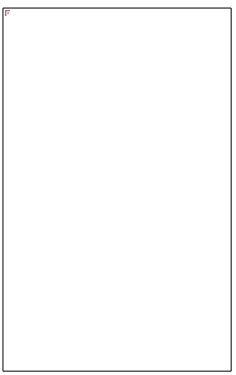

Antonius Grivaldi Sondakh, SE, M.Sc., Ak., CA. berhasil menamatkan studi S1 dan S2 pada prodi akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini sedang menempuh program Doktor Akuntansi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Setelah lulus S1, selama 8 tahun berkarir dibeberapa posisi dan penempatan pada perusahaan swasta nasional Indomobil grup. Sejak 2010 pulang kampung untuk bergabung sebagai dosen di prodi

Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin hingga saat ini. Selama periode ini, beberapa kali melakukan presentasi dan publikasi ilmiah, serta bekerja dan memberi jasa, menggunakan kemampuan yang ada, untuk membantu berbagai usaha di berbagai tempat.
Email: agsondakh@ulm.ac.id

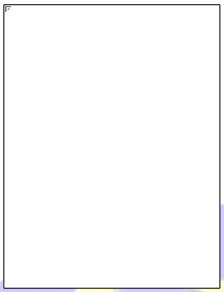

Medina Almunawwaroh, lahir di Garut tanggal 11 Maret 1983. Menyelesaikan Pendidikan Magister program Akuntansi Manajemen pada tahun 2011 di Universitas Mercu Buana Jakarta. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Penulis telah mengikuti berbagai pelatihan diantaranya pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diklat audit dasar dan lanjutan, diklat audit internal berbasis risiko, diklat audit pengadaan barang dan jasa, diklat *spending review*, diklat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diklat audit investigatif, dan telah tersertifikasi Certified Risk Associate (CRA), Certified Risk Professional (CRP) dan Certified Internal Auditor Professional (CIAP).

Pengalaman bekerja mulai menjadi staf pengajar di LP3I CC Depok Jawa Barat sejak tahun 2007 untuk mata pelajaran Matematika, selanjutnya mengajar di Politeknik Triguna Tasikmalaya Jawa Barat tahun 2013-2015 pada mata kuliah Akuntansi Menengah, Akuntansi Manajemen dan Penyusunan Anggaran Perusahaan. Mulai tahun 2015 s.d. sekarang menjadi staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya Jawa Barat pada mata kuliah Pengantar Manajemen, Manajemen Pemasaran, Perilaku Organisasi dan Sistem Pengendalian Manajemen. Buku yang sudah disusun Pengantar Manajemen tahun 2017, Akuntansi Manajemen tahun 2018, Perilaku Organisasi tahun 2021, *Book Chapter Internal Audit* tahun 2021, *Book Chapter Green Accounting* tahun 2022, *Book Chapter Green Leadership, Book Chapter* Ilmu Akuntansi, dan *Book Chapter*

Penerapan Good Corporate Governance Pada Berbagai Riset Akuntansi pada tahun 2023.
Email Penulis: medinaalmunawwaroh@unsil.ac.id

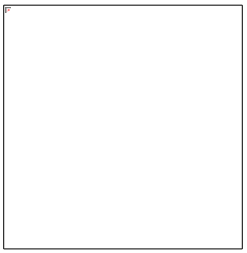

Drs. Ec Jantje Lagu Ak.,MM.,CIAP.,CIAE., CRM.,ACPA(Cand). Sarjana Sains Akuntansi dari STIE Tridharma di Bandung-Jawa Barat pada tahun 1989, Magister Manajemen konsentrasi Corporate Finance dari Universitas Hasanudin pada tahun 2005, Universitas Tarumanegara Jakarta, Pendidikan Profesi Akuntan. Pengalaman Mengajar Manajemen Keuangan di Universitas Papua Otto dan Geisler di Jayapura pada tahun 2019 hingga 2021, Praktik Audit di Universitas Papua Otto dan Geisler Jayapura tahun 2019 s/d tahun berjalan 2023, Teori Audit di Program Ekstensi Universitas Cendrawasih Tahun 2014 s/d 2015, Akuntansi Pemerintahan di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Jayapura pada tahun 2003 sampai dengan 2004, Dosen Pembantu Manajemen Keuangan Tridharma Akademi Akuntansi pada tahun 1983 sampai dengan 1985. Mengajar akuntansi pada beberapa program studi di Bandung pada tahun 1985 sampai 1986.
Email: Lagujantje1961@gmail.com

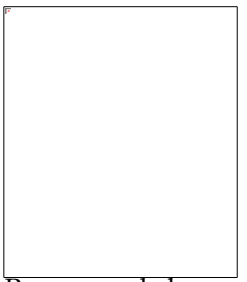

Alfian, SE., Akt., M.Si., CA, CPS. Staf Pengajar Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin ini menyelesaikan Program S1 dan S2 Bidang Akuntansi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pemegang beberapa sertifikasi ini juga menjadi instruktur teknis pada berbagai diklat dan bimbingan teknis instansi pemerintah maupun swasta. Selain sebagai pengajar juga aktif sebagai tenaga ahli dan konsultan pada beberapa kementerian dan pemerintah daerah di Indonesia, serta sebagai Saksi Ahli pada berbagai Kasus

This Word image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Umum, dan Kasus Perdata. Pendiri Komunitas Forum Dunia Usaha dan Perizinan ini sejak Desember 2018 hingga sekarang aktif memberi berbagai Pelatihan Perizinan dan Investasi di Seluruh Indonesia, baik untuk para aparatur pemerintah, pelaku usaha, notaris dan konsultan hukum. Email: alfian@ulm.ac.id

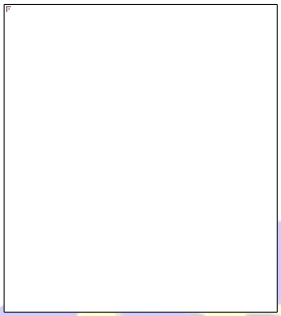

Made Dudy Satyawan,S.E.,Ak.,M.Si., CA.,CPA.,CTA.,BKP, beliau ini S1 dan S2 dari Universitas Airlangga, saat ini sedang menempuh S3 Program Doktor Ilmu Akuntansi di Universitas Airlangga. Beliau sejak lulus S1 pada tahun 2001 aktif menjadi staf Auditor KAP Made Sudarma, Thomas & Dewi hingga memperoleh ijin praktik sebagai Akuntan Publik di tahun 2020 dari Kemenkeu R.I. Pertama kali mengajar di Kampus Politeknik Ubaya pada tahun 2004-2005, beliau pernah menjadi dosen tidak tetap di beberapa Lembaga Pendidikan Tinggi seperti Universitas Widya Kartika-Surabaya, Lasalle College-Surabaya, dan pada tahun 2010 hingga saat ini merupakan dosen tetap di Universitas Negeri Surabaya. Selain berprofesi sebagai Dosen dan Akuntan, beliau juga *founder* dari Kantor Jasa Akuntansi MDS Consulting di Sidoarjo yang berfokus menyediakan solusi atas permasalahan manajemen perusahaan seperti akuntansi, perpajakan dan lainnya.
Email:madesatyawan@unesa.ac.id;
madedudysatyawan.ap1693@gmail.com

LARISPA
LEMBAGA RISET PUBLIK
PENELITIAN, PENDIDIKAN, PENGABDIAN, PERKAPA DAN AKUNTAN PUBLIK

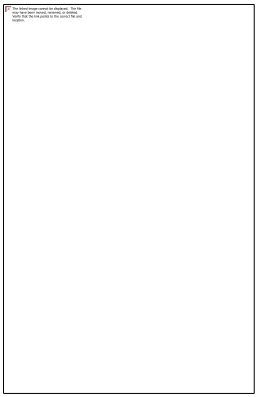

Dr. Dewi Kusuma Wardani, SE, S.Psi., M.Sc., Ak., CA, CRM, BKP, ACPA, adalah dosen tetap di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST). Menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi Universitas Gadjah Mada dan S1 Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, S2 Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Profesi Akuntan di Universitas Sanata Dharma, S3 Ilmu Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sertifikasi kompetensi yang dimiliki Bersertifikat Konsultan Pajak (BKP) tahun 2010, Akuntan (Ak.) tahun 2012, Asesor Kompetensi BNSP tahun 2013, Kompetensi Administrasi dan Keuangan Hotel dari BNSP tahun 2013, *Lead Auditor* pada tahun 2014, Auditor Sertifikasi Usaha Pariwisata bidang Jasa Akomodasi (Hotel) tahun 2014, *Chartered Accountant* (CA) tahun 2016, *Certified Risk Management* (CRM) tahun 2017, dan *Associate Certified of Public Accountant* (ACPA) tahun 2017, Master Asesor BNSP tahun 2019, Instruktur/Trainer tahun 2021. Jabatan saat ini sebagai Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia/SKKNI Bidang MICE Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif (dana *World Bank*). Ketua Penjaminan Mutu Program Studi Akuntansi FE UST, Ketua *Certified Public Accountant (CPA) Test Center* UST, Wakil Ketua *Tax Center* UST, Master Asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Asesor Kompetensi LSP Wiyata Nusantara; Manajer Administrasi & Keuangan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Adi Karya Wisata dan PT. Abdi Karya Wijaya. Email d3wikusuma@gmail.com

TENTANG EDITOR

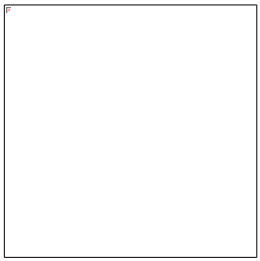

Hidayatullah,SE., Ak., M.Si., M.Kom., M.H., CA., CPA.,CIISA.,CDMP.

Beliau merupakan seorang Akademisi dan Praktisi Akuntan Publik. Beliau lulus S1 Akuntansi (2007) dari Universitas Trisakti, PPAK (2008) dari Universitas Trisakti, S2 Akuntansi (2010) dari Magister Ilmu Akuntansi Universitas Trisakti, S2 Komputer (2015) dari Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur, S2 Hukum di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung (2023) dan sedang melanjutkan S3 Akuntansi di Program Doktoral Ilmu Ekonomi Universitas Lampung. Beliau mengajar di Kampus sejak 2006 di berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Trisakti, STIE trisakti, BINUS University, Universitas Mercubuana, Universitas Bandar Lampung, Akademi Akuntansi Lampung dan IIB Darmajaya Lampung. Beliau Aktif di Dunia Akuntan Publi sejak tahun 2007 hingga saat ini menjadi Associat Parterner di KAP Bambang Sutopo dan Rekan di Bintaro. Beliau mendirikan beberpa Lembaga seperti Yayasan Pendidikan Auditor Indonesia, PT Lembaga Riset Indonesia, Bina Tani Indonesia, Bina UMKM Indonesia dan PT Auditor Indonesia Newtwork,

E-mail : hidayat.kampai@gmail.com,
website : www.hidayatkampai.com

LARISA
LEMBAGA RISET INDONESIA
PENELITIAN, KONSULTAN HUKUM DAN JASA PUBLIK